

Masyarakat

ASEAN

SEBELUMNYA: BULETIN KOMUNITAS ASEAN

Edisi 6 / DESEMBER 2014

KTT ASEAN PERTAMA PRESIDEN JOKO WIDODO



MEDIA PUBLIKASI DIREKTORAT JENDERAL KERJA SAMA ASEAN
KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI



SOSIALISASI 62
KERJA SAMA SEKTOR KESEHATAN ASEAN

LAPORAN KHUSUS 18
MAMPUKAH ASEAN MENJAGA FONDASI BANGUNAN KEAMANAN KAWASAN?

Saat situasi ekonomi tumbuh menggembirakan, perkembangan situasi geo-politik di kawasan Asia Pasifik justru menunjukkan situasi yang mengkhawatirkan. ASEAN harus bisa berperan mengatasinya.

Laporan Utama

- KTT ke-17 ASEAN – RRT **7**
- KTT ASEAN Plus Three **8**
- KTT ASEAN – PBB **9**
- KTT ASEAN-Australia **10**
- KTT ASEAN Jepang **12**
- KTT ASEAN AS **15**
- KTT-9 Asia Timur **15**

Laporan Khusus

- Indonesia Prakarsai Kerangka Keamanan Regional dalam KTT ASIA Timur **22**
- High Level Task Force **31**

Wawancara

- Dubes RI untuk Thailand Lutfi Rauf **36**

Profil

- Menlu Retno L.P. Marsudi **17**
- Prita Kemal Gani **38**

Wisata

- Belanja Murah di Singapura **40**
- Ayo Jelajahi Kamboja **42**

Pojok Sosialisasi

- Menghadapi Tantangan dan Menangkap Peluang **50**

Apa Kata Mereka 58

Serba-serbi

- Mengenal Konsil Kedokteran Indonesia. **67**



FOTO COVER: REUTERS

LAPORAN KHUSUS 28
MENGENAL ASEAN-CHINA CENTER

WAWANCARA 36
DUTA BESAR RI UNTUK THAILAND, LUTFI RAUF

Wawancara mengangkat tema seputar persiapan dan kesiapan Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 dengan judul berita "Indonesia Melangkah Cepat Menghadapi MEA".

LAPORAN UTAMA 4

KTT ASEAN PERTAMA BAGI PRESIDEN JOKO WIDODO

Dalam pidatonya di KTT itu, terlihat jelas bahwa prioritas teratas Presiden Joko Widodo adalah membangun infrastruktur dan membangun konektivitas maritim. Prioritas ini dibuat untuk meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 7 persen, sesuai target ekonomi pemerintah Indonesia.



DOK. AW

ASEAN

Edisi 6 / DESEMBER 2014

Pembina :

Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN:
I Gusti Agung Wesaka Puja;

Penanggung Jawab:

Sekretaris Direktorat Jenderal Kerja
Sama ASEAN: Iwan Suyudhie Amri;

Redaktur:

Widya Sinedu;

Penyunting/Editor:

Ahmad Firman Sejati,
Didik Trimardjono,
Kusnaredi Takariyanto,
Endang Rusmihaty,
George Bisay Lakahena,
Hadyanto;

Desain Grafis/ Fotografer:

Tuwuh Ismail,
Endang Susilowati;

Pembuat Artikel:

Braviono Arief Adilaksono, Susilo,
Ahimsa Seokartono, Erwin
Muhammad Akbar, Rizali Noor, Fajar
Kurniawan, Novita Supit, Karina
Wulandari, Made Santi Ratnasari, Rina
F. Wahyuningsih;

Sekretariat:

Kasirun, Mulyanto, Avi Dewani
Harahap, Priya Novian,
Putri Cita Puspita Dewi, Rudiymantanto,
TB. M. Ramadhan,
Ika Yuli Indarti;

Alamat Redaksi:

Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN
Kementerian Luar Negeri, Jl. Taman
Pejambon No. 6, Jakarta Pusat,
Telp. 021-3509050/021-3509059,
Fax. 021-3509050



CATATAN REDAKSI



Para pembaca tentu melihat ada beberapa hal yang berbeda pada penerbitan kami kali ini. Pada edisi ini nama kami berubah menjadi Majalah Masyarakat ASEAN. Istilah Masyarakat ASEAN menurut ahli bahasa dirasa lebih pas sebagai terjemahan langsung dari *ASEAN Community*. Itu sebabnya, mulai edisi ini kami berusaha untuk tak lagi membingungkan pembaca dengan adanya dua istilah berbeda. Kini semua kami seragamkan menjadi Masyarakat ASEAN.

Harapannya, dengan tampilan baru yang lebih segar, pembaca bisa lebih menikmati informasi yang kami sajikan.

Pada edisi ini, kami menyoroti kiprah perdana Presiden Joko Widodo saat menghadiri rangkaian KTT ASEAN di Myanmar, November lalu. Selain itu, kami juga menyoroti persiapan Indonesia, dan juga persiapan beberapa daerah dalam menyambut Masyarakat ASEAN 2015 yang

akan segera dimulai akhir tahun 2015 mendatang. Sejalan dengan itu, kami juga mengedepankan beberapa upaya sosialisasi yang terus gencar digelar oleh Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, di berbagai daerah. Mulai dari Bali, Sorong, Yogyakarta, Garut dan lain-lain.

Tak ketinggalan, edisi ini juga menyoroti berbagai profesi di sektor kesehatan seiring dengan integrasi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Harapan kami, lewat artikel-artikel yang kami tayangkan, pembaca bisa memahami dengan jelas, bahwa tak ada yang perlu dikhawatirkan dalam menghadapi pemberlakuan Masyarakat ASEAN. Integrasi ASEAN justru akan menciptakan kemajuan, serta kesejahteraan di seluruh masyarakat negara-negara anggota ASEAN.

Akhir kata, kami mengharapkan edisi ke-enam Majalah Masyarakat ASEAN ini bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jakarta, Desember 2014
Sekretaris Ditjen Kerjasama ASEAN

Iwan Suyudhie Amri

Bagi Anda yang ingin mengirim tulisan atau menyampaikan tanggapan, informasi, kritik dan saran, silahkan kirim melalui e-mail: buletinkomunitasasean@kemlu.go.id



Presiden RI Joko Widodo bersama Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, saat menghadiri KTT ke-25 ASEAN di Myanmar

DOK. REUTERS

KTT ASEAN PERTAMA BAGI PRESIDEN JOKO WIDODO

Untuk pertama kalinya Presiden Joko Widodo menghadiri rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN, yang diselenggarakan pada 12 November 2014 di Nay Pyi Taw, Myanmar. Dalam rangkaian lawatan ke ASEAN perdananya itu, Presiden Jokowi menyampaikan tentang rencana Indonesia untuk lima tahun ke depan.

Dalam pidatonya di KTT itu, terlihat jelas bahwa prioritas teratas Jokowi adalah membangun infrastruktur dan membangun konektivitas maritim. Prioritas ini dibuat untuk meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 7 persen, sesuai target ekonomi pemerintah Indonesia. Selain itu, untuk

Kendati mendukung MEA, Presiden Joko Widodo menegaskan Indonesia tidak akan dibiarkan menjadi pasar semata.

memastikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dibutuhkan adanya perdamaian dan keamanan yang terjaga. Karena itu, tidak ada pilihan lain bagi Indonesia kecuali untuk melanjutkan peran aktifnya dalam menjaga perdamaian di kawasan Asia Tenggara.

Presiden Joko Widodo juga menjelaskan bahwa Indonesia berkomitmen untuk memajukan kerjasama ASEAN, termasuk dalam mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Namun, kendati mendukung MEA, Presiden menegaskan Indonesia tidak akan

dibiarkan menjadi pasar semata. Indonesia, juga harus menjadi bagian penting dari rantai produksi regional dan global.

“Indonesia di bawah pemerintahan saya terbuka terbuka untuk bisnis. Namun, Indonesia, seperti negara berdaulat manapun, harus memastikan kepentingan nasionalnya tidak dirugikan,” tegas Joko Widodo ketika berbicara di KTT ke-25 ASEAN di Nay Pyi Taw, Myanmar.

Lebih jauh, Presiden RI menambahkan bahwa dalam waktu kurang dari satu tahun ini, ASEAN harus bekerja sama mengatasi tiga hal untuk

menuju ke MEA. “Pertama, mempercepat pembangunan infrastruktur dan konektivitas di negara-negara ASEAN, antar negara ASEAN, dan antara ASEAN dengan negara-negara mitra, melalui *Master Plan on ASEAN Connectivity*,” kata Presiden Joko Widodo.

Kedua, meningkatkan kerjasama investasi, industri dan manufaktur yang lebih erat di antara negara ASEAN. Ketiga, peningkatan perdagangan intra-ASEAN yang saat ini masih cukup rendah, yakni 24,2 persen. Presiden RI berharap dalam lima tahun ke depan, nilai perdagangan

asing negara memilih untuk menyelesaikan masalah dengan cara damai dan bersatu dalam menjaga otonomi strategis kawasan. Laut, tambah Jokowi, harus dapat menyatukan antar negara di ASEAN. Bukan malah memisahkan. “Indonesia berkeyakinan, kemakmuran dan perdamaian di kawasan akan ditentukan oleh bagaimana kita bekerja sama dalam mengelola samudera,” tegas dia.

Karena itu, kerjasama membangun konektivitas dan infrastruktur maritim menurut Jokowi, harus menjadi fokus ASEAN ke depan. Dalam menghadiri KTT Ke-25 ASEAN itu,

KTT ke-25 ASEAN menghasilkan beberapa kesepakatan, diantaranya Deklarasi Nay Pyi Taw terkait kerangka dan elemen-elemen penting bagi penyusunan visi Masyarakat ASEAN paska 2015 (*Nay Pyi Taw Declaration on the ASEAN Community's Post-2015 Vision*), Deklarasi untuk penguatan Sekretariat ASEAN dan peninjauan kembali badan-badan ASEAN (*Declaration on the Strengthening of the ASEAN Secretariat and Reviewing the ASEAN Organs*), serta *Chairman's Statement of the 25th ASEAN Summit* (dikeluarkan oleh Ketua ASEAN) yang memuat berbagai capaian, kesepaka-



Presiden RI Joko Widodo bersama Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi, di KTT ke-25 ASEAN di Myanmar

intra-ASEAN setidaknya bisa mencapai 35 hingga 40 persen,” ujarnya.

Joko Widodo juga menyampaikan pentingnya untuk meningkatkan PDB ASEAN hingga dua kali lipat, dari yang semula US\$2,2 triliun menjadi US\$4,4 triliun di tahun 2030 mendatang. ASEAN pun, juga harus berkomitmen untuk mengurangi angka kemiskinan dari 18,6 persen menjadi 9,3 persen di tahun 2030.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga mengingatkan bahwa Masyarakat Politik dan Keamanan ASEAN, hanya bisa diwujudkan jika masing-masing negara menghormati kedaulatannya. Selain itu, masing-ma-

Presiden didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto.

Presiden Myanmar, U Thein Sein, selaku Ketua ASEAN 2014 secara khusus menyambut dan mengucapkan selamat kepada Presiden Joko Widodo, yang untuk pertama kalinya hadir dalam rangkaian pertemuan ASEAN. Presiden Myanmar juga menyampaikan harapannya agar Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo terus berperan aktif dalam memajukan kerja sama ASEAN.

tan serta perkembangan terakhir kerja sama ASEAN.

Pada KTT ASEAN kali ini, para Kepala Negara ASEAN juga membahas mengenai penguatan Sekretariat ASEAN, pekerja migran, sentralitas ASEAN, dan penguatan konektivitas ASEAN, penanganan Ebola, arsitektur regional di Asia Pasifik, Laut Tiongkok Selatan, perubahan iklim, pemberantasan terorisme, perdagangan manusia, bencana alam, dan kasus *Islamic State of Iraq and the Levant* (ISIL), Suriah, Ukraina, Semenanjung Korea, Palestina dan isu-isu internasional lainnya. •

SUMBER: DIREKTORAT POLITIK KEAMANAN ASEAN

PRESIDEN JOKOWI: PERDAGANGAN ASEAN-INDIA 2015 CAPAI US\$100 MILIAR



Presiden RI Joko Widodo di salah satu rangkaian acara KTT ASEAN pertamanya, di Myanmar

Presiden RI Joko Widodo optimistis bahwa target volume perdagangan ASEAN-India sebesar US\$100 miliar pada tahun 2015 akan tercapai. Begitu pula penetapan target volume perdagangan yang lebih ambisius pada tahun 2025, akan bisa dicapai melalui kerja sama investasi, infrastruktur, manufaktur dan ekonomi kreatif antara ASEAN dan India.

Hal itu disampaikan oleh Presiden RI saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-12 ASEAN-India tanggal 12 November 2014 di Nay Pyi Taw, Myanmar. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menekankan tiga hal utama terkait kerja sama kemitraan ASEAN-India. Selain keyakinan akan tercapainya target sebesar US\$100 miliar, Presiden juga menyampaikan apresiasi dan permintaan kelanjutan dukungan India atas implementasi *Master Plan on ASEAN Connectivity* (MPAC). Lalu yang ketiga, Presiden menegaskan perlunya

penguatan kerja sama keamanan melalui mekanisme yang dimotori oleh ASEAN, seperti melalui mekanisme *East Asia Summit* (EAS) atas dasar persamaan kepentingan dan tanggung jawab terhadap stabilitas keamanan di kawasan.

KTT ke-12 ini juga dihadiri oleh seluruh Kepala Negara/Pemerintahan negara anggota ASEAN, serta Perdana Menteri India dan Sekretaris-Jenderal ASEAN. India sendiri merupakan salah satu negara mitra wicara strategis ASEAN dan telah menjadi mitra ASEAN selama lebih dari 20 tahun. India juga merupakan salah satu negara yang memiliki *Free Trade Agreement* (FTA) dengan ASEAN, dimana *ASEAN-India Free Trade Agreements on Services and Investment* baru saja ditandatangani secara *ad-referendum* pada saat *ASEAN Economic Ministerial Meeting* bulan Agustus 2014, di Nay Pyi Taw, Myanmar.

Pertemuan Tingkat Tinggi ini membahas pemberantasan terorisme, de-

ngan komitmen untuk memperkuat kerjasama *transnational crime* dan implementasi *ASEAN – India 2003 Joint Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism*, penguatan kerja sama maritim, khususnya keamanan dan transportasi maritim, melalui mekanisme yang telah terbentuk untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan, perlunya upaya keras dan fleksibilitas agar negosiasi *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) dapat maju guna mendukung integrasi ekonomi yang lebih luas di kawasan, penguatan kerja sama ilmu dan keterampilan, pelatihan kewirausahaan dan kejuruan, *Mutual Recognition Agreement*, pariwisata, perdagangan dan investasi, implementasi efektif dari *ASEAN-India Tourism Cooperation*, pentingnya fasilitasi antara ASEAN dan India, menyambut baik-pendirian *Nalanda University*. ●

SUMBER : DIREKTORAT MITRA WICARA
DAN ANTAR KAWASAN



Suasana saat berlangsungnya KTT ke-17 ASEAN-RRT di Myanmar

KTT KE-17 ASEAN-RRT: PRESIDEN JOKO WIDODO TEKANKAN KERJA SAMA EKONOMI DAN MARITIM

Peningkatan kerja sama di bidang ekonomi antara negara-negara ASEAN dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) adalah hal yang penting. Kerja sama tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan bersama, pertumbuhan ekonomi yang seimbang, investasi yang berkualitas, dan perdagangan yang adil.

Hal itu dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-17 ASEAN-Republik Rakyat Tiongkok (RRT) tanggal 13 November 2014 di Nay Pyi Taw, Myanmar. Dalam pidatonya di KTT itu, Presiden juga membahas pentingnya pembangunan infrastruktur regional. “Investasi dalam pembangunan jalan, *deep-sea port*, zona industri, serta pasar tradisional, sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi ASEAN dan kebutuhan

masyarakat,” ujar Presiden RI.

Selain itu, Presiden RI juga menekankan pentingnya peningkatan kerja sama di bidang konektivitas, termasuk konektivitas maritim. Dalam kaitan ini, Indonesia menyambut baik Tahun Kerja Sama Maritim ASEAN-RRT 2015.

KTT ASEAN-RRT ini juga dihadiri oleh seluruh Kepala Negara/Pemerintahan negara anggota ASEAN, Perdana Menteri RRT dan Sekretaris Jenderal ASEAN. Pokok bahasan yang menonjol di acara itu antara lain terkait usulan RRT mengenai “*2+7 Cooperation Framework*”, kerja sama membangun *trust and confidence*, kemungkinan pembahasan lebih lanjut mengenai *treaty of good neighborliness, friendship and cooperation*, kerja sama maritim, serta isu Laut Tiongkok Selatan. Pokok bahasan lainnya yaitu tentang pe-

ningkatan *ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)*, pembentukan *Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)*, dan *ASEAN-China Cultural Exchanges Year 2014*.

Hubungan kerja sama ASEAN dengan RRT sendiri sudah dimulai secara informal pada 1991. Kemudian, RRT menjadi mitra wicara penuh ASEAN pada 1996. Kerja sama kemitraan ASEAN-RRT meningkat menjadi kerja sama kemitraan strategis pada tahun 2003. Kerja sama yang menonjol dari kerja sama kemitraan ASEAN-RRT adalah kerja sama ekonomi dan maritim. Perdagangan ASEAN-RRT menunjukkan tren positif dengan total ekspor ASEAN USD 145,705 milyar pada 2011, naik 28,9 persen dari tahun sebelumnya. ●

SUMBER : DIREKTORAT MITRA WICARA
DAN ANTAR KAWASAN

KTT KE-17 ASEAN PLUS THREE (APT): KERJA SAMA UNTUK PERDAMAIAN DAN KEMAKMURAN KAWASAN

BERITADAERAH.CO.ID



Presiden RI Joko Widodo bersama kepala negara ASEAN, RRT, Jepang, dan Korea Selatan dalam KTT ke-17 ASEAN Plus Three

APT juga perlu memperkuat kerja sama bidang politik dan keamanan.

Seiring dengan upaya menjaga tren kerja sama bidang ekonomi yang positif, *ASEAN Plus Three* (APT) juga perlu memperkuat kerja sama bidang politik dan keamanan. Demikian dinyatakan oleh Presiden RI Joko Widodo dalam KTT ke-17 *ASEAN Plus Three* (APT), 13 November 2014 di Nay Pyi Taw, Myanmar.

Menurut Presiden RI, kawasan yang aman, damai, dan stabil tentunya akan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Presiden Joko Widodo juga menyinggung mengenai pentingnya penguatan sektor pariwisata dan konektivitas, serta perlunya pengembangan SDM, peningkatan mobilitas mahasiswa serta akses generasi muda terhadap pendidikan berkualitas di negara-negara APT.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya penguatan program kerja APT seperti *Chiang Mai Initiative Multilateralisation* (CMIM), kerja sama keamanan pangan melalui *APT Emer-*

gency Rice Reserve (APTERR), dan pembinaan UKM.

KTT APT dihadiri oleh seluruh Kepala Negara/Pemerintahan negara anggota ASEAN, Kepala Negara/Pemerintahan negara *Plus Three* (Jepang, RRT, ROK), dan Sekretaris Jenderal ASEAN.

Beberapa bahasan yang mengemuka di dalam KTT ini adalah mengenai peran *East Asia Vision Group* (EAVG) II dalam meninjau dan mengevaluasi kerja sama APT, penguatan komitmen pendanaan dalam CMIM, kerja sama keamanan pangan melalui *APT Emergency Rice Reserve* (APTERR), serta upaya mengatasi tantangan yang dihadapi oleh usaha kecil dan menengah (UKM).

Tidak hanya bidang ekonomi, KTT juga membahas peningkatan kerja sama politik dan keamanan untuk mengatasi tantangan keamanan tradisional dan non-tradisional termasuk *cyber security* serta perlindungan HAM. Selain itu, bidang sosial-budaya seperti peningkatan kerja sama di bidang pendidikan, pengembangan

SDM, kesehatan publik, informasi dan media, ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi, serta peningkatan *people-to-people contacts*, mendapat perhatian khusus dari para Pemimpin negara APT. Tidak kalah penting, penguatan jejaring antara pemerintah, akademisi dan kalangan usaha juga menjadi sorotan pada KTT itu.

Kerja sama *ASEAN Plus Three* (APT) terjalin sejak tahun 1997 pada saat kawasan Asia sedang dilanda krisis ekonomi. KTT APT pertama berlangsung di Kuala Lumpur pada Desember 1997.

Prioritas kerja sama APT antara lain, meliputi bidang politik dan keamanan, ekonomi dan keuangan, energi, lingkungan hidup, perubahan iklim dan pembangunan yang berkesinambungan, sosial-budaya dan pembangunan, serta dukungan institusional dan hubungan dengan kerangka kerja sama yang lebih luas. •

SUMBER : DIREKTORAT MITRA WICARA
DAN ANTAR KAWASAN



Presiden RI Joko Widodo bersama para kepala negara ASEAN, dan Sekjen PBB dalam KTT ke-6 ASEAN PBB

KTT KE-6 ASEAN-PBB DARI ASEAN UNTUK DUNIA

KTT membahas perlunya upaya bersama guna mengurangi kesenjangan pembangunan, memajukan UMKM, dan mengatasi berbagai tantangan global.

ASEAN dan PBB perlu melakukan upaya bersama guna mengurangi kesenjangan pembangunan, memajukan UKM, dan mengatasi berbagai tantangan global.

Demikian dikatakan oleh Presiden RI Joko Widodo ketika menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-6 ASEAN-Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tanggal 12 November 2014 di Nay Pyi Taw, Myanmar. Ia menambahkan, upaya bersama juga diperlukan guna mengatasi berbagai isu keamanan tradisional dan non-tradisional, penguatan *good governance* dan demokrasi, penguatan pengawasan dan perlindungan HAM serta mengatasi tantangan global se-

perti wabah Ebola, isu *Islamic State in Iraq and Syria (ISIS)*, keamanan maritim, serta keselamatan dan kebebasan bernavigasi.

Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menekankan pentingnya sinergi antara Agenda Pembangunan dan Visi Masyarakat ASEAN Pasca-2015. Pada kesempatan yang sama, Presiden RI juga menyampaikan kesiapan Indonesia untuk bekerja sama dengan ASEAN dan PBB secara cepat dan tanggap dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, terorisme, wabah penyakit menular dan penanganan bencana. “Yang paling penting adalah kerja sama ASEAN-PBB harus memiliki manfaat dan dampak langsung serta nyata kepada masyarakat,” tegas

Joko Widodo.

KTT ke-6 ASEAN-PBB ini dihadiri oleh seluruh Kepala Negara/Pemerintahan negara anggota ASEAN, Sekretaris Jenderal PBB dan Sekretaris Jenderal ASEAN.

Kerja sama kemitraan ASEAN-PBB awalnya dimulai sebagai Program Sub-Kawasan pada tahun 1977. Tujuannya, untuk mendukung kerja sama ASEAN. Saat ini, kerja sama ASEAN-PBB antara lain juga meliputi: upaya pengurangan kesenjangan pembangunan, konektivitas ASEAN, perdamaian dan rekonsiliasi, moderasi, serta penanggulangan kejahatan lintas batas. ●

SUMBER : DIREKTORAT MITRA WICARA
DAN ANTAR KAWASAN

ASEAN - AUSTRALIA 40th ANNIVERSARY COMMEMORATIVE SUMMIT

LAPORAN UTAMA

Nay Pyi Taw, Myanmar, 12 November 2014



Para kepala negara/kepala pemerintahan ASEAN, dan Perdana Menteri Australia dalam KTT Peringatan ke-40 ASEAN-Australia

OKEZONE.COM

KTT PERINGATAN KE-40 ASEAN-AUSTRALIA KERJA SAMA ASEAN-AUSTRALIA SEMAKIN MENINGKAT

Para pemimpin ASEAN dan Australia sepakat untuk meningkatkan status kemitraan menjadi kemitraan strategis, yang berarti kerja sama lebih luas dan mendalam.

Hal itu merupakan hasil utama dari pertemuan tingkat kepala negara (KTT) Peringatan (*Commemorative Summit*) ke-40 ASEAN-Australia, yang dilaksanakan pada tanggal 12 November 2014 yang lalu di Myanmar.

Untuk mewujudkan peningkatan tersebut, KTT yang dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan KTT ke-25 ASEAN itu menyepakati untuk terus mendorong implementasi rencana aksi kerja sama kemitraan secara konkret.

“Kemitraan ASEAN dan Australia akan semakin mendorong perekono-

KTT itu mengesahkan Pernyataan Bersama para Pemimpin ASEAN-Australia untuk meningkatkan hubungan menuju hubungan strategis dan saling menguntungkan.

mian negara-negara ASEAN seperti Malaysia yang akan menjadi negara berpenghasilan tinggi, Singapura yang memiliki PDB per kapita yang lebih tinggi dari Australia, dan Indonesia yang merupakan *democratic super-power*,” ungkap Perdana Menteri Australia Tony Abbott kepada para kepala negara ASEAN yang hadir.

Dalam KTT Peringatan itu dibahas antara lain pengkajian dan arah hubungan antara ASEAN dan Australia serta isu-isu lainnya. Pada acara itu disahkan Pernyataan Bersama para Pemimpin ASEAN-Australia untuk meningkatkan hubungan menuju ke-

pada hubungan strategis dan saling menguntungkan.

Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Australia menyampaikan dua inisiatif untuk meningkatkan kemitraan ASEAN-Australia, yaitu pembentukan *ASEAN-Australia Council* untuk membantu meningkatkan *people to people contact*, dan *Mekong business initiative* untuk mendorong pengembangan UKM di kawasan Mekong.

“Australia mengakui keberhasilan ASEAN dalam mencapai kemajuan ekonomi yang signifikan, meyakini bahwa kemakmuran tidak dapat di-

capai tanpa stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan,” lanjut PM Tony Abbott.

Ia juga menambahkan bahwa Australia sangat ingin menjadi mitra terpercaya ASEAN, tidak hanya di bidang ekonomi namun juga di bidang politik-keamanan dan sosial-budaya. Australia juga berkomitmen untuk berkontribusi menjaga keharmonisan dan memajukan pertumbuhan ekonomi di kawasan.

Di bidang sosial-budaya, KTT juga mencatat peranan Australia dalam hal penanggulangan bencana khususnya penanganan topan Haiyan. Di samping itu, Australia juga berkomitmen untuk mendorong kerja sama di bidang kesehatan, antara lain dalam mengatasi penyakit menular seperti Ebola.

Pada bidang pendidikan, Australia telah meluncurkan *New Colombo Plan* (NCP), sebuah program pengiriman mahasiswa Australia ke negara-negara ASEAN untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Australia mengenai masyarakat Asia termasuk ASEAN.

Bidang kerja sama lain yang menjadi perhatian KTT ini antara lain pada penanggulangan terorisme dan kelompok ekstrimis. Beberapa negara anggota ASEAN khususnya Filipina dan Vietnam menyampaikan harapannya agar Australia dapat memainkan peran strategis di bidang kerja sama maritim termasuk keamanan maritim dan keselamatan pelayaran.

Terkait isu regional dan internasional, para pemimpin ASEAN dan Australia mengutuk kekejaman ISIS dan sepakat untuk bekerja sama dalam menghadapi ancaman kelompok teroris dan ekstrimis. Mengenai Laut Tiongkok Selatan (LTS), Australia diharapkan dapat terus memberikan dukungannya kepada ASEAN khususnya dalam menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan.

KTT juga menyambut baik komitmen Australia untuk mendukung konektivitas di kawasan melalui implementasi *Master Plan on ASEAN Connectivity* (MPAC) dan pembiayaan proyek-proyek infrastruktur utama.

Sampai dengan tahun 2013 lalu perdagangan antara ASEAN-Australia mencapai 68 triliun USD. Australia merupakan mitra dagang keenam terbesar bagi ASEAN dan sebaliknya

OKEZONE.COM



Perdana Menteri Australia, Tony Abbott

ASEAN adalah mitra dagang kedua terbesar bagi Australia.

Dalam kaitan perdagangan ini, KTT mendorong penyelesaian pembahasan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) dan Australia berharap agar pengalaman dari kemitraan ASEAN-Australia dan pasar bebas Australia-New Zealand (AANZFTA) dapat menjadi rujukan dalam penyusunan kemitraan tersebut.

Sementara itu, dalam bidang pariwisata, jumlah kunjungan warga ASEAN ke Australia sebanyak satu juta orang dan sebaliknya dari Australia ke negara-negara ASEAN mencapai hingga 2,5 juta. Selain itu, lebih dari 100.000

mahasiswa ASEAN saat ini belajar di Australia.

Kerja sama kemitraan ASEAN-Australia sendiri telah berkembang dengan pesat sejak dimulai pada tahun 1974. Hal ini tercermin dari peningkatan nilai perdagangan sebesar 80 kali lipat dan jumlah peningkatan investasi dua arah ASEAN-Australia yang mencapai USD 155 miliar.

Sementara itu, rencana aksi dari hubungan kemitraan komprehensif yang rencananya berlaku mulai tahun 2015 sampai 2019 telah disahkan sebelumnya pada pertemuan tingkat Menlu ASEAN dengan Australia. •

SUMBER : DIREKTORAT MITRA WICARA DAN ANTAR KAWASAN

OKEZONE.COM





MYANMAR, 2014

17th ASEAN – JAPAN SUMMIT

Nay Pyi Taw, Myanmar, 12 November 2014



Para kepala negara ASEAN, dan Perdana Menteri Jepang dalam KTT ke-17 ASEAN-Jepang

KTT KE-17 ASEAN-JEPANG

REVIU DAN ARAH KE DEPAN KERJA SAMA ASEAN-JEPANG

Pembangunan infrastruktur merupakan elemen yang penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang seimbang bagi kesejahteraan rakyat. Untuk mendukung pembangunan infrastruktur, negara-negara ASEAN dan Jepang perlu memastikan terlaksananya *ASEAN-Japan 10-Year Strategic Economic Cooperation Roadmap* yang bermanfaat bagi kedua pihak.

Hal itu dinyatakan oleh Presiden RI, Joko Widodo saat menghadiri KTT ke-17 ASEAN-Jepang, 12 November 2014 di Myanmar. Presiden RI juga menekankan perhatiannya pada upaya penciptaan kualitas ke-

hidupan yang lebih baik, antara lain melalui perbaikan sistem layanan kesehatan, adanya *universal health coverage* dan jaring pengaman sosial. Ditegaskan pula pentingnya kerja sama dalam penanganan bencana, serta menciptakan stabilitas dan keamanan di kawasan, melalui kerja sama maritim.

Agenda utama dalam KTT ke-17 ASEAN-Jepang ini adalah membahas *Review and Future Direction of ASEAN-Japan Relations* serta *Other*

Matters. Lalu, mengingat *ASEAN-Japan Plan of Action (PoA) 2011-2015* akan segera berakhir, maka penyusunan PoA yang baru menjadi salah satu prioritas kerja sama kemitraan ASEAN-Jepang.

Dalam pertemuan itu, negara-negara ASEAN mengapresiasi dukungan Jepang terhadap *ASEAN community building* dan sentralitas ASEAN. Sementara itu, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menyampaikan komitmen Jepang untuk le-

bih berkontribusi dalam menjamin perdamaian dan kesejahteraan di kawasan serta meningkatkan kolaborasi dengan ASEAN. Hal itu menurut Abe, sesuai dengan kebijakan Jepang mengenai *proactive contribution to peace*.

Kemudian, di bidang maritim, Jepang terus berkontribusi dalam peningkatan kapasitas, seperti dalam pengembangan sumber daya manusia, kapal pengontrol, fasilitas navigasi, pelatihan bersama dan keselamatan pelayaran.

Jepang juga terus mendukung pencapaian Masyarakat ASEAN 2015 serta peningkatan kerja sama ASEAN-Jepang, antara lain melalui *Japan-ASEAN Integration Fund (JAIF) 2.0* sebesar USD 100 juta, serta 70 proyek konektivitas ASEAN-Jepang.

Selain itu, untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, Jepang mendorong penguatan kerja sama konektivitas dan pembangunan secara efektif melalui berbagai proyek *public-private partnership*, pembangunan infrastruktur yang berkualitas, konsultasi untuk menyelesaikan perjanjian di bidang aviasi, serta mengharapkan segera diselesaikannya negosiasi *ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP) Bidang Perdagangan Jasa dan Bidang Investasi*.

Dalam menciptakan kualitas kehidupan yang lebih baik, Jepang mendorong tercapainya *universal health coverage* di ASEAN dan pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan. Jepang juga mengundang para Pemimpin ASEAN untuk hadir dalam *Risk Reduction Conference* yang akan diselenggarakan di Sendai, Jepang, bulan Maret 2015.

Terkait kerja sama di bidang politik, para pemimpin ASEAN terus mendorong pentingnya kerja sama dalam penanganan isu keamanan tradisional and non-tradisional. Dalam hal ini, KTT menyambut baik pertemuan *Informal ASEAN Defense Ministers Meeting (ADMM)* yang diselenggarakan di Bagan, Myanmar, tanggal 19 November 2014.

Para Pemimpin juga menyambut baik disahkannya *Joint Declaration for Cooperation to Combat Terrorism and Transnational Crime* untuk meningkatkan kerja sama dan menunjukkan kemajuan dalam upaya memerangi terorisme dan kejahatan

lintas negara.

Beberapa negara anggota ASEAN juga menyampaikan dukungannya terhadap kebijakan Jepang mengenai *proactive contribution to peace*. Dalam kaitan ini, Malaysia dan Viet Nam menyampaikan dukungan kebijakan proaktif Jepang dan perubahan interpretasi pasal 9 Konstitusi Jepang demi tercapainya ketertiban internasional. Hal ini dinilai sesuai dengan peran Jepang sebagai kekuatan ekonomi di kawasan dalam rangka menjaga perdamaian dan lingkungan yang aman.

Pertemuan juga menegaskan pentingnya kerja sama ASEAN dan Jepang dalam menjamin perdamaian dan keamanan di kawasan. Dalam kaitan ini, kedua pihak perlu terus mendorong *mutual trust and confidence*. Adanya berbagai tantangan di kawasan global, seperti eskalasi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok teroris, maupun wabah penyakit menular seperti ebola, semakin menegaskan pentingnya memperkuat kerja sama dalam menangani permasalahan internasional.

Para Pemimpin juga mendorong agar Jepang dapat bekerja sama dengan negara tetangga, antara lain dalam isu Laut Tiongkok Selatan, Semenanjung Korea, dan Laut Tiongkok Timur dengan menekankan penanganan masalah secara damai, bersikap *self restraint*, berdasarkan hukum internasional, dan mendorong segera diselesaikannya *Code of Conduct in the South China Sea (COC)*. Terkait isu Laut Tiongkok Selatan,

Filipina menyampaikan apresiasi kepada Jepang atas dukungannya terhadap Filipina.

Sedangkan Jepang menekankan pentingnya tiga prinsip dalam *rule of law* yang telah disampaikan oleh Perdana Menteri Abe dalam *Shangri la Dialogue* bulan Juni 2014, yakni penyampaian tuntutan berdasarkan hukum internasional, tidak menggunakan kekerasan, serta penyelesaian masalah secara damai. Jepang juga mengangkat masalah penculikan yang dilakukan oleh Korea Utara dan berharap permasalahan tersebut dapat segera diselesaikan.

Sementara itu, terkait kerja sama ekonomi, peserta KTT mengapresiasi dukungan Jepang dalam upaya pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Di bidang ekonomi, nilai strategis Jepang bagi ASEAN terlihat dengan tingginya aktivitas perdagangan dan investasi keduanya. Pada 2013, Jepang merupakan mitra dagang terbesar ketiga dan sumber investasi asing langsung (FDI) terbesar kedua bagi ASEAN. Namun demikian, nilai perdagangan ASEAN-Jepang menunjukkan penurunan dalam 2 tahun terakhir.

Guna meningkatkan kinerja perdagangan dan investasi kedua pihak, Pertemuan menyambut baik kemajuan substantif dalam negosiasi *ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP) Bidang Perdagangan Jasa dan Investasi* yang ditargetkan selesai di akhir tahun 2014. Lebih lanjut, Pertemuan mendorong kerja sama yang lebih kuat

BUSINESSLOUNGE.CO



Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe

dalam rangka implementasi *ASEAN-Japan 10 years Strategic Economic Cooperation Roadmap* guna dapat melipatgandakan nilai perdagangan pada tahun 2022.

Pertemuan juga menggarisbawahi pentingnya keberlanjutan dukungan Jepang terhadap implementasi *Master Plan on ASEAN Connectivity* (MPAC). Dukungan Jepang kepada ASEAN untuk menyukseskan proses integrasi ekonomi ASEAN akan membawa dampak positif bagi Jepang, karena besarnya keterkaitan perekonomian kedua kawasan. Untuk itu, peningkatan *public-private partnership* (ppp) perlu dilakukan.

Selain itu, dalam kerangka kerja sama sosial budaya, para pemimpin ASEAN dan Jepang berupaya mendorong kerja sama di bidang kesehatan, seperti penanganan wabah penyakit menular, dan penyediaan pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih baik, seperti melalui *Universal Health Coverage* (UHC).

Khusus di bidang penanganan bencana, para pemimpin negara ASEAN mengapresiasi komitmen Jepang dalam kerja sama tanggap darurat dan operasionalisasi *ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management* (AHA Centre). Dalam kaitan ini, Pertemuan juga menyambut baik akan diselenggarakannya *the 3rd World Conference on Disaster Risk Reduction* di Sendai, Jepang, bulan Maret 2015.



Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe bersama beberapa kepala negara ASEAN

KTT ke-17 ASEAN-Jepang ini diselenggarakan sebagai rangkaian dari KTT ke-25 ASEAN dan KTT Terkait Lainnya. KTT dipimpin oleh Presiden Myanmar selaku Ketua ASEAN, dan

dihadiri oleh para Kepala Negara/Pejabat pemerintahan negara Anggota ASEAN, Perdana Menteri Jepang, serta Sekretaris Jenderal ASEAN. • SUMBER: DIREKTORAT MITRA WICARA DAN ANTAR KAWASAN

Prioritas Tindak Lanjut KTT ASEAN-Jepang

Hingga saat ini, berbagai usulan proyek kerja sama yang menggunakan dana *Japan-ASEAN Integration Fund* (JAIF) 2.0 masih banyak berasal dari Jepang. Untuk itu Indonesia perlu terus mendorong pemanfaatan program kerja sama kemitraan ASEAN-Jepang dengan menyampaikan berbagai usulan proyek kerja sama yang

bermanfaat bagi Indonesia.

Peningkatan kerja sama ASEAN-Jepang di bidang ekonomi, dapat dilakukan antara lain melalui penyelesaian negosiasi *ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership* (AJCEP) Bidang Perdagangan Jasa dan Investasi. Selain itu, peningkatan kerja sama di bidang konektivitas dan pem-

angunan infrastruktur, juga dapat dikembangkan khususnya di bidang maritim. Lalu, hasil KTT juga perlu ditindaklanjuti melalui peningkatan kerja sama di bidang kesehatan, khususnya penyediaan pelayanan kesehatan melalui *Universal Health Coverage* (UHC). •

KTT KE-2 ASEAN-AS PRESIDEN RI DORONG PARTISIPASI UKM

Pemberdayaan dan partisipasi UKM dalam kerja sama ekonomi negara-negara ASEAN dan Amerika Serikat (AS) perlu ditingkatkan. Hal itu ditegaskan oleh Presiden RI Joko Widodo saat menghadiri KTT Ke-2 ASEAN-AS pada 13 November 2014, di Myanmar.

Pemberdayaan itu, termasuk pelibatan UKM pada penyelenggaraan *ASEAN-US Business Summit* tahun 2015. Lalu, sebagai tindak lanjut dari KTT tersebut, Jokowi mengharapkan kementerian terkait senantiasa mempromosikan keterlibatan UKM, mengingat mayoritas usaha di tanah air masuk dalam kategori UKM.

Pada pertemuan kedua kalinya dengan Presiden AS Barrack Obama itu, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan pentingnya kerja sama ASEAN dan AS untuk menciptakan dan menjaga keamanan serta stabi-



litas di kawasan melalui berbagai mekanisme yang ada. Ia juga mendorong AS untuk berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan Rencana Induk Konektivitas ASEAN (*Master Plan on ASEAN Connectivity/MPAC*), khususnya di bidang pembangunan infrastruktur, energi, manufaktur, dan ekonomi kreatif. Presiden selanjutnya mendorong kerja sama yang lebih erat di bidang sosial budaya, “Pengembangan ilmu penge-

ahuan dan teknologi, penanggulangan bencana, lingkungan hidup, perubahan iklim, ketahanan pangan serta pendidikan perlu mendapat perhatian,” tegas Presiden Joko Widodo.

Kerja sama kemitraan ASEAN-AS telah berjalan sejak tahun 1977. Pengembangan kerja sama ASEAN-AS ditingkatkan menjadi *Enhanced Partnership* melalui *Joint Vision Statement on ASEAN-U.S. Enhanced Partnership* pada tahun 2005. ●

SUMBER: DIREKTORAT KSEA

KTT KE-9 ASIA TIMUR PRESIDEN JOKO WIDODO DEKLARASIKAN POROS MARITIM DUNIA

Presiden RI Joko Widodo menegaskan konsep Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Hal itu dinyatakan Presiden saat menghadiri KTT ke-9 Asia Timur di Myanmar. Fokus agenda pembangunan Poros Maritim Dunia ini dijabarkan Joko Widodo melalui lima pilar utama. Yaitu, membangun kembali budaya maritim Indonesia, penciptaan kedaulatan pangan laut dengan nelayan sebagai pilar utama, peningkatan kerja sama maritim dan pengurangan konflik, serta prioritas pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim melalui pembangunan tol laut, pelabuhan laut dalam, logistik dan pariwisata maritim, serta menerapkan diplomasi maritim.

Presiden Joko Widodo juga menyerukan untuk meningkatkan kerja



Presiden RI Joko Widodo saat menghadiri rangkaian KTT ke-25 ASEAN

sama maritim menjadi lebih erat dan secara damai, bukan sebagai ajang perebutan sumber daya alam dan supremasi maritim.

Terkait Laut Tiongkok Selatan, Presiden Joko Widodo menyambut baik komitmen untuk mengimplementasikan secara penuh dan efektif *Declaration of Conduct (DoC) in the South China Sea* dan mendorong penyelesaian *Code of Conduct (CoC) in*

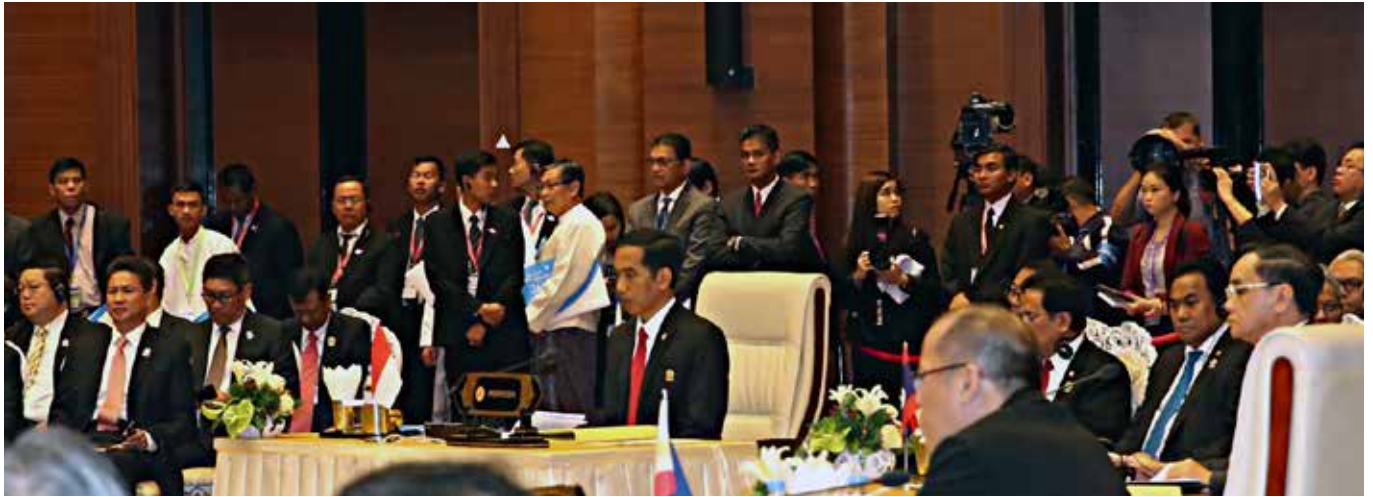
the South China Sea secepat mungkin melalui konsultasi.

Pada KTT ini, Presiden Joko Widodo bersama seluruh pemimpin negara ASEAN, bertemu dengan pemimpin Amerika Serikat, Australia, India, Jepang, Korea Selatan, Republik Rakyat Tiongkok, Selandia Baru, dan Rusia, serta Sekretaris Jenderal ASEAN. Sebagai tamu, hadir Sekretaris Jenderal PBB dan Presiden Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank).

KTT Asia Timur merupakan forum regional yang dibentuk pada 14 Desember 2005 di Kuala Lumpur sebagai wadah tukar pikiran para pemimpin negara peserta KTT Asia Timur mengenai berbagai isu politik dan strategis yang menjadi kepentingan bersama. ●

SUMBER: DIREKTORAT MITRA WICARA DAN ANTAR KAWASAN

KTT KE-25 ASEAN DALAM SOROTAN KAMERA



Presiden Joko Widodo dalam rapat pleno KTT ke-25 ASEAN



Delegasi Indonesia yang dipimpin Presiden Joko Widodo diterima delegasi Myanmar sebagai tuan rumah KTT ke-25 ASEAN



Presiden Joko Widodo di acara KTT ASEAN-Amerika Serikat



Presiden Joko Widodo bersama delegasi, dalam rangkaian KTT ke-25 ASEAN

MENTERI LUAR NEGERI RI RETNO L.P. MARSUDI

MENLU WANITA PERTAMA INDONESIA

Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah menorehkan sejarah baru untuk Republik Indonesia dengan menunjuk salah satu putri terbaik bangsa sebagai Menteri Luar Negeri RI wanita yang pertama. Ibu Retno L.P. Marsudi, diplomat karir dan salah satu kader perempuan terbaik di Kementerian Luar Negeri, telah resmi menjadi Menteri Luar Negeri Kabinet Kerja terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2014.

Ibu Retno, begitu biasanya disapa, memiliki pengalaman yang panjang dan beragam sebagai diplomat karir di Kementerian Luar Negeri. Ibu Retno pernah menangani beragam isu kerja sama bilateral, regional, dan multilateral.

Sesuai dengan arahan Presiden RI, diplomasi Indonesia yang dipimpin oleh Ibu Retno akan diwujudkan dalam sebuah diplomasi yang bersifat “kerakyatan”. Hal ini diterjemahkan ke dalam langkah-langka mewujudkan sifat diplomasi yang membumi, berorientasikan pada kepentingan rakyat, dan dapat memberikan manfaat konkret. Diplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri, hendaknya memiliki nilai tambah (*added value*) bagi kepentingan nasional. Ditambahkan, prioritas luar negeri yang ditekankan oleh Presiden saat ini mencakup tiga hal, yaitu penyelesaian perbatasan, perlindungan warga negara, dan diplomasi ekonomi. Dalam konteks kerja sama ASEAN, pemberlakuan Masyarakat ASEAN 2015 yang sudah di depan mata hendaknya dapat memberikan manfaat nyata dan dipandang sebagai peluang besar bagi seluruh elemen masyarakat Indonesia.

Sebelum menduduki jabatan Menteri Luar Negeri, Retno L.P. Marsudi menjabat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda periode 2012 – 2014. Selama Ibu Retno menjabat sebagai Duta Besar telah banyak prestasi

dan capaian yang diwujudkan guna mempererat hubungan kedua negara. Salah satu capaian tersebut adalah terbentuknya Komitimen Komprehensif (Comprehensive Partnership) antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda. Hal tersebut merupakan pencapaian tertinggi dalam suatu hubungan bilateral antar negara.

Salah satu peristiwa yang paling berkesan selama Ibu Retno menjabat sebagai Duta Besar adalah upaya evakuasi dan identifikasi sejumlah warga negara Indonesia yang menjadi korban dalam tragedi penerbangan MH 17 (rute Amsterdam – Kuala Lumpur). Ibu Retno bersiaga penuh dan memimpin langsung satuan tugas yang dibentuk oleh KBRI Den Haag selama sekitar 48 jam di Bandara Schipol, Amsterdam, sejak terjadinya peristiwa tersebut. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pelayanan kekonsuleran (*citizen service*) yang maksimal bagi warga negara Indonesia yang menjadi korban dalam peristiwa itu.

Pada bulan April 2008 – Januari 2012 Ibu Retno bertugas sebagai Direktur Jenderal Amerika dan Eropa di Kementerian Luar Negeri RI. Selama mengemban amanah tersebut Ibu Retno mencatatkan beragam capaian sebagai Kepala Juru Runding (Chief Negotiator) dalam berbagai pembahasan dokumen Komitimen Strategis dan Komprehensif dengan hampir seluruh negara di kawasan Eropa dan Amerika.

Sebagai seorang diplomat karir, pencapaian tertinggi adalah menjadi seorang Duta Besar. Ibu Retno tidak hanya satu kali menjabat sebagai seorang Duta Besar. Sebelum bertugas sebagai Duta Besar di Belanda Ibu Retno juga merupakan Duta Besar LBBP Republik Indonesia untuk Kerajaan Norwegia dan Republik Eslandia (2005 – 2008). Berbagai capaian dan beragam kontribusi istimewa selama Ibu Retno menjabat mendapatkan pengakuan oleh Pemerintah Norwegia berupa penganugerahan



Order of Merit (*Grand Officer*), yang merupakan bintang jasa tertinggi kedua. Penghargaan tersebut disampaikan langsung oleh Raja Norwegia pada Desember 2011 sebagai bentuk apresiasi dalam memajukan hubungan bilateral Indonesia dan Norwegia. Sebagai catatan, Ibu Retno merupakan orang Indonesia pertama yang dianugerahkan penghargaan tersebut.

Pengalaman Ibu Retno L.P. Marsudi sebagai diplomat karir tidak hanya menangani isu-isu dan kerja sama bilateral. Ibu Retno juga pernah menangani isu-isu regional dan juga multilateral diantaranya penugasannya sebagai Direktur Kerja Sama Intra-Kawasan Amerika dan Eropa (2002–2003) dan sebagai Deputi Direktur Kerja Sama Ekonomi Multilateral (2001). Selain itu Ibu Retno juga pernah bertugas sebagai Direktur Eropa Barat selama dua tahun pada kurun waktu 2003 – 2005. Ibu Retno mengawali karir diplomatiknya di Kementerian Luar Negeri dengan bertugas sebagai Sekretaris III fungsi Penerangan pada KBRI Canberra, Australia (1990 – 1994). Selanjutnya bertugas sebagai Counselor Ekonomi di KBRI Den Haag, Belanda (1997 – 2001). •

SUMBER : WEBSITE KEMLU.GO.ID

MAMPUKAH ASEAN MENJAGA FONDASI BANGUNAN KEAMANAN KAWASAN?

MFA.GO.TH



Suasana konferensi tingkat kawasan yang bertajuk *The Future of Security in The Asia Pacific* yang digelar di Bangkok, Thailand.

Dari sisi ekonomi, kawasan Asia-Pasifik telah muncul sebagai poros baru perekonomian global, karena perekonomiannya yang tumbuh tinggi. Namun, situasi geopolitik di kawasan ini justru mengalami kemunduran. Betapa tidak, konflik yang cukup kompleks dan melibatkan aktor-aktor negara besar muncul di sini.

Ini menimbulkan pertanyaan yang cukup merasahkan: Apakah ASEAN sebagai organisasi regional cukup tangguh dan mampu diandalkan dalam mempertahankan kestabilan dan keamanan kawasan? Dan, mampukah ASEAN mencegah munculnya

Saat situasi ekonomi bergerak menggembirakan, perkembangan situasi geo-politik di kawasan Asia Pasifik justru tumbuh mengkhawatirkan. ASEAN harus bisa berperan mengatasinya.

konflik dalam skala yang lebih besar?

Hal itu menjadi salah satu pertanyaan utama yang muncul dalam konferensi tingkat kawasan yang bertajuk "*The Future of Security in The Asia Pacific: Emerging Challenges, Promoting Conflict Management, and Enhancing Cooperation In Maritime Areas*" yang dilaksanakan di Bangkok, Thailand pada tanggal 25-26 Agustus 2014.

Dalam pidato pembukaannya, H.E. Sihasak Phuangkitkeow selaku *Permanent Secretary* Kementerian Luar Negeri Thailand menjabarkan situasi geopolitik dan geoekonomi kawasan secara umum. Ia menuturkan bagaimana ketimpangan antara situasi geopolitik dan geoekonomi kawasan merupakan hal yang menggelisahkan dan mesti diperhatikan oleh para *stakeholders* alias pemang-

ku kepentingan di kawasan.

Dalam konferensi yang diikuti oleh tokoh-tokoh dari kalangan pemerintah, akademisi, dan praktisi keamanan itu, Phuangketkeow memaparkan bahwa geoekonomi kawasan mengalami perkembangan positif. Antara lain, dengan adanya RCEP (Kerjasama Ekonomi Komprehensif Kawasan) dan APEC (Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik) yang menunjukkan begitu dinamisnya geliat perekonomian regional.

Sementara disisi lain, kompetisi geopolitik menunjukkan penurunan yang cukup membuat gusar. Ini, antara lain terlihat dari munculnya kompetisi perebutan pengaruh oleh kekuatan besar dunia (*great powers*), sengketa-sengketa maritim, tumpang tindih wilayah maritim, kejahatan transnasional, dan lain-lain.

Kompetisi kekuatan besar tampak antara lain dalam perebutan pengaruh Jepang dan RRT yang menginginkan porsi lebih banyak dalam rezim keamanan di kawasan, Amerika Serikat yang mengubah poros kebijakan luar negerinya ke Asia (*Pivot to Asia*), kebijakan *Look East* India, dan tidak ketinggalan Rusia yang juga ingin meningkatkan pengaruhnya. Situasi geopolitik diperumit dengan permusuhan diantara mereka, seperti Jepang dan RRT yang masih memiliki permasa-



lahan historis, serta Amerika Serikat dan RRT yang fluktuatif dalam hal hubungan politik.

Dalam kaitan itu situasi geopolitik dan relevansi ASEAN sebagai satu-satunya organisasi yang tidak hanya berkuat pada bidang ekonomi namun juga politik dan keamanan di

kawasan Asia-Pasifik tengah diuji keberadaannya. Terkait hal tersebut, ASEAN harus mampu mengajak aktor-aktor penting di kawasan agar tidak kehilangan sentralitasnya sebagai *agenda-setter*.

Untuk membuktikan diri sebagai organisasi kawasan yang tangguh, ASEAN juga harus mampu membentuk arsitektur keamanan regional, serta berpandangan keluar dari kungkungan geografis kawasan Asia-Tenggara. Sebab, arsitektur kawasan Asia-Pasifik tidak lagi terbatas pada sepuluh negara ASEAN, namun juga setiap negara yang memiliki batas laut dengan Samudera Pasifik. ASEAN harus inklusif, mampu memfasilitasi keberlanjutan dialog dan kerja sama bagi para aktor untuk mencari titik temu di antara perbedaan.

Beberapa negara seperti India dan Rusia telah mengemukakan pentingnya rancang-bangun keamanan baru yang menggantikan ASEAN. Sekarang tinggal apakah ASEAN sebagai kumpulan negara-negara yang baru tumbuh dan berkembang mampu mengajak aktor-aktor penting di kawasan dalam menciptakan kestabilan politik dan keamanan untuk duduk bersama menyelesaikan permasalahan melalui diplomasi, tanpa menggunakan jalan kekerasan. • SUMBER: KBRI BANGKOK



POSITIF NEGATIF MAKIN TERBUKANYA WISATA ASEAN

Sektor pariwisata saat ini merupakan salah satu faktor utama dalam meningkatkan perekonomian negara. Bukan hal yang aneh jika setiap negara berusaha untuk memperkenalkan wisata dalam negeri kepada seluruh dunia. Hal tersebut yang juga sedang gencar dilakukan oleh setiap negara-negara ASEAN. Dari tahun ke tahun wisata masing-masing negara ASEAN berkembang pesat, sehingga setiap tahunnya pengunjung terus meningkat. Dalam hal ini, Masyarakat ASEAN 2015 merupakan sarana dalam mewujudkan tujuan setiap negara ASEAN mempromosikan wisatanya. Masyarakat ASEAN dibentuk karena memiliki tujuan yang sama yaitu membangun negara-negara anggotanya dalam hal ekonomi, politik-keamanan, dan sosial budaya.

Setiap negara anggota ASEAN berbongong-bondong memperkaya fasilitas wisata mereka dan gencar mempromosikannya. Hal tersebut tidak bisa dihindari karena semakin banyak wisatawan berkunjung, semakin tinggi juga tingkat perekonomian negara. Pembangunan fasilitas wisata

besar-besaran menjadi tugas penting setiap negara anggota ASEAN karena tujuan utama para wisatawan berkunjung ke tempat wisata adalah mencari sesuatu yang unik dan berbeda dari negara asalnya.

Adanya Masyarakat ASEAN 2015 akan semakin memperlancar keluar masuk para wisatawan ke tempat wisata. Apalagi adanya pembebasan visa antar negara anggota ASEAN, hal ini menjadi peluang besar dalam meningkatkan perekonomian negara di sektor pariwisata. Keuntungan membuka diri setiap negara ASEAN dalam segi pariwisatanya akan meningkatkan pendapatan daerah dan juga pendapatan negara. Selain dari keuntungan ekonomi yang di dapatkan, dengan pariwisata suatu negara akan terkenal, bukan hanya terkenal antar kawasan negara anggota ASEAN tetapi juga bisa terkenal ke seluruh dunia. Bukan hanya terkenal wisatanya tetapi juga negaranya karena ciri khasnya dan berbeda dengan negara asal para wisatawan. Dua hal ini merupakan dampak positif atau keuntungan yang jelas terlihat.

Harus diakui terbukanya negara –

negara ASEAN dalam sektor pariwisata bisa memberikan dampak negatif juga, walaupun dampak positifnya lebih banyak. Budaya merupakan dampak yang akan jelas terlihat jika setiap negara semakin terbuka dengan wisatanya. Setiap negara ASEAN memiliki budaya masing-masing, tidak hanya dari segi bahasa tetapi juga gaya hidup dan berbusana. Gaya berpakaian masyarakat yang berasal dari negara-negara anggota ASEAN tentunya berbeda. Hal ini penting diperhatikan setiap negara anggota ASEAN yang membuka diri pariwisatanya. Budaya dari luar dengan mudah akan masuk dan bisa mempengaruhi masyarakat di dalamnya. Disini peran pemerintah dibutuhkan dalam memberikan kebijakan dan penyuluhan tentang budaya asli mereka agar masyarakatnya tetap memahami seperti apa budaya asli mereka sehingga berjalan sesuai aturan-aturan adat negara tersebut.

Selain itu, dampak negatif lain adalah lingkungan. Kebersihan, keamanan, dan ketertiban lingkungan yang ada di negara tersebut harus

REMOTELANDS.COM



Candi Borobudur, Jawa Tengah Indonesia

TRAVELHDWALLPAPERS.COM



Menara Petronas, Kuala Lumpur Malaysia

dipertahankan. Terbukanya wisata-wisata negara anggota ASEAN setiap harinya akan membawa banyak wisatawan. Kebersihan dan keamanan lingkungan tentunya menjadi hal yang dikhawatirkan. Semakin banyak wisatawan ada kemungkinan lingkungan bisa menjadi kotor karena ulah dari beberapa wisatawan yang tidak bisa menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya.

Keterbukaan ini bisa saja mengganggu keamanan negara yang dikunjungi. Banyak wisatawan dengan budaya berbeda, kepribadian, dan pola pikir yang berbeda bisa menjadi hal yang dikhawatirkan. Setiap orang yang masuk ke tempat wisata dengan asal negara yang berbeda, ada yang memiliki kepribadian baik dan juga kepribadian buruk. Hal ini harus diantisipasi agar keamanan masyarakat negara yang dikunjungi dapat terjaga dengan baik.

Apa yang harus dipersiapkan setiap negara anggota ASEAN dengan keterbukaan terhadap wisatanya? Tentunya yang terpenting disini adalah peran pemerintah. Pemerintah pembuat kebijakan, pembuat aturan, dan menstabilkan suatu negara agar terhindar dari hal-hal yang menyimpang. Peran pemerintah dibutuhkan dalam memberikan kebijakan dan aturan baru seperti memperkuat hukum bagi yang mengganggu keamanan rakyat daerah tempat wisata dan sekitarnya, memberikan aturan jelas bagi para wisatawan agar berkunjung tempat wisata dengan tertib.

Hal kedua yang dipersiapkan adalah masyarakat yang berpegang teguh pada identitas asli negara mereka dan tentunya menjunjung tinggi norma sosial.

Setiap negara anggota ASEAN memiliki identitas asli negara mereka seperti adat istiadat yang murni lahir sejak nenek moyang mereka dan norma sosial yang tertanam di dalamnya. Ketika norma sosial mulai dilanggar akan memperoleh sanksi dari masyarakat. Hal ketiga yang harus dipersiapkan adalah masyarakat yang mampu menyaring setiap budaya luar yang masuk ke negara mereka. Menyaring budaya bukan hal yang mudah, setiap budaya mempunyai kekuatan untuk saling mempengaruhi budaya lain. Wisatawan yang keluar masuk ke negara yang mereka kunjungi khususnya negara anggota ASEAN yang memiliki wisata terbanyak memiliki kemungkinan besar terjadinya difusi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, difusi memiliki pengertian sebagai proses penyebaran atau perembesan suatu unsur kebudayaan dari satu pihak ke pihak lain.

Proses ini sangat memungkinkan terjadi. Jika proses difusi terjadi secara terus menerus, tentunya akan terjadi pencampuran budaya seperti Akulturasi dan kemungkinan yang lebih buruknya bukan pencampuran budaya lagi tetapi pembauran atau yang sering disebut Asimilasi. Asimilasi akan menghasilkan budaya baru karena pencampuran budaya luar de-

ngan budaya asli. Hal ini akan menghilangkan identitas asli dari negara tersebut, norma yang tertanam di negara mereka akan mulai bergeser, sistem dan aturan tentunya berubah.

Jika pencampuran budaya atau pembauran budaya dapat diterima masyarakat dengan baik tentunya akan memberikan keuntungan tersendiri bagi negara tersebut tetapi kemungkinan terburuknya bagi masyarakat atau negara yang tidak mampu menerima pencampuran atau pembauran budaya mereka akan terjadi *culture shock* dan tentunya sangat mengganggu. Filtrasi budaya akan sangat membantu negara yang dikunjungi agar masyarakat paham apa yang bisa diterima dan apa yang harus disaring terlebih dahulu.

Keterbukaan negara-negara anggota ASEAN dalam sektor pariwisata tentu memberikan manfaat yang besar bagi negara mereka dan masyarakat. Tentunya tidak selalu positif yang diperoleh tetapi juga negatifnya, hanya saja dampak negatif dapat diantisipasi dengan kesiapan yang matang dari negara tersebut dan terpenting adalah kesiapan masyarakatnya.

Masyarakat yang berpegang teguh pada budaya dan identitas asli negara mereka akan mampu bertahan dalam kondisi ini, meskipun berbagai budaya dari luar berusaha masuk dan mempengaruhi budaya asli negara tersebut. •



Masjid berkubah emas di Brunei Darussalam



Angkor Watt di Kamboja

INDONESIA PRAKARSA KERANGKA KEAMANAN REGIONAL DALAM FORUM KTT ASIA TIMUR



Mantan Menteri Luar Negeri RI Periode 2009-2014 Marty Natalegawa, dalam Workshop on Regional Security Framework, November 2014 di Jakarta

Pada tanggal 7 November 2014, Dr. Marty M. Natalegawa, (Menlu RI pada saat itu), telah membuka sesi pertama 3rd East Asia Summit (EAS) Workshop on Regional Security Framework di Jakarta. Pada sesi pertama yang dimoderatori oleh Dirjen Kerja Sama ASEAN, I Gusti Agung Wesaka Puja, Menlu menjelaskan *Indonesia's Initiative on EAS Treaty of Friendship and Cooperation in the Indian and Pacific Oceans (Indo-Pacific Treaty)*. Dr. Marty juga menyambut dengan hangat para peserta yang datang dan menyatakan kegembiraannya dapat berinteraksi

secara langsung mengenai prakarsa Indonesia di dalam forum EAS. Dr. Marty juga berharap *Workshop* ini dapat menjadi ajang pertukaran ide dan diskusi yang baik.

Lebih lanjut Dr. Marty menjelaskan bahwa kondisi geopolitik dan geostrategi dunia saat ini dipenuhi dengan ketegangan. Karena itu, penting bagi Indonesia untuk terus menjalin kerja sama. Melalui kerja sama dengan negara-negara lain, Indonesia dapat menikmati *peace dividend* serta menghindari ketegangan dan potensi konflik.

Meskipun negara peserta EAS memiliki sejarah hubungan yang baik,

saat ini ada tiga masalah besar yang harus dihadapi dan diselesaikan bersama, yaitu *trust deficit* (defisit kepercayaan), *territorial disputes* (sengketa wilayah), dan *managing global change* (mengelola perubahan global). Oleh sebab itu, penting bagi negara-negara di kawasan untuk membangun kepercayaan agar dapat terhindar dari konflik.

Saat ini masih banyak terjadi sengketa wilayah di kawasan Asia Timur, termasuk yang menyangkut Indonesia. Meski begitu, para pemimpin negara-negara di kawasan selama ini mampu mengelolanya dengan baik sehingga potensi tersebut

tidak pecah menjadi konflik terbuka.

Tantangan selanjutnya yang dihadapi negara-negara peserta EAS adalah mengelola perubahan situasi global. Setiap wilayah di dunia ini pasti mengalami perubahan geopolitik dalam perkembangannya. Berbagai potensi friksi dapat timbul seiring dengan perubahan tersebut. Untuk mengantisipasi hal tersebut, sangat penting bagi semua pihak untuk mengubah pandangan bahwa perubahan bukanlah suatu *zero sum game* yang menguntungkan pihak-pihak tertentu dan merugikan pihak-pihak lainnya, tetapi lebih merupakan kesempatan yang dapat menguntungkan semua pihak.

Khusus untuk kawasan Asia Tenggara, Dr. Marty menyatakan bahwa ASEAN telah berhasil mengubah kawasan yang pada awalnya penuh ketegangan menjadi kawasan yang damai dan bahkan akan menjadi satu masyarakat di tahun 2015. Keberhasilan ASEAN ini dapat dikatakan sebagai suatu contoh transformasi yang baik. Keberhasilan dalam menjaga perdamaian di kawasan ASEAN tidak terlepas dari adanya *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC) dimana prinsip-prinsip seperti penghori-

matan pada kedaulatan negara dan penyelesaian sengketa dengan cara damai dijunjung tinggi. TAC juga telah diadopsi negara-negara lain di luar ASEAN. Hal ini membuktikan lebih jauh bahwa ASEAN sukses dalam membangun budaya penyelesaian konflik secara damai. Dr. Marty juga menyampaikan paparan mengenai suatu arsitektur keamanan kawasan yang diperuntukkan bagi kawasan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik dengan mereplikasi kesuksesan TAC ke kawasan yang lebih luas serta menjadikan *EAS Declaration for Mutually Beneficial Relations* (*EAS Bali Principles*) suatu instrumen yang mengikat secara hukum.

Pada sesi pleno kedua, *Workshop* membahas mengenai “*ASEAN’s Experience in Maintaining and Promoting Peace, Security, and Stability in the Region.*” Pembicara dalam sesi tersebut berasal dari Brunei Darussalam, Thailand, dan Sekretariat ASEAN. Sementara itu, peserta dari RRT bertindak sebagai moderator. Sedangkan di sesi pleno ketiga, pembahasan *Workshop* mengangkat tema “*Towards a New Perspective on Regional Security Paradigm*” dengan Vietnam, Australia, India dan Ame-

rika Serikat sebagai pembicara dan Thailand sebagai moderator. *Workshop* ditutup dengan pembahasan mengenai “*Future Steps on Establishing Security Architecture in the Asia-Pacific Region*” dengan Malaysia, Rusia, dan Selandia Baru sebagai pembicara serta Indonesia sebagai pembicara dan juga moderator.

Kegiatan *Workshop* ini merupakan kelanjutan dari *EAS Workshop and Dialogue on Regional Security Framework* (*1st EAS Workshop*) di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, 14-15 November 2013 dan *Workshop on ‘Strengthening Security and Developing Cooperation in the Asia-Pacific Region’* (*2nd EAS Workshop*) di Moskow, Rusia, 25 April 2014.

Rangkaian kegiatan *Workshop* ini dihadiri oleh sekitar 80 peserta. Mereka terdiri dari wakil negara-negara peserta EAS (10 negara anggota ASEAN, Amerika Serikat, Australia, India, Jepang, Selandia Baru, Republik Rakyat Tiongkok, Republik Korea, dan Rusia), wakil Kementerian/Lembaga RI terkait, dan Sekretariat ASEAN. •

SUMBER: DIREKTORAT JENDERAL
KERJA SAMA ASEAN



Para peserta *Workshop on Regional Security Framework*, yang digelar di Jakarta, November lalu



TQSMAGAZINE.CO.UK

PROFIL PERDAGANGAN VIETNAM DENGAN NEGARA ASEAN

EKSPOR VIETNAM KE INDONESIA NAIK 16 PERSEN

Menurut sumber Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Vietnam (Kemenperindag), nilai ekspor Vietnam ke Indonesia pada bulan Juni 2014 telah mencapai US\$ 218,54 juta. Sehingga, ekspor Vietnam ke Indonesia dalam enam bulan pertama tahun 2014 mencapai US\$ 1,32 miliar atau naik 16 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Produk ekspor utama Vietnam ke Indonesia yang mengalami peningkatan adalah telepon dan suku cadang, produk baja, *clinker* dan batubara, serta tekstil dan produk tekstil.

Ekspor telepon dan suku cadang mengalami pertumbuhan yang signifikan, naik dua kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu menjadi US\$ 422,20 juta, atau hampir 30% dari total nilai ekspor Vietnam ke Indonesia.

Nilai impor Vietnam dari Indonesia pada bulan Juni 2014 mencapai US\$ 203,49 juta. Sedangkan dalam enam bulan pertama tahun 2014 impor Vietnam dari Indonesia telah mencapai US\$ 1,18 miliar. Produk impor Vietnam dari Indonesia antara lain adalah kertas, mesin-mesin industri, batubara, produk logam (metal), dan bahan kimia industri.

Komoditi ekspor dan impor utama Vietnam dengan Indonesia pada bulan Juni 2014 dan enam bulan pertama tahun 2014, tergambar pada tabel di sebelah ini:

Komoditi ekspor utama Vietnam ke Indonesia dan nilainya (dalam US\$)

NO	KOMODITI	JUNI 2014	JAN-JUNI 2014
1	Telephones, mobile phones and parts	61,92 juta	422,20 juta
2	Iron an steel	32,71 juta	173,73 juta
3	Machines, tools, other parts	12,78 juta	72,99 juta
4	Clinker dan semen	7,09 juta	64,54 juta
5	Materials for textile, footwear, leather	8,79 juta	54,95 juta
6	Transportation and spare parts	8,41 juta	46,45 juta
7	Textile and garment products	6,95 juta	43,30 juta
8	Chemical products	9,90 juta	46,20 juta
9	Yam	7,06 juta	41,73 juta
10	Computers, electronic appliances and parts	5,61 juta	36,18 juta
11	Coffee	982,776	30,83 juta
12	Plastics product	4,95 Juta	30,64 juta
13	Plastick	4,95 juta	19,59 juta
14	Iron and steel products	3,86 juta	19,13 juta
15	Footwears	858,596	11,14 juta



Keindahan alam Ha Long Bay, Vietnam

Komoditi impor Vietnam dari Indonesia dan nilainya (dalam US\$)

NO	KOMODITI	JUNI 2014	JAN-JUNI 2014
1	Paper all kinds	15,69 juta	108,04 juta
2	Machines, tools, other parts	15,10 juta	88,36 juta
3	Chemicals	15,43 juta	65,70 juta
4	Other base metal products	15,60 juta	65,22 juta
5	Coal	5,67 juta	60,28 juta
6	Plastics	8,74 juta	48,62 juta
7	Animal fodders and materials	4,07 juta	47,40 juta
8	Parts and accessories of motor vehicles	9,46 juta	42,13 juta
9	Yam	8,43 juta	42,07 juta
10	Vegetable oil and animal fat	6,74 juta	40,84 juta
11	Liquefied petroleum gases (LPG)	8,78 juta	40,84 juta
12	Computers, electronics and spare parts	6,37 juta	37,46 juta
13	Fabrics	8,44 juta	36,11 juta
14	Chemical product	6,54 juta	35,29 juta
15	Pastrycooks, sweet and cereal products	4,43 juta	27,56 juta

Sementara itu, Kemenperindag Vietnam juga menyebutkan bahwa nilai ekspor Vietnam ke negara-negara ASEAN pada bulan Juni 2014 mencapai US\$ 1,47 miliar, sehingga dalam enam bulan pertama tahun 2014 telah mencapai US\$ 9,26 miliar atau naik 4,8% dibandingkan periode yang sama tahun 2014. Produk ekspor utama Vietnam ke negara-negara Anggota ASEAN adalah telepon dan komponennya, elektronik dan komputer, karet, baja, kopi dan beras.



Pasar tradisional Vietnam

Sedangkan nilai impor Vietnam dari negara-negara ASEAN pada bulan Juni 2014 mencapai US\$ 2,06 miliar dan dalam enam bulan pertama tahun 2014 telah mencapai US\$ 11,23 miliar (naik 5,9%). Produk impor utama Vietnam adalah minyak dan gas, sepeda motor, mobil dan suku cadang, elektronik dan komponennya, baja dan besi.

Nilai ekspor dan impor Vietnam dengan negara-negara anggota ASEAN pada bulan Juni 2014 dan enam bulan pertama tahun 2014, sebagai berikut:

Nilai ekspor Vietnam ke negara-negara anggota ASEAN (dalam US\$)

No	NEGARA	NILAI EKSPOR JUNI 2014	NILAI EKSPOR JAN-JUNI 2014
1	Singapura	177,43 juta	1,45 miliar
2	Thailand	241,62 juta	1,64 miliar
3	Malaysia	358,31 juta	1,95 miliar
4	Indonesia	218,54 juta	1,32 miliar
5	Filipina	198,47 juta	1,16 miliar
6	Brunei Darussalam	1,43 juta	40,23 miliar
7	Kamboja	214,73 juta	1,30 miliar
8	Myanmar	29,03 juta	163,04 juta
9	Laos	33,32 juta	228,54 juta

Nilai Impor Vietnam dari negara-negara anggota ASEAN (dalam US\$)

No	NEGARA	NILAI IMPOR JUNI 2014	NILAI IMPOR JAN-JUNI 2014
1	Singapura	653,52 juta	3,55 miliar
2	Thailand	624,45 juta	3,16 miliar
3	Malaysia	393,83 juta	1,98 miliar
4	Indonesia	203,49 juta	1,98 miliar
5	Filipina	54,56 juta	341,14 juta
6	Brunei Darussalam	-	6,39 juta
7	Kamboja	49,04 juta	415,22 juta
8	Myanmar	10,93 juta	102,10 juta
9	Laos	72,16 juta	516,02 juta

Sumber: diolah dari data Bea dan Cukai Vietnam

Menurut KBRI Hanoi, nilai perdagangan antara Vietnam dan negara-negara anggota ASEAN pada tahun 2014 diperkirakan akan mengalami peningkatan seiring dengan tingginya aktivitas bisnis perusahaan Vietnam dengan mitranya dari ASEAN. Kedekatan geografis dan kesamaan konsumsi telah membantu Vietnam membangun hubungan dagang yang kuat dengan pasar ASEAN. Perusahaan Vietnam juga secara berkesinambungan mempromosikan produk ekspornya melalui kegiatan pameran dagang yang diselenggarakan di kawasan ASEAN guna mengetahui kondisi dan kebutuhan konsumen di negara

tujuan ekspor.

Sedangkan menurut Kemenperindag Vietnam, faktor utama yang mendorong peningkatan ekspor Vietnam ke pasar ASEAN adalah pemanfaatan preferensi tarif dalam perdagangan guna meningkatkan daya saing produk ekspornya dengan negara non-ASEAN. Vietnam akan memanfaatkan MEA tahun 2015 untuk kemajuan ekonomi nasional dan sekaligus meningkatkan nilai perdagangan Vietnam dengan sejumlah negara di kawasan. Produk ekspor unggulan Vietnam adalah telepon dan suku cadang, komputer, produk elektronik dan suku cadang, peralatan transportasi dan suku cadangnya, mesin, baja, besi, beras dan lain-lain. Vietnam juga akan memanfaatkan keunggulan produknya yang dikhususkan untuk tujuan pasar Kamboja, Laos dan Myanmar.

Pada tahun 2013, total perdagangan Vietnam dengan negara-negara anggota ASEAN tercatat US\$ 39,70 miliar atau naik 3,9 persen dibandingkan tahun 2012. ASEAN merupakan pasar ekspor yang terbesar ke-3 bagi Vietnam setelah Amerika Serikat dan Uni Eropa dengan nilai Ekspor sebesar US\$ 18,5 miliar. Sementara itu, nilai perdagangan Indonesia-Vietnam pada tahun 2013 mencapai US\$ 4,82 miliar, nilai ekspor Indonesia ke Vietnam tercatat US\$ 2,37 miliar dan impornya US\$ 2,45 miliar. Artinya, dalam hal ini Indonesia mengalami defisit sebesar US\$ 79,35 juta.

● SUMBER: KBRI HANOI

MRTODDSVIETNAMHOLIDAY.BLOGSPOT.COM



Suasana kota Hanoi, Vietnam

FORUM ON
ASEAN
 ECONOMIC INTEGRATION:
 THE ROLE OF LOCAL
 GOVERNMENTS

10-12 OCTOBER 2014 | HERITAGE HOTEL, PASAY CITY



PEMERINTAH DAERAH DI FILIPINA BERSIAP HADAPI INTEGRASI EKONOMI ASEAN

Para pimpinan pemerintah daerah di Filipina berjanji meningkatkan daya saing daerahnya masing-masing, untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN

Sebagai salah satu upaya mempersiapkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, sekitar 200 orang hadir dalam Forum yang bertajuk “*ASEAN Economic Integration: The Role of Local Governments*” di Manila, Filipina. Peserta *Workshop* yang diselenggarakan oleh Departemen Dalam Negeri Filipina pada 10-11 Oktober 2014 ini berasal dari perwakilan Pemerintah Daerah (Pemda) di seluruh Filipina, khususnya para Gubernur dan walikota, perwakilan dari asosiasi pengusaha, LSM dan akademisi.

Pada hari pertama, narasumber berasal dari *Department of Foreign Affairs (DFA)*, *Department of Trade and Industry (DTI)*, *Philippine Chamber of Commerce and Industry*

(PCCI), dan *National Competitiveness Council (NCC)*. Pada pembahasan hari pertama itu, dijelaskan bahwa dengan adanya MEA, pemda harus dapat meningkatkan daya saing sehingga mampu memperluas pasar di kawasan ASEAN. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah peningkatan kolaborasi antara Pemda di Filipina dengan Pemda di negara anggota ASEAN lainnya, seperti halnya kerja sama ekonomi Filipina-Indonesia di bidang ekspor-impor rumput laut dan *carageenan* serta kerja sama investasi di bidang perkebunan kelapa sawit.

Kolaborasi antara Pemda dengan pihak swasta meningkatkan daya saing daerah juga menjadi poin penting yang dibahas pada hari pertama. Hal-hal yang perlu dilakukan anta-

ra lain melalui peningkatan promosi investasi, partisipasi dalam berbagai pameran dagang, serta iklim usaha dan efektivitas birokrasi, seperti penyediaan *one stop service* untuk mempermudah perijinan investasi.

Dalam upaya peningkatan daya saing Filipina di tingkat global dan daya saing Pemda di tingkat nasional, tantangan yang dihadapi antara lain korupsi dan minimnya infrastruktur. Namun, di ASEAN secara umum, Filipina memiliki daya saing tinggi di bidang sumber daya manusia, sumber daya alam dan letak geografi yang strategis. Sektor pariwisata, agribisnis, dan pengembangan SDM dipandang sebagai sektor yang paling berpotensi untuk dimanfaatkan dalam MEA.

Workshop di hari kedua, menghadirkan narasumber dari beberapa Kantor Kedutaan ASEAN, termasuk dari KBRI Manila. Mereka berbagi pengalaman persiapan menghadapi MEA di negara masing-masing. Selain itu hadir pula perwakilan dari beberapa Pemda yang dinilai berhasil melakukan berbagai pembaruan di wilayahnya. Salah satunya adalah Pemerintah Kota Iloilo, yang bekerjasama dengan para pengusaha lokal mampu membangun sejumlah infrastruktur, guna meningkatkan daya saing daerahnya.

Pada saat penutupan, para kepala daerah yang hadir menandatangani *Pledge of Commitment: Advancing Local Agenda for Economic Integration*. Para pemimpin daerah tersebut berjanji untuk bekerja sebaik mungkin dalam meningkatkan daya saing daerah dan masyarakatnya masing-masing dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi MEA.

Upaya sosialisasi yang dilaksanakan oleh Departemen Dalam Negeri Filipina ini merupakan langkah efektif untuk meningkatkan kesadaran Pemda mengenai dampak MEA bagi masyarakat di daerahnya masing-masing. Melalui langkah sosialisasi ini, Pemda dapat mempersiapkan diri sekaligus memperkuat peran mereka dalam meningkatkan daya saing Filipina di tingkat ASEAN. Di sisi lain, forum ini juga menjadi wadah bagi para pimpinan daerah untuk saling berbagi informasi atau menyampaikan hambatan dan tantangan yang mereka hadapi kepada perwakilan pemerintah pusat.

● SUMBER: KBRI MANILA, FILIPINA

MENGENAL LEBIH JAUH ASEAN-CHINA CENTRE



Gedung ASEAN-China Centre di Beijing Tiongkok.

Pusat informasi dan aktifitas satu atap, terkait kerja sama ASEAN dan Tiongkok, yang sarat dengan berbagai kegiatan.

ASEAN-China Centre (ACC) adalah organisasi internasional yang didirikan dengan tujuan sebagai *one-stop information and activity centre* dalam mengembangkan kerja sama antara negara anggota ASEAN dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). ACC diresmikan oleh para Kepala Negara ASEAN dan RRT di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-14 ASEAN-RRT tanggal 18 November 2011 di Bali, Indonesia.

ACC menjalankan mandat hasil keputusan pertemuan ASEAN-RRT, baik pada tingkat Kepala Negara maupun ditingkat *Joint Council (JC)* dan *Joint Executive Board (JEB)*. Selama bulan Agustus dan September 2014, ACC cukup intensif melaksanakan berbagai kegiatan kerjasama, khususnya untuk kepentingan Indonesia. Berikut ini beberapa kegiatan itu.

Pertemuan Delegasi Investor RRT dengan Pengusaha Indonesia

Pertemuan ini diikuti oleh sekitar 100 orang peserta yang terdiri dari Duta Besar RI untuk RRT Soegeng Rahardjo, Sekjen ACC Ma Mingqiang, Gubernur Bengkulu H. Junaidi Hamsyah, Walikota Kota Tual Dr. Hi. M.M. Tamher, Walikota Bogor Bima Arya, Ketua HIPMI Raja Sapta

Oktohari, kalangan pejabat pemerintahan daerah, anggota HIPMI dan pengusaha lainnya. Dalam pertemuan ini, ACC mendatangkan 15 anggota Delegasi Investor RRT anggota ASEAN-RRT *Investment Consortium* yang bergerak di berbagai sektor, meliputi infrastruktur, perkebunan, pertambangan, telekomunikasi, produksi kelautan dan logistik. Delegasi Investor ini merupakan pengusaha asal RRT yang memiliki pengaruh, kredibel dan berminat menanamkan modalnya di Indonesia.

Pertemuan *"Indonesia-RRT Business Potentials & Business Matching"* yang diselenggarakan pada 20 Agustus 2014 di Bogor ini bertujuan menciptakan *platform* bagi pengusaha RRT untuk memahami dan mengenal lebih dekat peluang dan potensi yang dimiliki Indonesia, iklim dan kebijakan Investasi dan berbisnis. Sekaligus, mempertemukan mereka dengan mitra-mitra yang sesuai baik dari kalangan pebisnis maupun dengan pejabat daerah dan pusat.

Pertemuan Investor RRT dengan KADIN Komite Indonesia-Tiongkok

Pada 22 Agustus 2014, telah diselenggarakan Pertemuan antara Delegasi Investasi RRT dengan anggota KADIN yang difasilitasi oleh ACC dan KBRI Beijing di Jakarta. Pertemuan ini

dihadiri oleh sekitar 60 peserta yang terdiri dari investor asal RRT dan pengusaha anggota KADIN lainnya. Turut hadir dalam pertemuan dan memberikan sambutan yaitu Dubes RI untuk RRT, Soegeng Rahardjo, Sekjen ACC dan Ketua KADIN Komite Indonesia-Tiongkok (KIKT) Halim Yusuf.

Dalam sambutannya, Dubes Soegeng Rahardjo mengharapkan anggota KADIN dapat meningkatkan kemitraan dan kerjasamanya dengan mitranya dari RRT dan mendorong peningkatan investasi RRT di Indonesia bagi pertumbuhan perekonomian kedua bangsa.

Pertemuan ini bertujuan untuk mempertemukan investor asal RRT dengan organisasi pengusaha nasional terbesar yaitu KADIN, untuk saling berkenalan, bertukar pandangan dan membahas peluang-peluang yang dapat dikembangkan bersama. Direktur Promosi Sektorial BKPM, Ikmal Lukman turut hadir untuk memaparkan mengenai peraturan dan perundang-undangan nasional terkait penanaman modal asing di Indonesia. Dalam sesi tanya jawab, para investor RRT cukup tertarik dalam pembahasan khususnya aspek hak kepemilikan aset, sewa tanah bagi investor asing, pajak-pajak yang dibebankan kepada pengusaha asing, serta insentif-insentifnya.

Delegasi RRT Berkunjung ke BKPM

Delegasi RRT dipimpin oleh Sekjen ACC berkunjung ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang diterima oleh Mantan Kepala BKPM Mahendra Siregar dan didampingi oleh Deputi Hilman Hariyoga. Sekjen ACC menjelaskan tujuan dari kedatangan para delegasi Investasi RRT dan menjelaskan kepada Kepala BKPM bahwa ini merupakan bagian dari upaya ACC untuk mendorong lebih banyak lagi Investasi RRT ke Indonesia. Dalam kesempatan ini, Mahendra membahas mengenai komitmen investasi senilai USD 28,2 milyar yang disepakati pada saat kunjungan kenegaraan Preiden XI Jinping ke Indonesia pada Oktober 2013, dan mengharapkan ACC turut berperan mendorong realisasinya.

Workshop on Capacity Building for ASEAN Tourism Professionals

Pada 20 Agustus 2014, ACC bekerja sama dengan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Jawa Barat dan Garuda Indonesia telah menyelenggarakan *Workshop on Capacity Building for ASEAN Tourism Professionals* di Bandung. Tujuannya, untuk meningkatkan pemahaman para *stakeholders* mengenai pasar RRT. Target *Workshop* adalah para mahasiswa/pendidik dan pengusaha yang bergerak dalam bidang pariwisata, khususnya sektor jasa, seperti industri perhotelan, restoran, agen perjalanan atau *tour operator*, dan transportasi. Sekitar 350 peserta hadir baik yang berasal dari instansi pemerintahan maupun swasta. Narasumber *Workshop* yaitu para pakar dan pengajar dari *Gullin Institute of Tourism*, salah satu sekolah terbaik dan terbesar bidang pariwisata di RRT, dan memiliki MoU Kerjasama dengan ACC.

Selain itu, workshop serupa juga digelar di Jakarta, pada 22 Agustus 2014. Acara ini diikuti oleh sekitar 120 orang dari kalangan profesional, khususnya yang bergerak dalam bidang perjalanan dan pemasaran Industri pariwisata. Acara ini juga dihadiri Dubes RI untuk RRT, Soegeng Rahardjo. Dalam sambutannya, Dubes mengharapkan para peserta untuk menggarap pasar RRT secara lebih serius lagi, mengingat *outbound* turis RRT pada tahun 2013 mencapai 98 juta jiwa. Sekjen ACC mengharapkan kegiatan ini dapat bermanfaat untuk menjembatani kepentingan kedua negara di bidang pariwisata dan lebih berkontribusi bagi ekonomi nasional masing-masing.

RRT merupakan pasar terbesar turis dunia dan dijuluki "*the biggest spender*". Menurut data NCTA, turis RRT membelanjakan sebesar 128,7 milyar dolar selama tahun 2013. Indonesia sebagai negara terbesar ASEAN yang memiliki wilayah dan penduduk terbesar belum berhasil memanfaatkan peluang yang ada secara maksimal. Indonesia menduduki urutan ke-6 setelah Thailand, Vietnam, Kamboja, Malaysia dan Singapura dalam penerimaan turis asal RRT. Jumlah turis RRT yang berkunjung ke Indonesia pada 2013 mencapai 879,222 jiwa. Jumlah itu, meningkat 23% dibanding tahun sebelumnya.

Bedasarkan Beijing Bureau Statistics yang diterbitkan oleh RRT Daily (4/9/2014) turis RRT menghabiskan 57,76% uangnya untuk berbelanja (*shop-*

ping) disusul dengan akomodasi (*lodging*) 17,76% transportasi 10,88%, dan makan 5,84%, atraksi 3,72%, hiburan 3,72%.

Kerja sama di Bidang Budaya

Sebagai rangkaian kegiatan untuk mempromosikan "*ASEAN-RRT Cultural Exchange Year 2014*", ACC bekerja sama dengan Sekretariat ASEAN dan Kementerian Kebudayaan RRT telah menyelenggarakan pertunjukkan kesenian tari dan musik dari berbagai kelompok etnis RRT di Jakarta (22/8), Bandung (25/8) dan Yogyakarta (28/8).

Tim kesenian asal RRT yang terdiri 40 orang yang didatangkan langsung dari RRT merupakan artis-artis yang cukup profesional dan cukup sering tampil dalam pertunjukan kesenian di luar negeri. Dengan tema "*Best of RRT Performances; Colourful RRT*" tim kesenian RRT menampilkan kesenian-kesenian etnik dari suku antara lain: Tibet, Mongol dan Miao.

Kerja sama di Bidang Pendidikan

Pada 31 Agustus – 5 September 2014, ACC berpartisipasi dalam penyelenggaraan *RRT-ASEAN Education Cooperation Week* (CAECW) di Guiyang, Provinsi Guizhou. CAECW merupakan salah satu *platform* penting ACC guna menjembatani kepentingan kerja sama pendidikan antara ASEAN dan RRT. Acara ini dihadiri sekitar 150 peserta. Peserta asal Indonesia sebanyak 30 orang yang terdiri dari pejabat Kemendikbud, wakil-wakil dari institusi pendidikan negeri maupun swasta, pejabat SEAMEO-SEAMOLEC Indonesia, dan Atdik KBRI Beijing. Dalam CAEW, Ketua Delegasi Indonesia ini dipimpin oleh DCM KBRI Beijing, Wisnu E. Pragtinyo.

Disela-sela CAECW, ACC memfasilitasi pertemuan dan penandatanganan MoU kerja sama antar institusi pendidikan, khususnya dalam rangka rencana pengiriman siswa penerima beasiswa, pertukaran guru, dan pertukaran materi pendidikan (*sharing of content*). Dalam kesempatan ini, ACC menyaksikan penandatanganan 20 MoU antara *Guiyang Preschool Education College*, *Guiyang Nursing Vocational College*, *Guiyang Vocational Technical College* dengan mitra-mitranya dari Indonesia.

Selain itu, Pada 11 September 2014, bertempat di Kemendikbud RI Jakarta, telah dilakukan pelepasan secara resmi sebanyak 80 siswa SMK asal Indonesia untuk mengikuti

program beasiswa sekolah-sekolah kejuruan (*vocational colleges and university*) di Nanjing. Rombongan berikutnya sebanyak 80 (delapan puluh) akan berangkat pada awal Oktober 2014, sehingga total siswa penerima adalah 160 siswa. Ini merupakan realisasi dari kerja sama dan MoU yang ditandatangani sekolah-sekolah kejuruan Indonesia dengan sekolah-sekolah di RRT yang difasilitasi oleh ACC, KBRI Beijing, Kemendikbud, SEAMEO-SEAMOLEC Indonesia pada Juni 2014.

Lain-lain

Masih banyak lagi kegiatan yang difasilitasi oleh ACC. Pada 4 September 2014, telah diadakan pertemuan antara Sekjen ACC dengan Walikota Bandung, M. Ridwan Kamil. Pertemuan ini merupakan Inisiatif dari pihak Kantor Walikota Bandung di sela-sela kunjungan ke Beijing dalam rangka menghadiri *World Tourism Cities Federation* (WTFCF). Dalam kesempatan ini, Walikota Bandung mengharapkan dukungan ACC untuk mempromosikan kota Bandung dalam rangka memperingati HUT Konferensi Asia Afrika yang ke-60 pada April 2015, dan mendorong partisipasi wartawan/jurnalis untuk meliput kegiatan itu.

Selain itu, walikota Bandung juga mengharapkan dukungan ACC untuk mewujudkan Bandung sebagai '*silicon valley*' Indonesia, dengan mendorong investor RRT untuk menambahkan modalnya di Bandung.

Pada 12 September 2014, delegasi PT. Medika Group yang dipimpin oleh Surya Paloh telah berkunjung ke Sekretariat ACC dalam rangka menyaksikan pemberian bantuan alat-alat olahraga dari Tal'ao Sport Company yang diserahkan kepada Ketua Yayasan Sukma, Rerie L. Moerdijat untuk disumbangkan kepada sekolah-sekolah yang membutuhkan.

Surya Paloh berkunjung ke ACC disela-sela acara penganugerahan *Honorary Professorship* dari Beijing *Foreign Studies University* (BFSU). Pada akhir tahun 2013, crew televisi nasional RRT CCTV yang difasilitasi oleh ACC meliputi potensi pariwisata ke Indonesia dan membuat 2 (dua) dokumenter pariwisata berjudul "*Taste dan Discovery*" disamping itu, CCTV juga memiliki MoU kerja sama dengan Metro TV. Melalui kerja sama ini, diharapkan dapat meningkatkan *people-to-people contacts*. •

SUMBER : KBRI BEIJING

PELUANG PASAR ASEAN BAGI PERFILMAN INDONESIA

Pada 31 Desember 2015 yang akan datang, ASEAN sebagai organisasi regional geopolitik dan ekonomi di Asia Tenggara akan mulai memberlakukan Masyarakat ASEAN, sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani di Phnom Penh, Kamboja pada tahun 2013 lalu.

Dalam Masyarakat ASEAN 2015, Indonesia harus melahirkan produk-produk kreatif bernilai ekonomi tinggi. Termasuk, produksi film baik itu layar lebar maupun layar kaca. Terlebih, Indonesia merupakan negara anggota ASEAN terbesar dalam memproduksi film setiap tahunnya. “Indonesia mampu menghasilkan 100 judul film dalam setahun, jumlah ini sangat besar dibandingkan negara anggota ASEAN lainnya,” ujar Marselli Sumarno, dosen Fakultas Film dan Televisi (FFTV), Institut Kesenian Jakarta.

Marselli menambahkan, jumlah produksi film yang besar itu menjadikan peluang besar bagi Indonesia. Pasar ASEAN yang luas tentu menginginkan film-film dengan kualitas terbaik. Indonesia harus terus meningkatkan kualitas film produksinya agar nantinya mampu menembus pasar regional dan internasional.

Menurut dosen yang juga pembuat film itu, film yang baik dapat dihasilkan jika terwujud empat pilar industri perfilman. Pilar pertama adalah modal, sebuah film dapat dihasilkan dengan kualitas baik apabila produser dapat mencurahkan dana sebesar minimal lima milyar rupiah untuk satu film.

Pilar kedua, teknologi. Perfilman di Indonesia sudah berkembang dengan baik, namun mengingat Indonesia hanya merupakan pengguna di bidang teknologi perfilman, maka selalu muncul permasalahan di saat

terjadi perubahan teknologi. Diperlukan investor di bidang teknologi perfilman, sehingga bisa mempercepat alih teknologi dan Indonesia bisa menjadi *creator* dalam teknologi perfilman di masa mendatang. Marselli mencontohkan perfilman di India. Pemerintah India membuka peluang kepada insan perfilman di sana untuk membuat terobosan di bidang teknologi perfilman.

Kemudian, pilar ketiga adalah yang menyangkut SDM. Indonesia saat ini telah memiliki bakat-bakat muda dari daerah. Sebuah Film membutuhkan SDM berkualitas agar film yang dihasilkan dapat dijual di pasar ASEAN. Lalu, pilar terakhir adalah distribusi. Dibutuhkan pemasar profesional yang handal dan mampu membawa Film Indonesia menguasai pasar diseluruh negara anggota ASEAN.

Lebih lanjut Marselli menambahkan perlu adanya semacam “Festival Film ASEAN” yang bisa diselenggarakan secara rutin dan berkelanjutan, dan diadakan secara bergiliran di negara – negara Anggota ASEAN. Festival Film ASEAN sangat penting, karena akan menjadi sarana penting bagi para sineas untuk lebih mengembangkan bakat-bakat mereka dalam membuat film berkualitas. Festival Film juga diharapkan dilaksanakan tanpa ada batasan *genre*, agar tidak membatasi kreativitas para sineas dalam dalam membuat film. Mengingat Festival Film adalah tempat berkumpulnya para insan perfilman, tentunya akan menimbulkan transaksi jual-beli film di dalamnya dan ini akan menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk mempromosikan film-film nya agar dapat diterima di kancah ASEAN.

Jika digarap dengan serius, produksi film Indonesia tentu dapat memberikan banyak dampak positif

kepada masyarakat, seperti menciptakan peluang kerja baru. Sebuah film yang digarap secara sederhana saja, dapat melibatkan minimal lima puluh orang. Sedangkan yang berskala besar, bisa melibatkan sampai seratus orang lebih. Keterlibatan tenaga kerja akan semakin bertambah apabila film-film Indonesia yang dipasarkan ke luar sudah di sulih suarakan (*dubbing*). Hal ini tentu akan memperbesar peluang film Indonesia bisa diterima di negara anggota ASEAN. Karena, film yang sudah disulih suarakan akan lebih mudah dipahami.

Di samping itu, cara pengemasan yang baik juga dapat meningkatkan peluang film Indonesia untuk bisa diterima di pasar ASEAN. Film berkualitas akan lebih terlihat jika dikemas dengan baik, dari segi tampilan gambarnya atau pun sinematografinya.

Salah satu negara ASEAN yang menjadi pangsa pasar terbesar bagi perfilman di Indonesia adalah Malaysia. Faktor kesamaan budaya menjadi pendukung utama film Indonesia dengan mudah diterima dan ditayangkan di Malaysia. Selain itu, jumlah produksi film di Malaysia tidak sebanyak Indonesia. Apalagi, di dukung dengan produksi film Indonesia yang jumlahnya besar dibanding negara anggota ASEAN lainnya.

Marselli menyarankan agar Perwakilan RI di luar negeri dapat berperan lebih aktif sebagai agen dalam pemasaran film Indonesia di luar negeri, khususnya terhadap film-film dokumenter. Seperti, film tentang budaya, lingkungan, atau bahkan kuliner Indonesia.

Semua itu, untuk memanfaatkan peluang besar pasar ASEAN bagi perfilman Indonesia. •

SUMBER : SETDITJEN KERJA SAMA ASEAN



Salah satu pertemuan yang diselenggarakan oleh High Level Task Force

HIGH LEVEL TASK FORCE MENINGKATKAN EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI KERJA ASEAN

Pada usianya yang ke-47, ASEAN yang semula hanya merupakan asosiasi negara-negara di wilayah Asia Tenggara, telah berubah menjadi sebuah komunitas regional dengan bobot kerja sama yang tinggi. Pencanangan pembentukan Masyarakat ASEAN pada akhir tahun 2015 pun turut menambah tingkat kerjasama di antara negara-negara tersebut. Tiga pilar utama masyarakat ASEAN yaitu politik keamanan, ekonomi dan sosial budaya, masing-masing memiliki kerjasama sektoral yang beragam, baik antar pemerintah maupun non-pemerintah.

Tingginya tingkat kerja sama

Gugus tugas tingkat tinggi ini sengaja dibentuk untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja ASEAN, serta penguatan sekretariat ASEAN.

di ASEAN itu telah menimbulkan kompleksitas tersendiri dalam mekanisme kerja antara organ-organ dan badan-badan sektoral ASEAN. Pada satu sisi, setiap pilar ASEAN terlihat telah menjadi suatu pusat kerjasama tersendiri, terpisah satu sama lain. Pada sisi lain, isu-isu yang menjadi subyek kerja sama ASEAN juga telah berkembang dan mengalami kecenderungan ke arah isu-isu lintas pilar dan lintas sektoral yang perlu penanganan secara lintas organ

dan lintas badan sektoral ASEAN.

Selain itu, peran Sekretariat ASEAN sebagai lembaga yang mengawal berbagai implementasi kerjasama ASEAN juga semakin meningkat dengan tuntutan yang semakin tinggi. Lembaga yang berkantor di Jakarta itu dituntut tidak hanya menjadi fasilitator pertemuan-pertemuan ASEAN, tetapi juga dapat melakukan kajian, memonitor implementasi kerjasama dan juga menangani sengketa. Namun begitu, fungsi ideal Sekretariat ASEAN itu

sampai saat ini belum dapat terlaksana, karena minimnya sumber daya Sekretariat ASEAN, baik SDM maupun anggaran.

Adalah Surin Pitsuwan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) ASEAN yang pada bulan Desember 2011 dalam laporannya yang berjudul “ASEAN’s Challenge”, telah melakukan identifikasi secara detail dan komprehensif mengenai tantangan peningkatan hubungan kerjasama dalam ASEAN dan pentingnya memperkuat Sekretariat ASEAN. Surin juga menyampaikan beberapa rekomendasi dalam membenahi berbagai persoalan terkait peran dan fungsi badan-badan ASEAN dan penguatan Sekretariat ASEAN sebagai lembaga yang menjadi motor ASEAN.

Laporan Surin Pitsuwan tersebut direspon oleh *ASEAN Coordinating Council*, organ ASEAN yang terdiri dari para Menteri Luar Negeri negara-negara ASEAN dengan pembentukan gugus tugas tingkat tinggi yang bernama *High Level Task Force (HLTF) on Strengthening the ASEAN Secretariat and Reviewing the ASEAN Organs*. Gugus tugas yang lebih populer dipanggil dengan HLTF ini disahkan dalam pertemuan *ASEAN Coordinating Council (ACC)* pada bulan November 2013.

HLTF terdiri dari wakil-wakil dari seluruh negara ASEAN yang ditunjuk oleh pemerintahnya masing-masing. Pemerintah Indonesia sendiri menunjuk Duta Besar

Ngurah Swajaya untuk menjadi wakil dalam HLTF tersebut. Mantan Direktur Polkam ASEAN, Duta Besar Indonesia di Kamboja dan Wakil Tetap RI pertama untuk ASEAN, Ngurah Swajaya dirasa menjadi pilihan yang tepat untuk mewakili Indonesia dalam HLTF mengingat pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya.

Dalam melaksanakan mandatnya, HLTF telah melaksanakan tujuh kali pertemuan selama tahun 2014. Pada pertemuan-pertemuan itu, para anggota HLTF telah mengkaji, membahas dan mendiskusikan berbagai hal terkait dengan proses kerja ASEAN, penguatan Sekretariat ASEAN serta membahas hubungan eksternal ASEAN.

Kompleksitas kerja dan koordinasi ASEAN

Dalam membahas proses kerja ASEAN, HLTF telah mengidentifikasi berbagai persoalan. Salah satunya adalah kompleksitas proses kerja dan koordinasi dalam ASEAN. Dari kajian diketahui bahwa ASEAN memiliki sedikitnya 800 mekanisme dan melaksanakan sedikitnya 1.200 pertemuan setiap tahunnya. Dengan melihat banyaknya isu lintas sektoral dan lintas pilar dalam ASEAN, duplikasi dan *redundancy* tentu menjadi tak terhindarkan.

Terhadap persoalan ini, HLTF menyampaikan rekomendasi agar dilakukan pengurangan (*streamlining*)

jumlah pertemuan dan mekanisme tersebut. Caranya, bisa dengan melaksanakan meeting secara simultan (*back to back*) dalam isu-isu yang sama atau memiliki kemiripan dan mendorong penggunaan teknologi *tele-conference* untuk pertemuan-pertemuan tersebut.

Dalam hal proses kerja ASEAN, kajian HLTF memperlihatkan bahwa koordinasi di antara organ dan badan-badan ASEAN belum efektif. Padahal koordinasi dalam proses kerja ASEAN sangat penting mengingat tingginya tingkat kerjasama pada ketiga pilar ASEAN. Selain itu, kecenderungan meningkatnya isu-isu kerjasama yang bersifat lintas pilar dan lintas sektoral membuat badan-badan pada pilar ASEAN yang berbeda menangani isu yang sama dan penanganannya menjadi tumpang tindih. Contohnya antara lain isu-isu keamanan non-tradisional, ketenagakerjaan, Hak Asasi Manusia (HAM) dan banyak lainnya.

HLTF sendiri menengarai bahwa implementasi keputusan para pemimpin ASEAN dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN belum sepenuhnya terlaksana karena kurangnya koordinasi. Hal yang sama terjadi dalam pelaporan hasil-hasil implementasi tersebut oleh badan-badan sektoral ke para pemimpin. Untuk itu, salah satu rekomendasi HLTF adalah perlunya peningkatan peran dan fungsi *ASEAN Coordinating Council (ACC)* dalam mengkoordinasikan hasil-hasil keputusan KTT dan sebaliknya.

ACC juga mengkoordinasikan laporan implementasi hasil-hasil keputusan tersebut. Pada sisi lain, ketiga Dewan Masyarakat ASEAN yang terdiri dari Masyarakat Politik Keamanan, Masyarakat Ekonomi dan Masyarakat Sosial Budaya juga perlu menjadi koordinator yang baik bagi badan-badan sektoral di yang berada di bawah naungannya.

Kerumitan ini ditambah dengan kerjasama dengan negara-negara mitra wicara ASEAN dan mekanisme pengaturan regional (*regional arrangement*) seperti *ASEAN Regional Forum (ARF)*, *ASEAN Plus Three*, *East Asia Summit* dan sebagainya yang sedikit banyak menangani isu-isu yang sama dengan yang ditangani oleh organ-organ dan badan-badan



Sekjen ASEAN 2011, Surin Pitsuwan, penulis laporan ASEAN Challenge yang kemudian menjadi dasar terbentuknya HLTF.

ASEAN.

Dalam konteks inilah HLTF memandang perlunya pembenahan dalam sistem kerja dan koordinasi ASEAN ini agar ASEAN tetap relevan menghadapi berbagai perubahan. Apalagi dengan ditambah dengan upaya ASEAN untuk menjaga sentralitas dan kepemimpinannya dalam interaksi dengan negara-negara mitra maupun organisasi regional lainnya.

Penguatan Sekretariat ASEAN

Menghadapi berbagai tantangan peningkatan kerjasama ASEAN, beban Sekretariat ASEAN sebagai lembaga pendukung berbagai program dan implementasinya semakin berat. Sejauh ini, menurut kajian HLTF, sumber daya yang dimiliki Sekretariat ASEAN hanya dapat diarahkan untuk memfasilitasi pertemuan berbagai organ dan badan ASEAN saja. Peran dan fungsi Sekretariat ASEAN untuk memonitor berbagai implementasi kebijakan para pemimpin ASEAN belum terlaksana sepenuhnya. Apalagi untuk melakukan kajian mendalam terhadap kebijakan-kebijakan ASEAN, fungsi yang sama sekali belum tersentuh oleh Sekretariat ASEAN.

Kurang efektifnya pelaksanaan peran dan fungsi Sekretariat ASEAN tidak terlepas dari minimnya sumber daya manusia dan anggaran yang dimilikinya. Dapat dibayangkan, untuk memfasilitasi sekitar 800 mekanisme dan 1.200 pertemuan ASEAN, Sekretariat ASEAN hanya memiliki 305 orang staf saja. Untuk itu, HLTF mendukung usulan Sekretariat ASEAN untuk menambah pegawai Sekretariat ASEAN sampai berjumlah 469 orang pada tahun 2015.

Permasalahan rendahnya staf juga diiringi dengan tingginya tingkat "turnover" SDM tersebut yang disebabkan belum idealnya tingkat remunerasi pegawai Sekretariat ASEAN, apabila dengan pegawai organisasi internasional lainnya. Untuk masalah gaji pegawai ini, sebuah konsultan SDM, *Tower and Watson*, pernah melakukan kajian dan hasilnya diketahui bahwa besaran gaji staf Sekretariat ASEAN masih terlalu rendah dan perlu dinaikan antara 100 persen sampai 300 persen dari besaran gaji saat ini.

HLTF dalam pembahasannya men-



Duta Besar Ngrurah Swajaya, wakil Indonesia untuk HLTF

dukung hasil kajian tersebut dan merekomendasikan kenaikan gaji para staf Sekretariat. Dengan kenaikan remunerasi itu diharapkan kualitas SDM yang diperoleh semakin baik dan tingkat "turnover" pegawai menurun, dengan dampak positif pada jangka panjang yaitu terjaganya "institutional memory" kelembagaan ASEAN oleh para pegawai Sekretariat ASEAN.

Aspek lain dari penguatan Sekretariat adalah penambahan fasilitas dan infrastruktur termasuk gedung dan teknologi informasi. Gedung Sekretariat ASEAN yang terletak di Jakarta sudah dianggap tidak layak lagi untuk memenuhi berbagai kebutuhan ruangan baik untuk staf maupun untuk pertemuan. Pemerintah Indonesia telah menyampaikan komitmen untuk memperluas gedung tersebut, antara lain dengan menghibahkan kantor eks gedung Walikota Jakarta Selatan yang letaknya berdekatan dengan kantor Sekretariat ASEAN. Namun demikian proses perluasan itu memakan waktu yang cukup lama, dan HLTF merekomendasikan untuk dicari solusi-solusi sementara memenuhi kebutuhan gedung tersebut.

Ujung-ujungnya, akar dari permasalahan belum efektifnya peran Sekretariat ASEAN adalah anggarannya yang relatif kecil apabila dibandingkan dengan tingkat kebutuhan operasionalnya. Anggaran Sekretariat ASEAN saat ini berjumlah sekitar 17 juta USD, dan sebagian besar digunakan untuk membayar gaji peggawainya. Bandingkan misalnya de-

ngan anggaran Uni Afrika yang besarnya 277 juta USD, walaupun anggaran Uni Afrika itu sebagian besar berasal dari negara donor.

Melihat kondisi ini, HLTF langsung merekomendasikan untuk menaikkan secara signifikan anggaran yang berasal dari kontribusi wajib negara-negara anggota ASEAN tersebut, bahkan kalau perlu naik dua kali lipat. Namun memang upaya menaikkan anggaran bukan perkara mudah, karena melibatkan aspek birokrasi dan politik di masing-masing negara anggota ASEAN. Salah satu cara menyiasatinya, menurut HLTF, adalah dengan menggunakan kembali anggaran yang tersisa untuk perbaikan fasilitas dan membiayai program lainnya.

Rekomendasi HLTF

Seluruh rekomendasi HLTF itu terangkum dalam laporan dan rekomendasi HLTF yang disampaikan kepada pertemuan ACC ke-5 di Myanmar pada bulan November 2014. Laporan itu mencakup semua rekomendasi HLTF untuk membenahi berbagai aspek dalam sistem kerja ASEAN, penguatan Sekretariat ASEAN dan hubungan eksternal ASEAN. Laporan dan rekomendasi HLTF juga disambut baik oleh para pemimpin ASEAN dan mereka sepakat untuk mengeluarkan deklarasi berjudul "Declaration on Strengthening the ASEAN and Reviewing the ASEAN Secretariat" pada tanggal 12 November 2014.

● SUMBER: DIREKTORAT POLKAM ASEAN



Mantan Menteri Perdagangan RI (periode 12 Februari-20 Oktober 2014) Muhammad Lutfi

VOAINDONESIA.COM

MANTAN MENTERI PERDAGANGAN (PERIODE 12 FEBRUARI-20 OKTOBER 2014) MUHAMMAD LUTFI

KITA HARUS JADI 'SMART BOY'

Pada 23-28 Agustus lalu, pejabat tinggi dan menteri ekonomi negara anggota ASEAN berkumpul di Nay Pyi Taw, guna mematangkan persiapan menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Menteri Perdagangan RI periode 12 Februari-20 Oktober 2014, Muhammad Lutfi, yang memimpin delegasi Indonesia, yakin integrasi ekonomi ASEAN bukanlah hantu yang harus ditakuti. Malah, Lutfi mengatakan, Indonesia akan memetik manfaat dari penyatuan pasar Asia Tenggara. Dia memastikan Indonesia hanya akan

menyepakati perjanjian yang menguntungkan. Ditemui wartawan Koran Tempo, di tengah jeda perundingan *ASEAN Economic Ministers' Meetings* ke-46 pada 25 Agustus lalu, Lutfi bercerita tentang konsep integrasi ASEAN dan strategi menjadikan Indonesia sebagai negara pemenang.

Masih ada yang khawatir perihal kesiapan Indonesia menghadapi MEA, pendapat anda?

Sebenarnya, liberalisasi perdagangan barang ASEAN saat ini sudah mencapai 99,61 persen. Sedangkan secara keseluruhan (barang, jasa, modal, tenaga kerja, dan investasi sudah 82,1

persen terlaksana. Jadi, kalau ditanya apa yang bakal berubah setelah MEA terbentuk pada 31 Desember 2015, ya, tidak ada. Tidak ada yang mesti ditakutkan. Sebab, separuh rakyat ASEAN adalah rakyat Indonesia.

Untuk menarik investasi, meski sudah ada MEA, kita bersaing dengan Vietnam yang gemar memberikan insentif pajak. Apa keunggulan Indonesia?

Kita harus berhati-hati – hati memberi insentif. Di negara lain, Samsung mendapat insentif 10 tahun tidak bayar pajak, dikasih tanah. Di Indonesia mana bisa. Tanah Mahal. Kita cuma bisa menawarkan, kelas menengah kita

jumlahnya segini. Saya tidak khawatir dengan investasi. Tapi memang, iklim investasi masih harus diperbaiki. Kalau ini bisa dikerjakan, akan ada kepastian dan investor akan datang.

Anda optimis sekali dengan daya pikat kelas menengah kita. Bagaimana dengan teori “jebakan kelas menengah”?

Integrasi ekonomi ASEAN juga dapat mencegah jebakan kelas menengah. Kelas menengah Indonesia tumbuh pesat pada 2008-2012. Untuk mencegah *middle income trap*, ada dua solusinya, yaitu menambah infrastruktur untuk menciptakan nilai tambah baru atau transfer teknologi, termasuk pendidikan.

Sektor investasi dan perdagangan mungkin aman, tapi bagaimana dengan sektor jasa? setelah 2015, apakah tenaga kerja ASEAN bebas masuk ke Indonesia?

Gambarannya begini, pertumbuhan penduduk kita sekitar 3,5 juta per tahun. Sedangkan jumlah dokter yang dicetak hanya 7.000 orang per tahun. Orang Indonesia menghabiskan US\$ 4-5 miliar per tahun untuk berobat ke luar negeri. Begitu pula di industri penerbangan. Sepuluh tahun lalu, orang yang terbang hanya 15 juta orang. Konsekuensinya adalah menambah pilot. Jadi, apa yang mau kita tutupi lagi?

Apa yang kita harapkan dari sekian banyak perundingan dagang ini?

Di dalam setiap perjanjian, tidak sekonyong-konyong kedua pihak mendapat keuntungan timbal-balik.

Banyak juga yang kebobolan. Misalnya, ada ketimpangan dalam perjanjian Indonesia – RRT dan Indonesia – Jepang. Pada awalnya memang tidak selalu bisa sama. Tapi, pada akhirnya negara – negara akan mencapai keseimbangan sehingga tercipta kesetaraan di dalam perdagangan. Prinsip kita, perdagangan mesti bermanfaat, mesti adil.

Bagaimana strategi perundingan yang kita terapkan?

Dengan semua potensi yang kita punya, kita tidak bisa lagi menjadi “good boy” seperti selama ini. Indonesia selalu ikut saja dalam perundingan-perundingan. Kita juga tidak bisa, seperti salah satu negara di Asia, yang mengatakan tidak untuk semuanya, itu jadi “bad boy”. Kita harus menjadi “smart boy”. Mungkin saat ini yang terasa kita sangat defensif melaksanakan perjanjian kerja sama ekonomi. Tapi, dalam waktu yang tidak terlalu lama, kita akan menjadi ofensif. Karena terlalu defensif, kita bisa tidak mendapat keuntungan pada masa mendatang.

Apa yang menarik dalam pertemuan AEM kali ini?

Dalam pertemuan ini, kami juga membicarakan tentang *Regional Comprehensive Economic Partnership* dengan negara – negara mitra dialog. Menariknya begini, masing – masing negara sudah punya konsep sendiri. RRT punya *East Asia FTA dan CEPA (Closer Economic Partnership Arrangement)*. Amerika Serikat mensponsori *Trans-pacific Partnership*. Mereka ingin menembus ke-

bantuan Putaran Doha. Belakangan, karena ASEAN ini adalah kawasan perjanjian perdagangan yang paling besar setelah Uni Eropa, orang mau ikut kita. Mereka meninggalkan *East Asia FTA dan CEPA* untuk mengikuti komitmen ASEAN guna menciptakan *Modern Comprehensive Economic Partnership Agreement*. Ada di antara 10 negara ASEAN yang sudah beres perjanjiannya, ditambah lagi dengan enam Mitra Dialog yang sedang kami kerjakan, tapi tetap dengan sentral di ASEAN. Tujuannya supaya enam negara yang tadinya tidak punya EPA (*Economic Partnership Arrangement*), dipaksa supaya bisa jalan.

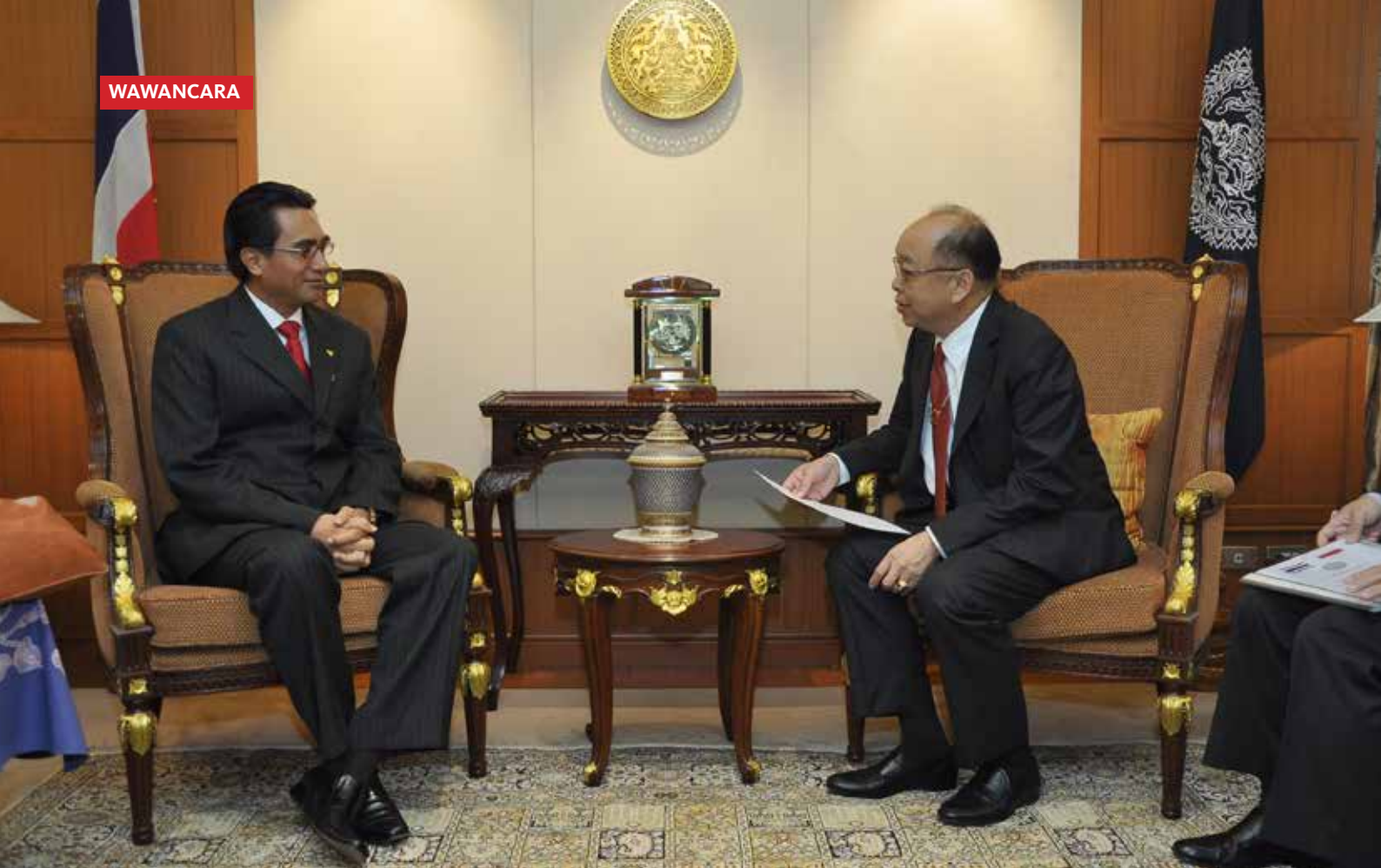
Putaran Doha macet, ini menggambarkan rumitnya mencapai kesepakatan dagang di dunia, Apa solusi mengatasi kebuntuan itu?

Karena perjanjian multilateral lebih kompleks ketimbang bilateral, menurut saya, yang akan menjadi tren ke depan adalah perjanjian bilateral dengan modul *Preferential Trade Arrangement*. Perjanjian model ini hanya menyepakati beberapa *item*. Contohnya, Malaysia ingin jual terigu dan gandum ke kita, kita mau jual sawit dan turunannya ke Malaysia. Tinggal disamakan nilai dan tarifnya, langsung jualan. Dengan *item* yang lebih sedikit, perjanjian bisa cepat. Kalau *itemnya* bertambah, tinggal dirundingkan lagi. •

SUMBER : KORAN TEMPO 1 SEPTEMBER 2014



Mantan Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi saat meninjau langsung pasar tradisional



Duta Besar RI untuk Thailand, Lutfi Rauf bersama Menlu Thailand, Surapong Tovichakchaikul

MFA.GO.TH

LUTFI RAUF, DUTA BESAR RI UNTUK THAILAND INDONESIA MELANGKAH CEPAT MENGHADAPI MEA

Dalam rangka memperingati 50 tahun kelahirannya, Harian berbahasa Thailand, *Daily News* edisi Rabu, 13 Agustus 2014 telah menurunkan berita hasil wawancara eksklusifnya dengan Duta Besar RI untuk Thailand, Lutfi Rauf. Wawancara itu mengangkat tema seputar persiapan dan kesiapan Indonesia menghadapi ASEAN *Economic Community* 2015 dengan judul berita “Indonesia Melangkah Cepat Menghadapi MEA”.

Duta Besar RI diwawancarai untuk mewakili kalangan *Diplomatic Corps* di Bangkok disamping Duta Besar Amerika Serikat, Tiongkok dan Jepang. Indonesia dipilih antara lain

karena Indonesia merupakan mitra dagang terbesar kedua Thailand, setelah Malaysia. Berikut ini cuplikan hasil wawancara Harian *Daily News* dengan Dubes RI, Lutfi Rauf.

Bagaimana pandangan umum Anda terkait kemajuan integrasi ASEAN *Economic Community*?

Saya berharap ASEAN akan mampu mencapai tujuan dalam membangun Masyarakat ASEAN yang ditandai dengan terciptanya pasar dan basis produksi tunggal, kawasan ekonomi kompetitif, pembangunan ekonomi yang merata dan kawasan yang terintegrasi dalam ekonomi global.

Dengan adanya MEA diharapkan akan terciptanya suatu kawasan yang

lebih terintegrasi, lebih kompetitif dengan ketahanan ekonomi yang kuat. Diharapkan pula akan dicapai peningkatan *free flow of goods, services, investment, skilled labour and capital*. Rezim investasi bebas dan terbuka ini akan meningkatkan daya saing ASEAN dalam menarik investasi langsung asing maupun investasi intra-ASEAN.

Mekanisme fasilitas perdagangan yang lebih baik dan harmonis akan meningkatkan daya saing ekspor dan jaringan produksi di wilayah tersebut, serta meningkatkan kapasitas ASEAN sebagai pusat produksi global atau sebagai bagian penting rantai pasokan global. Integrasi ASEAN juga akan turut memastikan dinami-

ka perkembangan ekonomi ASEAN. Pemerataan pembangunan ekonomi menyediakan akses yang lebih baik untuk peluang bagi pembangunan SDM, kesejahteraan sosial dan keadilan, dan partisipasi yang lebih eksklusif dalam proses integrasi ASEAN dan pembangunan masyarakat serta kemakmuran bersama bagi seluruh Masyarakat ASEAN.

Bagaimana Indonesia bersiap menghadapi MEA, khususnya strategi pemerintah dalam melakukan penyesuaian dan menanggulangi kesenjangan ekonomi di antara anggota MEA?

Menjelang MEA, berbagai langkah telah dilaksanakannya oleh Indonesia untuk memfasilitasi arus aliran barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan modal di ASEAN. Antara lain, melalui perbaikan lingkungan dan kondisi agar lebih kondusif guna mempermudah investor ASEAN dan pemasok layanan dalam mengakses pasar yang lebih besar, dengan terus memfokuskan kembali pada kebijakan dasar seperti penyederhanaan peraturan, liberalisasi perdagangan dan investasi dan fasilitasi, investasi di bidang infrastruktur dan sumber daya manusia.

Indonesia juga terus bekerja dalam meningkatkan iklim investasi melalui pemberlakuan dan pembangunan berbagai regulasi seperti *tax allowance*, *fasilitas bea masuk*, *tax holiday*, paket rencana aksi untuk meningkatkan kemudahan melakukan bisnis, dan kebijakan ekonomi dikemas untuk meningkatkan iklim investasi. Lalu, Indonesia secara konsisten juga mempromosikan upaya penguatan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) seperti menyediakan akses ke sumber daya lembaga keuangan pendanaan, meningkatkan produktifitas dan daya saing produk/komoditas, jasa, kompetensi, pelaksanaan Nota Kesepahaman, meningkatkan Sistem Logistik Nasional dan pembangunan infrastruktur (meningkatkan konektivitas) terutama dengan pelaksanaan *Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi*.

Apakah MEA dapat berperan dalam memperkuat persatuan di antara anggotanya?

Ya, MEA memang dapat berperan memperkuat persatuan di antara anggota. Seperti disebutkan sebelumnya, ASEAN akan lebih terhubung dan terintegrasi dalam berbagai aspek, MEA akan turut mempromosikan aliran bebas barang, jasa, investasi,

tenaga kerja terampil dan modal sehingga terjadi peningkatan besar dalam interaksi dan pergerakan orang di seluruh lintas batas wilayah.

Apa saja langkah menonjol Indonesia sejalan dengan cetak biru MEA?

Ketahanan perekonomian Indonesia cukup kuat dalam menghadapi krisis. Kunci kekuatan Indonesia tersebut antara lain adalah stabilitas politik dan reformasi, ekonomi, SDM yang produktif dan masih muda, sumber daya alam yang melimpah dan kelas konsumen yang meningkat, iklim investasi dan menjaga ekonomi seperti harmonisasi dan penyederhanaan pengaturan bidang usaha. Selain itu, kebijakan stabilisasi ekonomi yang diluncurkan oleh Bank Indonesia dan Pemerintah telah membawa peningkatan stabilitas dalam transaksi berjalan.

Dalam rangka meningkatkan iklim investasi menjaga pertumbuhan ekonomi, serta untuk meningkatkan daya saing Indonesia, Pemerintah Indonesia telah menyelesaikan proses revisi dan meluncurkan daftar investasi negatif yang telah direvisi lebih terbuka dan memberikan kepastian kepada investor. Indonesia juga menawarkan peluang besar untuk investasi terutama di bidang infrastruktur

dan perkembangan industri melalui pelaksanaan *Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3E) 2011-2025*.

Seperti apa peran kebudayaan dalam menunjang MEA?

Seperti Thailand, kebudayaan Indonesia sangat berbeda dari budaya Barat. Bagi Indonesia, tradisi budaya merupakan hal yang sangat penting, meskipun sekarang ini perkembangan zaman sudah semakin modern. Bagaimanapun, identitas negara, tradisi dan budaya telah terbukti sangat tahan terhadap perubahan. Bukan berarti juga budaya Indonesia statis dan tidak berubah.

Indonesia adalah negara terbesar dan terpadat di Asia Tenggara dengan tingkat keragaman yang tinggi. Penduduk Indonesia kurang lebih 250 Juta jiwa yang tersebar di 17.000 pulau. Keragaman etnis dan memiliki banyak bahasa yang berjumlah kurang lebih 600 dialek. Melalui keragaman yang kaya ini, diharapkan orang asing yang menetap, ataupun bekerja di Indonesia akan belajar, memahami, dan menghargai budaya Indonesia yang sangat kaya.

● SUMBER KBRI : BANGKOK

MFA.GO.TH



Duta Besar RI untuk Thailand, Lutfi Rauf dan Menlu Thailand, Surapong Towichakchaikul



Prita Kemal Gani saat diwawancarai salah satu televisi swasta

LSPR.EDU

PRITA KEMAL GANI: INDONESIA SEBAGAI CENTRE OF ASEAN PUBLIC RELATIONS

■ nilah salah satu wanita yang sangat dikagumi, khususnya oleh para praktisi PR. Ia adalah pendiri dan direktur dari sekolah dan perguruan tinggi bidang PR yaitu *London School of Public Relations (LSPR)* Jakarta, dan juga Ketua Umum Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas). Ia, adalah sosok bernama Prita Kemal Gani yang tidak pernah lepas dari prestasi dan penghargaan setiap tahunnya.

Tahun ini saja, Prita memperoleh penghargaan untuk kategori “Tokoh Humas Pilihan Serikat Perusahaan Pers” (SPS), dalam acara “The 3rd Indonesia Public Relations Awards and

Summit (IPRAS) 2014 yang diselenggarakan di hotel The Sahid Rich Yogyakarta. Dahlan Iskan selaku ketua dari SPS yakin bahwa Prita Kemal Gani sangat pantas mendapatkan penghargaan tersebut karena menurut Dahlan, sosok Prita memiliki peran besar dalam pengembangan dunia kehumasan di Indonesia. Betapa tidak. LSPR, universitas yang didirikannya, telah mencetak 15.356 lulusan yang telah berhasil menjadi praktisi *Public Relations* di berbagai tempat di Indonesia maupun luar negeri.

Kesuksesan Prita Kemal Gani dalam membangun LSPR dan mencetak Praktisi PR yang berkualitas itu pun

mampu menarik perhatian beberapa instansi pemerintah. Salah satunya, Kementerian Luar Negeri RI. Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI memberikan kepercayaan kepada LSPR Jakarta untuk menjadi pusat kajian ASEAN dalam perspektif *public relations (LSPR centre of Study on ASEAN Public Relations)*.

Selain sukses mendirikan LSPR, Prita juga sukses dalam memimpin PERHUMAS. Di bawah kepemimpinannya, PERHUMAS Indonesia telah berhasil menghasilkan program-program yang mampu memperkuat peran *Public Relations* di berbagai industri dan mengambil peran pen-

ting dalam program pemerintah untuk menyamakan standard kompetensi Public Relations secara nasional.

Tak berhenti di situ. Kecintaannya yang tinggi dalam dunia kehumasan, memotivasi Prita untuk berpikir global demi kemajuan profesi *public relations* sehingga ia berinisiatif untuk mempersatukan para praktisi public relations di kawasan ASEAN. Tujuan itu pun di dukung para pemimpin organisasi public relations dari negara-negara anggota ASEAN lain, untuk membentuk ASEAN Public Relations Network (APRN). Tujuan APRN adalah menyatukan visi, misi, dan standar profesi public relations di ASEAN. APRN diresmikan pada tanggal 2 Juni 2014 di ASEAN Secretariat, Jakarta. Kini, organisasi ini berhasil menjadi organisasi public relations tertinggi di ASEAN. Organisasi ini memiliki tagline kuat yang mampu memotivasi para praktisi PR di negara anggota ASEAN, yaitu “The Voice of ASEAN Public Relations”.

Berkaitan dengan menjelang dimulainya pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, peran Public Relations sangat diharapkan oleh pemerintah, khususnya dalam kegiatan sosialisasi MEA 2015 kepada masyarakat luas. Menurut Prita, Public relations dapat berperan besar dalam membantu pemerintah untuk mensosialisasikan dan mempersiapkan masyarakat di ma-



Prita Kemal Gani, Pendiri London School of Public Relations, Jakarta

LSPR.EDU

sing-masing negara ASEAN. Soal kekhawatiran masyarakat bahwa MEA akan memberikan dampak negatif bagi dunia ketenagakerjaan di Indonesia misalnya, berupaya diubah oleh APRN. Prita menegaskan, ketakutan bahwa Indonesia akan dibanjiri tenaga kerja asing, sehingga tenaga kerja lokal tergeser, adalah tidak tepat. MEA justru akan memberikan peluang yang besar bagi Indonesia. Prita bersama teman-temannya di APRN yakin bahwa dengan MEA, negara-negara ASEAN akan semakin kuat karena terhubung dan dapat bekerja sama satu dengan yang lainnya.

Ia memberi contoh, saat kekuatan para praktisi public relations dari

10 negara ASEAN bersatu, maka ini akan membawa ASEAN lebih maju, dan tentunya semakin banyak peluang negara-negara ASEAN untuk berkontribusi di kancah dunia.

Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Apakah Indonesia memiliki praktisi-praktisi public relations yang dapat membawa Indonesia menjadi negara ASEAN yang unggul? Prita sangat yakin bahwa Indonesia memiliki potensi besar, dan setiap praktisi *public relations* di Indonesia memiliki potensi yang luar biasa. Begitu luar biasa, sehingga Prita berani menjadikan Indonesia sebagai *Centre of ASEAN Public Relations*. •

SUMBER : DIREKTORAT KFA



Kegiatan belajar mengajar di London School of Public Relations Jakarta

LSPR.EDU



Singapura, surga belanja yang selalu mengundang minat wisatawan mancanegara

BELANJA MURAH DI SINGAPURA? DI SINI TEMPATNYA



China Square Central Flea



Negara ini memiliki daya tarik kuat bagi para turis untuk berkunjung. Tempat wisata yang nyaman, transportasi lengkap, dan pusat perbelanjaan yang tak terhitung jumlahnya adalah sebagian daya tarik Singapura. Dari sekian banyak tempat perbelanjaan yang ada, inilah 6 tempat belanja berharga miring di Singapura.

China Square Central Flea

Terletak di 20 Cross Street dalam China Square antara China Town dan Raffles Places, di tempat ini anda akan menemukan berbagai gerai, outlet dan stan barang murah dari mainan kerajinan tangan, karya seni hingga perabotan tua. Luasnya area dan banyaknya aneka barang membuat pengunjung butuh waktu berjam-jam untuk mengelilingi pasar ini. Setelah lelah berbelanja, anda juga dapat beristirahat sambil menikmati aneka hidangan restoran dan tempat makan yang ada di China

Square. China Square Central Flea ini buka setiap akhir pekan pada pukul 10.00-19.00.

Mustafa Centre

Kawasan Little India yang terletak di Mustafa Centre, Syed Alwi Road, selalu penuh pelanggan. Bila anda ingin mencari barang dengan harga miring Mustafa Centre adalah tempatnya.



Mustafa Centre

Meski tidak semewah mal lainnya, di sini dapat ditemukan berbagai macam barang dengan harga murah,



Mustafa Centre

dari pakaian, cinderamata, kosmetik, parfum, permen coklat, elektronik bahkan makanan hingga kebutuhan pokok. Bagi penggemar fesyen India, tempat ini dapat menjadi pilihan untuk berburu pakaian dan aksesoris. Selain tempat berbelanja, *Mustafa Center* juga menawarkan layanan perjalanan seperti pemesanan hotel dan bantuan visa. Berkunjung ke tempat perbelanjaan ini menjadikannya sebuah pengalaman berbelanja yang tak ada duanya dan tak boleh dilewatkan. Kawasan ini buka 24 jam.

Sungei Road Thieves Market

Sungei Road Thieves Market yang terletak di Sungai Road merupakan salah satu pasar loak terbesar dan paling populer di Singapura baik bagi wisatawan maupun warga lokal. Terdapat lebih dari 400 penjual yang menjajakan berbagai macam produk, dari piringan hitam, jam dinding, patung, sepatu gunung, hingga beragam makanan lezat.



Sungei Road Thieves Market

Sejak berdiri tahun 1930, pasar ini selalu ramai pengunjung, hingga dianggap sebagai tempat belanja yang sesungguhnya di Singapura. Meski memiliki sejarah sebagai tempat untuk membeli barang curian, saat ini semua barang yang dijual adalah sah dan legal.

Jika anda bosan dengan tempat

perbelanjaan megah dengan pendingin udara dan ingin merasakan berbelanja di pasar yang penuh warna dengan harga murah, maka jangan lewatkan pasar loak ini. Pasar ini selalu ramai dan menarik untuk dikunjungi. Pasar buka setiap hari dari pukul 11.00 hingga 19.00.

Bugis Junction

Terletak di 200 Victoria Street, *Bugis Junction* memiliki perpaduan unik yang memikat para *shoppers*. Separuh area merupakan pusat perbelanjaan tradisional dan separuh-



Bugis Junction

nya lagi adalah kawasan belanja terbuka, dilengkapi *café* dan ruko-ruko di tepi jalan. Perpaduan unik inilah yang menjadi salah satu ciri khas *Bugis Junction*.

Bugis Junction terdiri atas empat lantai dan satu basemen. Pusat perbelanjaan yang banyak dikunjungi muda-mudi ini terletak di atas stasiun bus MRT. Di sini anda akan menemukan restoran yang menawarkan berbagai kuliner dari yang murah hingga yang mahal. Kawasan belanja ini juga dilengkapi dengan hotel bintang lima Intercontinental.

Lucky Plaza

Terletak di 304 Orchard Road, *Lucky Plaza* merupakan sebuah mal yang terletak di jantung kota Singapura. Di mal ini terdapat sekitar 500

toko ritel, perusahaan makanan dan minuman serta pusat medis. Beragam produk dapat anda bisa beli seperti pakaian, aksesoris fesyen, produk perawatan kesehatan modern dan perhiasan dengan harga lebih murah.

China Town

Sesuai dengan namanya, *Chinatown* adalah sebuah kawasan Pecinan di antara Pagoda Street, Trengganu Street, Sago Street dan Smith Street. Mayoritas penduduk di daerah ini adalah keturunan Tiongkok, sehingga budaya negeri Tirai bambu sangat terasa kental di daerah ini. *Chinatown* sudah menjadi salah satu tempat wisata di Singapura yang paling disukai wisatawan karena meng-



China Town

hadirkan perpaduan menarik antara wisata kuliner, belanja, budaya, dan juga sejarah.

Apabila anda berbelanja di sini, jangan lupa untuk menawar harga terlebih dahulu. Sedangkan bagi yang ingin berwisata kuliner, perlu diingat bahwa sebagian besar penjual makanan dan minuman di *Chinatown* baru buka sore hari hingga tengah malam. Untuk menuju *Chinatown*, anda cukup menggunakan MRT dan turun di stasiun Chinatown. Selamat berbelanja!

● SUMBER SETDITJEN KERJA SAMA ASEAN



Lucky Plaza

Tertarik berwisata ke Kamboja? Jangan ragu. Kamboja relatif mudah untuk dicapai dari Indonesia dengan berbagai macam pilihan layanan transportasi udara. Cukup mengeluarkan biaya sekitar US\$ 500 Anda sudah bisa melancong ke negara yang kaya akan obyek wisata ini.

Ada banyak tujuan wisata di Kamboja. Tujuan wisata andalan Kamboja adalah Angkor Wat yang merupakan situs warisan dunia UNESCO dan terletak di Provinsi Siem Reap. Jika Anda pergi ke sana, jangan lewatkan untuk melihat matahari terbit di antara candi-candi yang unik. Tak sedikit wisatawan rela bangun subuh untuk melihatnya.

Kompleks Candi Angkor ini dibangun di abad ke-12. Di kompleks ini terdapat beberapa candi yang berbentuk unik dan menarik perhatian yaitu *Angkor Tomb*, *Bayon*, *Ta Prohm*, *Angkor Wat*, dan masih banyak lagi candi di Taman Arkeologi Angkor ini. bangunan candi yang sudah tidak asing lagi di mata kalangan wisatawan mancanegara adalah Angkor Wat. Candi ini sering digunakan sebagai lokasi syuting beberapa film Hollywood seperti "Tomb Raider". Biaya masuk untuk menikmati seluruh candi di dalam Taman Arkeologi ini USD 20 perhari, tetapi Taman Arkeologi Angkor ini tidak cukup untuk dikelilingi dalam sehari karena Taman ini sangat luas dan jarak antara satu candi dengan candi lain lumayan jauh.

Akses transportasi menuju Candi Angkor bisa menggunakan berbagai macam moda transportasi umum, seperti ojek, minibus, atau taksi. Namun, biasanya para pengunjung lebih memilih untuk menggunakan taksi, karena tarif yang diterapkan jauh-dekat biayanya tetap sama dan keamanannya lebih terjamin. Taksi bisa didapatkan dengan mudah dengan hanya datang ke *front Office* hotel dan mereka akan menghubungi taksi untuk menjemput para pengunjung candi Angkor.

Solusi alternatif yang cocok untuk para pengunjung atau backpacker yang ingin menikmati Taman ini adalah tiket *three day pass* seharga USD 40, meskipun harganya lumayan mahal, tetapi tiket ini bisa digunakan tiga kali masuk ke kawasan Taman Angkor.



Kompleks candi, merupakan salah satu daya tarik wisata di Kamboja

OKEYGUESTHOUSE.COM

AYO JELAJAHI KAMBOJA!

Mulai dari candi-candi kuno yang eksotis, pantai yang indah, air terjun menawan, sampai taman nasional yang liar, semua ada di kamboja.

Perjalanan mengelilingi Taman Arkeologi Angkor ini harus diakui cukup melelahkan namun memberikan pengalaman menarik dan menyenangkan. Para pengunjung Taman ini tidak perlu khawatir dalam soal fasilitas umum.

Di sekitar Taman ini terdapat restoran dan penjual makanan tradisional Kamboja yang banyak direkomendasikan oleh berbagai situs perjalanan seperti *Cambodia grand tour* dan "Angkor Mondinal Restaurant" pengunjung restoran juga akan disuguhi penampilan tarian

tradisional Kamboja. Para pengunjung yang kelelahan berjalan jauh selama di Angkor tidak perlu khawatir, Angkor Night Market menyediakan tempat pijat di dalamnya selain itu juga bisa berbelanja suvenir - suvenir khas kamboja.

Kamboja bukan hanya terkenal dengan wisata candinya tetapi juga wisata alamnya seperti pantai dan air terjun. Wisata alam yang indah dan mempesona dapat ditemukan di daerah Sihanoukville, kota wisata di selatan Kamboja. Lokasi Sihanoukville sedikit lebih jauh dibandingkan dengan Komplek Candi Angkor Wat, perjalanan menuju *Sihanoukville* bisa diakses dengan mudah menggunakan penerbangan domestik seperti "*Cambodian Angkor Air*" yang melayani penerbangan langsung dari ibukota Pnom Penh menuju *Sihanoukville*. Kota indah dengan wisata alamnya ini menjadi incaran para *backpacker* atau wisatawan asing yang mencintai suasana alam.

Sihanoukville memiliki beberapa tempat wisata alam yang menjadi andalan salah satunya *Victory Beach*. Akses menuju pantai ini bisa menggunakan ojek. *Victory Beach* mem-



Angkor Watt di Kamboja

berikan pemandangan pantai yang indah dan wisata ini sangat cocok bagi para wisatawan yang menyukai aktivitas pantai dan laut seperti menyelam, berenang, berjemur, dan berpesta di pinggir pantai. Di Pinggir pantai *Victory Beach* berderet tempat kasino, restoran, hotel, dan tersedia pelabuhan kapal pesiar bagi yang ingin berkeliling sepanjang pantai *Victory*. Ada dua kasino yang sangat terkenal disana yaitu *Queenco* dan *Golden Sea Casino*. Sementara untuk menu makanan dan minuman yang disajikan di restoran sepanjang pantai *Victory* dimulai dari harga USD 5 sampai USD 10.

Wisata andalan lainnya di Sihanoukville adalah *Kbal Chhay Waterfalls*. Air terjun ini terletak di daerah *Khan Prey Nup*, sekitar 16 kilometer sebelah utara dari pusat kota *Sihanoukville*. Air terjun ini memiliki air yang sangat jernih dan berasal dari tiga sumber air pegunungan. Air terjun yang memiliki ketinggian sekitar 14 meter ini berada pada titik dimana ketiga sumber keluar bersamaan. Air terjun ini menampilkan pemandangan alam yang sangat indah terutama antara bulan Juli sampai Oktober, yang mana pada bulan tersebut buih putih dari air terjun mengalir kebawah. Tempat wisata ini juga sering dijadikan tempat piknik para wisatawan.

Tempat wisata ketiga yang juga menarik perhatian para wisatawan yaitu *Ream National Park*, lokasinya 18 kilometer dari pusat kota *Sihanoukville* dan berada disebelah bandara *Sihanoukville*. Perjalanan menuju taman ini menyusuri pantai. Di sekitar taman ini terdapat teluk "Matahari dan Bulan." Bukan hanya keindahan teluk tetapi juga pantai

yang memiliki pemandangan alam yang indah. Pantai ini menjadi incaran para wisatawan yang ingin berjemur dan berpetualang dengan perahu. Lokasi pantai tersebut tidak terlalu jauh dari Hutan Taman Ream, yakni hanya sekitar 8 kilometer. selama melakukan perjalanan wisata di Taman ini, turis akan ditemani oleh *ranger station* yang akan mengantarkan para wisatawan dari satu tempat ke tempat lain dengan perahu.

Ream National Park didirikan tahun 1993 oleh Raja Norodom Sihanouk. Taman ini memiliki luas 15.000 Hektar habitat daratan dan 6000 hektar habitat laut. Taman indah ini memiliki 155 spesies burung dan beberapa spesies di dalamnya yang masuk kategori terancam punah. Perjalanan alam yang indah dapat dirasakan wisatawan ketika berkunjung di taman ini, karena dapat menyusuri sepanjang kaki gunung. Wisatawan dapat menemukan hewan mamalia kecil, mendengar suara kicauan burung, dan gemericik air terjun sekitar taman ini.

Para wisatawan yang ingin merasakan keindahan taman nasional dalam beberapa hari bisa menginap di beberapa hotel dan *guesthouse* yang tersedia di sekitar taman ini. Kebanyakan hotel dan *guesthouse* memberikan tarif \$15 hingga \$20 untuk perjalanan sehari penuh ke Taman Ream. Biaya tersebut sudah termasuk penjemputan dari hotel, transportasi selama di taman nasional ini, berlayar dengan perahu untuk menikmati keindahan alam pantai, makan siang, perjalanan lainnya, dan transportasi pulang. Biasanya penjemputan dari hotel antara jam 07.00 atau 08.00 pagi dan kembali ke hotel pukul 04.00 sore.

Tarif menyewa perahu di pantai sekitar *Ream National Park* sekitar \$ 65 untuk 5 orang dan tambahan \$ 9 untuk penumpang yang lebih dari 5 orang.

Kuliner Kamboja, karena faktor budaya, hanya memiliki sedikit perbedaan dengan kuliner Indonesia. Masakan yang disajikan dengan bumbu – bumbu khas Kamboja dipastikan akan menggugah selera wisatawan untuk ingin selalu berkunjung ke negara itu. Salah satu masakan terkenal dari masakan Kamboja adalah Amok, berupa ikan



CAMBODIATOURS Kbal Chhay Waterfalls

kukus dengan campuran bumbu bernama *Kroeuung* yang dibuat dengan bawang putih, jahe, sereh, kunyit, sedikit cabai, dan santan, kemudian dibungkus dengan daun pisang. Penampilan Makanan lezat ini di Indonesia mirip dengan ikan pepes kukus. Amok juga bisa dibuat dengan tahu untuk para vegetarian. Seperti kebanyakan negara di Asia, masyarakat Khmer juga terbiasa memakan hidangan utama mereka dengan nasi atau sering disebut bai.

Ang traymeuk adalah salah satu makanan khas kamboja lainnya. Cumi-cumi utuh yang dipanggang ini sering ditemui para wisatawan di kota-kota pesisir seperti Sihanoukville dan Kep. Para penjual makanan ini biasanya membawa pemanggang yang dipikul di pundak. Cara pembuatannya juga sangat sederhana. Cumi-cumi ini diolesi dengan perasan jeruk nipis atau saus ikan kemudian dipanggang di arang, untuk menambah cita rasa di lidah bisa ditambah saus kemerahan khas Kamboja dalam mangkuk kecil.

Jadi, tunggu apa lagi? Ayo jelajahi Kamboja. ● DISADUR DARI BERBAGAI SUMBER



Victory Beach, salah satu pantai indah di Kamboja

MASYARAKAT EKONOMI ASEAN UNTUK SEMUA MEWUJUDKAN INTEGRASI KAWASAN YANG INKLUSIF DAN MERATA

DUAJURAL.COM



Pelaku UKM juga perlu dipersiapkan guna menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN

Salah satu kritik yang kerap mengemuka mengenai ASEAN adalah kurang membuminya organisasi tersebut. Pemerintah sudah berupaya keras untuk terus mensosialisasikan rencana pembentukan Masyarakat ASEAN dengan berbagai cara. Meski demikian, stereotip sebagai sebuah organisasi yang elitis masih terus melekat kepada ASEAN.

Sekeras apa pun usaha pemerintah, kepedulian masyarakat terhadap ASEAN akan tetap rendah selama mereka tidak merasakan dampak positif dari keberadaan ASEAN sendiri. Bagi mereka yang masih harus berjibaku untuk mencari sesuap nasi,

kelahiran Masyarakat ASEAN hanya akan dianggap angin lalu. Jika ASEAN mampu berperan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat negara anggotanya secara adil dan merata, tanpa pengeras suara yang lantang mempromosikan ASEAN pun, mereka akan memiliki kebanggaan menjadi bagian dari Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara ini.

Secara kasat mata memang pertumbuhan ekonomi ASEAN terbilang mencengangkan. Di tahun 2013 saat PDB dunia hanya tumbuh 2,5%, ASEAN tumbuh 5,7%. Sayangnya pertumbuhan ini masih jauh dari kata seimbang. Ketimpangan antara negara anggota ASEAN masih

memprihatinkan, PDB per kapita Singapura misalnya, 35 kali lipat lebih besar dari Myanmar. Belum lagi kesenjangan di dalam Negara anggota ASEAN pun masih begitu lebar, Sebagai contoh 40 orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan setara dengan 10% PDB kita.

Masyarakat ASEAN akan mendorong integrasi kawasan yang lebih intensif, namun jika tren yang ada terus berlanjut, hanya sebagian kecil yang akan meraup manfaatnya. Sementara sebagian lainnya akan terus tertinggal dan terpinggirkan. Kita tentunya tidak dapat membiarkan hal itu terjadi, Masyarakat ASEAN tidak hanya diciptakan untuk

segelintir orang tapi dibentuk demi manfaat bersama seluruh keluarga besar ASEAN.

ASEAN sudah menyadari betul bahwa ketimpangan merupakan salah satu tantangan terberat bagi pembentukan Masyarakat ASEAN. Karena itu, ASEAN sudah melakoni berbagai inisiatif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Seperti, *ASEAN Framework for Equitable Economic Development*. Walau demikian, ASEAN harus terus berupaya lebih giat demi mewujudkan pembangunan yang inklusif.

Terdapat begitu banyak langkah yang dapat ditempuh guna mencapai tujuan tersebut. Akan tetapi, untuk memastikan bahwa pembangunan di ASEAN menyentuh semua lapisan masyarakat, maka ASEAN perlu fokus untuk merangkul mereka yang selama ini cenderung termarginalkan seperti kelompok Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

UKM merupakan tulang punggung dari perekonomian ASEAN. Sekitar 96% dari unit usaha di ASEAN merupakan UKM yang menyediakan lapangan kerja hingga 97%. Akan tetapi, arti penting ini belum tercermin dalam output ekonomi ASEAN. UKM hanya menyumbang 30-60% PDB di ASEAN dan 19-31% dari ekspor



Sekitar 96 persen unit usaha di ASEAN merupakan UKM

PUPUKM.BLOGSPOT.COM

total ASEAN Di Indonesia sendiri, meskipun 97,2% lapangan kerja disediakan oleh UKM, kontribusi mereka pada PDB hanyalah 58%, persentase ekspor mereka pun hanya berkisar 16% dari total ekspor.

ASEAN sebetulnya sudah memiliki *ASEAN Strategic Plan of Action for SME Development* dari tahun 2010-2015. Indonesia sendiri dinilai memiliki kebijakan yang cukup pro-UKM. Berdasarkan penelitian dari

ERIA mengenai *SME policy index*, kebijakan pengembangan UKM kita dinilai setara dengan Thailand dan hanya kalah dari Singapura serta Malaysia. Akan tetapi masih rendahnya sumbangsiah UKM terhadap PDB dan ekspor menunjukkan bahwa kita tidak dapat berpuas diri.

Terdapat beberapa kendala yang masih menghambat pengembangan UKM. Pertama, yakni terkait pendanaan. Meski pemerintah sudah berupaya untuk memfasilitasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan namun faktanya persentase pembiayaan kredit untuk UKM hanya mencapai 19% dan hampir setengah dari pelaku UKM di Indonesia tidak mendapat akses pembiayaan modal. Untuk itu pemerintah perlu untuk terus memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada UKM agar mampu mengakses kredit yang pemerintah fasilitasi seperti KUR. Selain itu, Pemerintah perlu mendorong UKM untuk meningkatkan mutu produk dan melakukan sertifikasi produk.

Di tingkat regional, ASEAN perlu meningkatkan status *SME Advisory Council* menjadi *ASEAN SME Ministerial Meeting on SMEs Development*, agar upaya pengembangan UKM di kawasan menjadi lebih diprioritaskan dan terkoordinasi. ASEAN pun perlu memberikan bantuan teknis dan peningkatan kapasitas kepada negara-negara anggota yang masih belum optimal memberdayakan UKM. • SUMBER DIREKTORAT KSEA

BERITADAERAH.CO.ID



ASEAN perlu fokus untuk merangkul UKM yang selama ini termarginalkan



Suasana rapat tingkat menteri ASEAN

PELUANG DAN TANTANGAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015 TAK KENAL MAKA TAK SAYANG

Sejak didirikan di Bangkok pada tahun 1967, ASEAN telah mengalami perubahan dan perkembangan pesat menuju tahapan baru yang lebih integratif dan berwawasan ke depan dengan akan dibentuknya Masyarakat ASEAN pada tahun 2015. Komitmen para pemimpin ASEAN yang ditandatangani dalam “ASEAN Vision 2020” di Kuala Lumpur pada tahun 1997, merupakan komitmen nyata cita-cita ASEAN sebagai suatu Masyarakat yang berpandangan maju dalam suasana lingkungan kehidupan yang damai, stabil, makmur dan sejahtera berlandaskan hubungan kemitraan yang sejajar.

KTT ke-9 ASEAN di Bali pada tahun 2003, mempertegas keinginan untuk mewujudkan Masyarakat ASEAN dengan ditandatanganinya Bali Concord II yang bertekad agar ASEAN menjadi sebuah Masyarakat yang aman, damai, stabil, dan sejahtera pada tahun 2020. Kuatnya

keinginan dipertegas dalam KTT ke-12 ASEAN di Cebu, Filipina, pada Januari 2007 bahwa perwujudan Masyarakat ASEAN dipercepat menjadi tahun 2015 dengan ditandatanganinya “Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015”.

Pembentukan Masyarakat ASEAN bertujuan untuk semakin mempercepat integrasi ASEAN dalam menghadapi perkembangan global. ASEAN wajib mengikuti perkembangan yang terjadi, menyelaraskan cara pandangnya dengan baik untuk dapat menghadapi permasalahan-permasalahan internal dan eksternal yang merupakan dampak globalisasi. Masyarakat ASEAN dengan tiga pilarnya yaitu Masyarakat Politik Keamanan ASEAN (ASEAN Security Community/ASC), Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community/AEC), dan Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN (ASEAN Socio-Cultural Community/ASCC), menjadi pondasi dalam pelaksanaan kerjasama ASE-

AN ke arah sebuah Masyarakat yang satu sama lain saling mendukung dan pengertian.

Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 (MEA), Peluang dan Tantangan

Sebuah model integrasi ekonomi kawasan dengan biaya transaksi perdagangan yang murah, dan fasilitas yang memadai menjadi prioritas negara-negara anggota ASEAN. Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dengan basis produksi stabil, berdaya saing tinggi, berorientasi kemakmuran dan secara ekonomi terintegrasi. Regulasi perdagangan dan investasi yang efektif, memberi peluang pada arus bebas lalu lintas barang, jasa, investasi, modal serta kemudahan fasilitas gerak pelaku usaha dan tenaga kerja yang menjadi fokus para negara anggota. Dalam konteks ini, terdapat 12 sektor prioritas yang menjadi fokus yaitu tujuh sektor barang terdiri dari industri pertanian, peralatan elek-

tonik, otomotif, perikanan, industri berbasis karet, industri berbasis kayu, dan tekstil, dan lima sektor jasa transportasi udara, pelayanan kesehatan, pariwisata, logistik, dan industri teknologi informasi atau lebih dikenal dengan e-ASEAN.

Melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN akan dicapai pasar tunggal dan basis produksi regional, kawasan berdaya saing tinggi, pembangunan ekonomi regional yang merata, dan integrasi dengan perekonomian dunia. Untuk dapat memainkan peranan penting dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN, diperlukan persiapan yang matang dengan memperhatikan peluang yang dimiliki dan tantangan yang dihadapi serta langkah strategi yang harus disiapkan.

Peluang Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015

Pembentukan MEA akan memberikan peluang bagi negara-negara anggota ASEAN untuk memperluas cakupan skala ekonomi, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi, meningkatkan daya tarik sebagai tujuan bagi investor dan wisatawan, mengurangi biaya transaksi perdagangan, serta memperbaiki fasilitas perdagangan dan bisnis. Di samping itu, pembentukan MEA juga akan memberikan kemudahan dan peningkatan akses pasar intra ASEAN serta meningkatkan transparansi dan mempercepat penyesuaian peraturan-peraturan dan standarisasi domestik. Potensi-potensi Indonesia untuk merebut pasar yang ada dapat berupa beberapa hal.

Pertama, Indonesia yang memiliki luas wilayah dan jumlah penduduk yang terbesar di kawasan (40% dari total penduduk ASEAN) menjadikan Indonesia sebagai negara dengan ekonomi yang produktif, dinamis dan karenanya kedepan dapat memimpin pasar ASEAN melalui pemanfaatan kesempatan penguasaan pasar dan investasi.

Kedua, Indonesia merupakan negara tujuan investor ASEAN dimana proporsi investasi negara ASEAN di Indonesia mencapai 43% dari proporsi investasi negara-negara ASEAN di ASEAN yang hanya sebesar 15%.

Sedangkan yang ketiga, Indonesia

berpeluang menjadi negara pengeksport, dimana nilai ekspor Indonesia ke intra-ASEAN hanya 18-19% sedangkan ke luar ASEAN berkisar 80-82% dari total eksportnya. Terbuka lebar peluang untuk meningkatkan ekspor ke intra-ASEAN agar berimbang dengan laju peningkatan impor dari intra-ASEAN.

Lalu keempat, liberalisasi perdagangan barang ASEAN dapat menjamin kelancaran arus barang untuk pasokan bahan baku maupun bahan jadi di kawasan ASEAN karena hambatan tarif dan non-tarif sudah tidak ada lagi. Kondisi pasar demi-

peroleh keunggulan tersendiri, yang disebut dengan bonus demografi. Perbandingan jumlah penduduk produktif Indonesia dengan negara-negara ASEAN lain adalah 38:100, yang artinya bahwa setiap 100 penduduk ASEAN, 38 adalah warga negara Indonesia. Bonus ini diperkirakan masih bisa dinikmati setidaknya sampai dengan 2035, yang diharapkan dengan jumlah penduduk yang produktif akan mampu menopang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan perkapita penduduk Indonesia.



akan mendorong pihak produsen dan pelaku usaha lainnya untuk memproduksi dan mendistribusikan barang yang berkualitas secara efisien sehingga mampu bersaing dengan produk-produk dari negara lain. Indonesia sebagai salah satu negara besar yang memiliki tingkat integrasi tinggi di berbagai sektor seperti elektronik dan keunggulan komparatif pada sektor berbasis sumber daya alam, berpeluang besar untuk mengembangkan industri di sektor-sektor tersebut di dalam negeri.

Kelima, Indonesia dengan jumlah populasi yang besar dapat mem-

Tantangan Masyarakat Ekonomi 2015

Tantangan utama bagi Indonesia dalam Masyarakat ekonomi ASEAN adalah daya saing, khususnya di bidang infrastruktur, biaya logistik, SDM, UKM (Usaha Kecil, dan Menengah), dan pertanian.

Infrastruktur: Menurut *the Global Competitiveness Report 2013/2014* dari *World Economic Forum (WEF)*, daya saing Indonesia berada pada peringkat ke-38 dunia. Sementara itu kualitas infrastruktur Indonesia pada posisi ke-82 dari 148 negara, dan di peringkat ke-5 diantara negara anggota ASEAN. Gambaran peringkat ini menunjukkan bahwa infrastruktur

tur Indonesia masih tertinggal dan harus mengejar ketertinggalannya.

Menurut tabel GCI 2013-2014, posisi infrastruktur negara ASEAN secara berturut-turut: Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Indonesia, Filipina, Vietnam, Kamboja, Lao PDR, dan Myanmar. Sementara itu, dari berbagai kajian yang dilakukan oleh beberapa pihak, dalam rangka menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN, Indonesia harus menyiapkan infrastruktur darat berupa jejaring jalan ASEAN dan jalur rel kereta yang terhubung dengan jalur Kunming-Singapura; laut, berupa jejaring perhubungan laut; udara, berupa jalur pengiriman udara; teknologi informasi, berupa jaringan komunikasi; dan energi, berupa keamanan energi. Beberapa laporan juga menyatakan sementara ini infrastruktur yang telah dibangun antara lain penataan pelabuhan Tanjung Priok; pembangunan bandara internasional Lombok Praya dengan rute internasional Malaysia, Singapura, Australia, dan Hongkong (menyusul); Sabuk Selatan Nusantara yang menghubungkan 16 pulau dari Sabang sampai Merauke (5.330 km jalan dan 1.600 km jalur laut) dan Sabuk Tengah Nusantara sepanjang 3.800 km yang menghubungkan 12 provinsi dari Sumatra Selatan hingga Papua Barat.

Sementara itu infrastruktur yang belum dibangun atau masih dalam tahap penyelesaian, yakni: Indonesia mengajukan perpanjangan jalur

kereta Kunming-Singapura hingga ke Surabaya; dan Sabuk Utara Nusantara diproyeksikan rampung pada 2015.

Pembangunan infrastruktur yang rendah di Indonesia, dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat, yakni: rendahnya anggaran infrastruktur yang hanya 2,5% dari PDB, dan tidak dapat mengakomodir biaya pembebasan lahan dan *feasibility study* serta AMDAL; masih tingginya konflik kepentingan, seperti politik, bisnis, atau pesanan pihak-pihak tertentu dalam pembangunan infrastruktur; serta masih kurang mulusnya koordinasi terkait lintas optortitas.

Biaya Logistik. Dampak dari rendahnya infrastruktur berpengaruh pada semakin mahal biaya logistik di Indonesia. Perdagangan menjadi kurang efisien mengingat biaya logistik yang mahal dibandingkan negara anggota ASEAN lainnya, yang dibebankan sebesar 14,08%, jika dibandingkan dengan biaya logistik yang wajar sebesar 7%. Berdasarkan Logistic Performance Index (LPI, 2012), Indonesia menempati peringkat ke-59 dari 155 negara, di bawah peringkat Thailand, Filipina, dan Vietnam.

Banyak pihak yang mengusulkan dilakukannya pengurangan biaya logistik yang berdampak pada penurunan permasalahan di bidang perdagangan yang dapat menaikkan daya saing Indonesia.

Sumber Daya Manusia. Bonus demo-

grafi yang dimiliki Indonesia, tidak akan memberikan keuntungan apapun tanpa adanya perbaikan kualitas SDM. Data dari ASEAN *Productivity Organization* (APO) menunjukkan dari 1000 tenaga kerja Indonesia hanya ada sekitar 4,3% yang terampil, sedangkan Filipina 8,3%, Malaysia 32,6%, dan Singapura 34,7%. Berdasarkan struktur pasar, tenaga kerja didominasi oleh pekerja lulusan SD (80%) sementara lulusan Perguruan Tinggi hanya 7%, dimana saat ini sebagian dunia kerja mensyaratkan lulusan Perguruan Tinggi. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan Malaysia yang sebagian besar penduduknya lulusan S1. Kesempatan memperoleh pendidikan secara merata di seluruh Indonesia sulit dilakukan sehingga kesadaran untuk menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sangat rendah. Kondisi ini mengakibatkan tenaga kerja Indonesia hanya dilirik sebagai buruh atau tenaga kerja kasar di pasar tenaga kerja internasional.

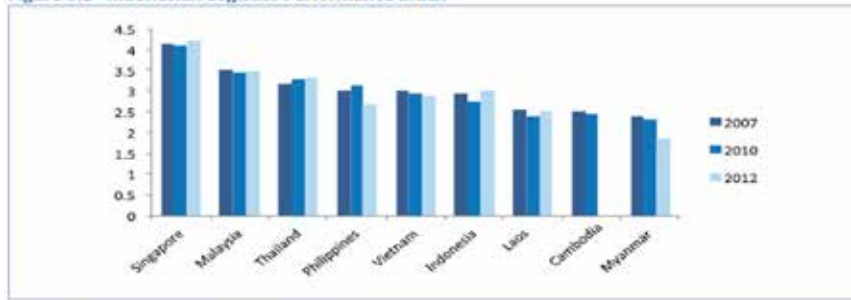
UKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Dari delapan aturan kunci (*golden rules*) peringkat kompetitif dunia yang dikeluarkan oleh International Institute for Management Development (IMD), salah satunya adalah dukungan terhadap UKM. Pada masa krisis moneter, UKM mampu bertahan dan terus berkembang, hal tersebut dapat memberikan peluang peningkatan daya saing. Namun demikian, UKM masih berada pada area kurang diperhatikan oleh pemerintah. Ketiadaan pendampingan dari pemerintah untuk menstandarkan produk lokal dan menginternasionalkan UKM, membuat UKM sulit bersaing dan kalah pada pasar lokal. Kerap kali terjadi ungkapan bagi UKM “Unggul di Produk, Kalah di Promosi”. Keanekaragaman yang dimiliki UKM Indonesia berpeluang untuk membentuk pasar ASEAN, salah satu contohnya adalah kerajinan tangan, furniture, makanan daerah, garmen dan industri lainnya.

Pertanian. Salah satu jantung perekonomian Indonesia adalah pertanian. Peningkatan keunggulan komparatif di sektor prioritas integrasi, antara lain adalah pembangunan pertanian perlu terus dilakukan, mengingat bahwa luas daratan yang dimiliki Indonesia lebih besar dan

MOIT.GOV.NI



Figure 3.1 Indonesian Logistics Performance Index



Source: Logistics Performance Index, World Bank.

tingkat konsumsi yang tinggi terhadap hasil pertanian. Tindakan pemerintah untuk menopang komitmen Indonesia dalam mewujudkan MEA 2015 melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, dipandang hanya akan memberikan keuntungan bagi pihak-pihak tertentu, bukan petani Indonesia. Perpres tersebut mengatur mengenai: investasi asing diperbolehkan hingga 49% untuk usaha budi daya tanaman pangan seluas lebih dari 25 hektar; investasi asing diperbolehkan hingga 95% untuk usaha perkebunan dalam hal perbenihan bagi usaha seluas lebih dari 25 hektar; dan investasi asing diperbolehkan hingga 30% untuk usaha perbenihan dan budidaya hortikultura.

Melihat bahwa sektor pertanian masih tertinggal dan dibebani volume impor komoditas pangan dan hortikultura; kegagalan panen akibat kemarau dan gangguan hama; serta petani Indonesia rata-rata berusia 55-60 tahun dan tidak memiliki pengetahuan dan pendidikan yang memadai akan menyulitkan memasuki pasar bebas ASEAN. Indonesia

dengan populasi luas kawasan dan ekonomi terbesar di ASEAN, dapat menggerakkan pemerintah untuk lebih tanggap terhadap kepentingan nasional, khususnya pertanian. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah: menghitung kesiapan dan daya dukung nasional dalam menghadapi pasar bebas ASEAN; mendorong kapasitas produksi, kualitas pengetahuan dan permodalan agar Indonesia tidak bergantung pada impor; menyiapkan perlindungan bagi petani dengan penetapan tarif maksimal untuk produk impor; dan menyediakan subsidi dan pengadaan kredit lunak bagi petani guna meningkatkan kemampuan mereka memasok kebutuhan pertanian seperti benih dan pupuk.

Saran Langkah Strategis dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015

Indonesia akan sukses berperan dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN jika dapat meningkatkan daya saing dan mengejar ketertinggalan dari negara anggota ASEAN lainnya. Untuk itu, diperlukan beberapa langkah strategis.

Langkah pertama, penyesuaian, persiapan dan perbaikan regulasi

baik secara kolektif maupun individual (reformasi regulasi). Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia baik dalam birokrasi, dunia usaha dan profesional

Ketiga, penguatan posisi usaha skala kecil dan menengah dan penguatan kemitraan antara sektor publik dan swasta. Keempat, menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mengurangi ekonomi biaya tinggi, yang juga merupakan tujuan utama pemerintah dalam program reformasi komprehensif di berbagai bidang seperti perpajakan, kepebeanaan, dan birokrasi.

Sementara yang kelima, pengembangan sektor-sektor prioritas yang berdampak luas dan komoditi unggulan. Keenam, peningkatan partisipasi institusi pemerintah maupun swasta. Yang ketujuh, reformasi kelembagaan dan pemerintahan.

Kedelapan, penyediaan kelembagaan dan permodalan yang mudah diakses oleh pelaku usaha dari berbagai skala. Kemudian kesembilan, perbaikan infrastruktur fisik melalui pembangunan atau perbaikan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, jalan tol, pelabuhan, revitalisasi, dan restrukturisasi industri.

Kegiatan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang telah dilakukan antara lain: membuka pusat promosi ASEAN di bidang perdagangan, investasi dan pariwisata, lalu menyediakan cadangan pangan ASEAN terutama beras; membentuk kerjasama di bidang Koperasi ASEAN, Membentuk komite negara-negara penghasil minyak bumi ASEAN, membentuk kerjasama pengelolaan barang sejenis seperti karet alam dan kopra, serta mendirikan AFTA (ASEAN Free Trade Area).

Penutup

Masyarakat Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah bentuk integrasi ekonomi regional yang direncanakan untuk dicapai pada tahun 2015. Tujuan utamanya adalah menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi dimana terjadi arus barang, jasa, investasi dan tenaga terampil yang bebas serta aliran modal yang lebih bebas. Keterlibatan semua pihak di seluruh negara anggota ASEAN mutlak diperlukan agar dapat mewujudkan ASEAN sebagai kawasan yang kompetitif bagi kegiatan investasi dan perdagangan bebas yang pada gilirannya dapat memberikan manfaat bagi seluruh negara ASEAN. Bagi Indonesia, dengan jumlah populasi, luas dan letak geografi serta nilai PDB terbesar di ASEAN harus menjadi aset agar Indonesia bisa menjadi pemain besar dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 nanti. Strategi dan persiapan yang selama ini telah dilakukan oleh para stakeholder yang ada di Indonesia dalam rangka menghadapi sistem liberalisasi yang diterapkan oleh ASEAN, terutama dalam kerangka integrasi ekonomi memang dirasakan masih kurang optimal. Namun hal tersebut memang dilandaskan isu-isu dalam negeri yang membutuhkan penanganan yang lebih intensif. Di samping itu, seiring perkembangan waktu, Indonesia dengan potensi sumber daya yang melimpah diharapkan dapat membawa pergerakan kemajuan ekonomi ke arah yang lebih maju lagi dan lagi. **(DDT, sumber diambil dan diolah dari beberapa makalah dan media masa)**

MASYARAKAT EKONOMI ASEAN INTERAKTIF DI RADIO PINGVIN BALI

Mengawali rangkaian kegiatan Sosialisasi di Bali, Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN (Dit KSEA) berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dan *Penguin Radio* (103,6 FM) telah mengadakan Dialog Interaktif bertema "Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015" pada pukul 16.00–17.00 WITA, tanggal 9 September 2014.

Dialog diisi oleh dua narasumber, yaitu Direktur KSEA dan Kepala Bidang Industri Agro, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemprov Bali. Pemilihan *Penguin Radio* bukan tanpa alasan. Radio itu memiliki pendengar setia dari kalangan muda di Bali, sehingga dipandang tepat sebagai kanal pemasyarakatan MEA 2015 untuk meningkatkan pemahaman generasi muda di Bali, mengenai integrasi ekonomi ASEAN.

Dengan gaya bahasa yang akrab dengan kaum muda, dalam kesempatan ini Direktur KSEA menyampaikan bahwa MEA 2015 sebenarnya sejalan dengan kepentingan dan kebutuhan Indonesia. Pendapat itu diperkuat dengan fakta sejarah bahwa sejak awal kemerdekaan Indonesia telah memandang penting arti stabilitas di kawasan bagi stabilitas nasional.

Selain itu, Direktur KSEA juga menjelaskan bahwa dalam satu hingga empat dasawarsa ke depan, Indonesia diprediksi memiliki postur ekonomi jauh lebih besar dari saat ini. Terkait hal itu, Indonesia sepatutnya melihat MEA 2015 sebagai peluang untuk merealisasikan prediksi-prediksi itu, terlebih dalam konteks *training ground* bagi produk-produk nasional sebelum merambah dan bersaing di pasar internasional. Sebab, Indonesia sejatinya tidak hanya melakukan perdagangan dengan negara anggota ASEAN, melainkan juga dengan negara maju di dunia.

Menambah informasi mengenai MEA 2015 secara lebih komprehensif, Direktur KSEA memberikan

penjelasan mengenai integrasi ekonomi yang sesungguhnya telah sejak dekade 70-an secara gradual, atau telah berlangsung hampir empat dasawarsa. Proses integrasi tersebut dimulai dari pengesahan *Preferential Tariff Arrangement/PTA* (1977), kemudian *Common Effective Preferential Tariff ASEAN FTA/CEPT-AFTA* (1992), hingga *ASEAN Trade in Goods Agreement/ATIGA* (2009) dan *ASEAN Comprehensive Investment Agreement/ACIA* (2009). Sementara itu tahun 2003 dipandang sebagai titik kulminasi pernyataan politik para Pemimpin ASEAN guna menegaskan komitmen dalam mengintegrasikan ASEAN secara komprehensif dalam 3 pilar, termasuk MEA.

Lebih lanjut, Direktur KSEA juga menerangkan manfaat MEA 2015 bagi pelajar Indonesia menjelang terbentuknya Masyarakat ASEAN 2015, Negara anggota ASEAN telah mempersiapkan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di kawasan.

Disadari terdapat pemahaman yang berbeda-beda dan tidak merata mengenai ASEAN, baik di kawasan maupun di Indonesia. Untuk menjawab tantangan tersebut telah dirumuskan sebuah *ASEAN Curriculum Sourcebook* yang menjadi standar pengajaran mengenai ASEAN untuk SD, SMP dan SMA.

ASEAN Curriculum Sourcebook dipandang dapat menjadi referensi dalam melengkapi kurikulum nasional mengenai ASEAN, sehingga generasi muda Indonesia dapat memiliki standar pengetahuan yang sama dan proporsional mengenai ASEAN, serta dapat memperkuat rasa kepemilikan generasi muda Indonesia atas ASEAN. Pendaftaran praktis di bidang pendidikan telah dirintis melalui *ASEAN Credit Transfer System*, dengan man-



Radio Penguin Bali, salah satu tempat Dirjen Kerjasama ASEAN melakukan sosialisasi tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN

faat dan kemudahan transfer kredit/nilai mahasiswa antar universitas yang telah menjadi anggota jaringan tersebut.

Masih berbicara mengenai pendidikan, Direktur KSEA juga menyampaikan tentang pembentukan *ASEAN University Network* guna mengakomodir mahasiswa yang berencana untuk menempuh pendidikan lanjutan atau bahkan pindah tempat menuntut ilmu ke negara ASEAN lainnya dapat dengan mudah melakukan konversi nilai tanpa perlu mengulang dari awal. *ASEAN University Network* merupakan tautan (*link*) antar-universitas di ASEAN yang ditujukan sebagai sarana saling tukar informasi, pengalaman serta kemampuan dalam mempromosikan dan membangun kerja sama di kawasan. *ASEAN Quality Reference Network*, merupakan program yang tengah dirintis ASEAN untuk sinkronisasi kurikulum pendidikan yang diharapkan dapat bermanfaat penuh dalam menjamin mobilisasi para pelajar di kawasan. Melalui hal tersebut, diharapkan lalu lintas pencari ilmu akan dapat digiatkan, tidak lagi dibatasi oleh batas-batas Negara sesama anggota Masyarakat ASEAN.

Sementara, Kabid Industri Agro Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bali bahwa Bali harus mempersiapkan diri menghadapi persaingan MEA 2015. Potensi besar di sektor pertanian, pariwisata dan UKM harus dikelola dan dikembangkan secara tepat dan proporsional agar dapat memberikan manfaat nyata bagi perekonomian Bali. •

ASEAN CORNER



Aktivitas ASEAN Corner dalam penyelenggaraan Car Free Day di Jakarta

HASIL KARYA ANAK INDONESIA UNTUK ASEAN



KARYA VIOLINE



KARYA TRIANA



KARYA ALIFIAH ZAHRATUL

MENGHADAPI TANTANGAN DAN MENANGKAP PELUANG

Berempat di Pulau Dewata, tepatnya Balai Budaya Kertha Langu, Denpasar, Direktorat KSEA pada tanggal 10 September 2014 lalu kembali menjalankan fungsi diseminasi informasi mengenai MEA 2015 kepada publik setempat. Kegiatan bertema "Menyongsong MEA 2015: Menghadapi Tantangan dan Menangkap Peluang" itu, terselenggara berkat kolaborasi dengan Disperindag Pemrov Bali.

Kegiatan dibuka oleh sambutan Wakil Gubernur Bali, mewakili Gubernur Bali. Selain Direktur KSEA, hadir pula wakil dari Disperindag Bali, BI dan penggiat UKM sebagai narasumber. Tak kurang dari 130 peserta dari berbagai kalangan pejabat pemerintah daerah, kalangan pelaku usaha kecil dan menengah, dan civitas akademika memadati kegiatan tersebut.

Wagub Bali, dalam sambutannya, menegaskan bahwa sosialisasi MEA ini sangat penting mengingat masyarakat Bali sangat membutuhkan informasi dan bimbingan guna menghadapi MEA 2015. Menurutnya, Bali sangat berpotensi dan siap menyambut MEA, mengingat begitu banyak inovasi yang terus dilakukan oleh masyarakat Bali. Kehadiran MEA dapat menjadi motivasi yang kuat dan masyarakat Bali diharapkan dapat menangkap peluang dan mengatasi tantangan yang akan terjadi pada tahun 2015. Terkait UKM, Wagub Bali menyatakan bahwa masyarakat Bali membutuhkan pengarahan untuk dapat mencapai pasar internasional yang lebih luas.

Berbicara mengenai integrasi ekonomi ASEAN secara luas, Direktur KSEA menjelaskan bahwa MEA 2015 sejalan dengan kepen-



Wakil Gubernur Bali Sudikerta, pembicara pada sosialisasi Masyarakat Ekonomi ASEAN di Bali

tingan dan kebutuhan Indonesia. Tantangan menuju MEA 2015 tidak mudah namun dengan potensi yang dimiliki Indonesia, diharapkan peluang dalam integrasi ekonomi ASEAN dapat dimanfaatkan dan mendorong seluruh elemen bangsa guna meningkatkan daya saing nasional. Terlepas dari tantangan infrastruktur, pola pikir (*mind-set*) merupakan salah satu tantangan terbesar bagi masyarakat Indonesia. Terkait hal tersebut, masyarakat Indonesia, khususnya kalangan pengusaha dan UKM, harus memiliki pola pikir *outward looking* untuk memanfaatkan peluang MEA 2015, terutama untuk mengekspor produk nasional ke negara-negara ASEAN lainnya.

Sementara itu, Kepala Disperindag Bali menjelaskan bahwa pada periode 2009-2013 terdapat peningkatan di sektor UKM Bali. Hal ini dapat dijadikan ilustrasi atau patokan bagi masyarakat Bali guna mempersiapkan diri secara lebih baik dalam memasuki pasar ASEAN. Selain itu, untuk mendukung daya saing, Bali telah memfasilitasi para pengusaha dengan pelayanan surat keterangan asal (SKA) se-

cara *online*, dan sistem yang telah terintegrasi dalam *National Single Window*, fasilitasi penerapan HAKI, sertifikasi mutu barang, dan lain-lain.

Wakil BI untuk Bali, yang berbicara dari aspek perbankan, menggarisbawahi peluang bagi untuk melakukan ekspansi produk nasional ke negara ASEAN. Ditekankan pentingnya Indonesia dapat berperan dalam global supply chain dan hal tersebut membutuhkan profesionalisme baik terkait SDM, IT pendukung, maupun infrastruktur. Terkait hal tersebut BI mengupayakan adanya kontribusi nyata dari UKM dalam menyongsong MEA 2015.

Diseminasi informasi mengenai MEA 2015 sangat diperlukan, tidak hanya bagi kalangan akademisi, pengusaha dan UKM serta masyarakat umum, melainkan juga kepada para pejabat di daerah. Sehubungan dengan hal itu, dipandang penting agar instansi pemerintah pusat dapat memberikan pemahaman kepada para pejabat daerah di Bali tentang perkembangan kerja sama di ASEAN. •

SUMBER: DIREKTORAT KSEA



Direktur Kerja Sama Ekonomi ASEAN, ketiga dari kanan, di sela-sela kegiatan sosialisasi Masyarakat Ekonomi ASEAN di Bali

KULIAH UMUM MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015 DI UNIVERSITAS DWIJENDRA, BALI

Direktorat Kerja sama Ekonomi ASEAN (KSEA) menggandeng Fasilkom Universitas Dwijendra untuk mengadakan Kuliah Umum mengenai MEA 2015 di kampus tersebut. Kuliah Umum yang diawali oleh sambutan Pembantu Rektor (Purek) III itu dipenuhi oleh lebih dari 180 mahasiswa dan pelajar dari seluruh fakultas di Universitas Dwijendra dan SMA di bawah naungan Yayasan Dwijendra.

Kuliah Umum diisi dengan paparan mengenai integrasi ekonomi ASEAN oleh Direktur KSEA yang juga disiarkan secara langsung oleh Radio Komunitas Dwijendra (107,7 FM). Dalam sambutannya, Purek III Universitas Dwijendra menjelaskan bahwa diseminasi informasi mengenai MEA 2015 kepada mahasiswa dipandang penting karena, bukan hal yang mudah untuk mencapai keberhasilan yang diharapkan dalam MEA 2015. Meskipun setiap negara ASEAN telah memiliki komoditi andalan namun yang paling penting dan mendasar adalah kesiapan SDM.

Mengembangkan SDM Indonesia tidaklah semudah membalikan telapak tangan mengingat jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 237 juta jiwa lebih. Disebutkan bahwa pen-

didikan merupakan mesin mobilitas vertikal sosial, ekonomi dan budaya. Hal ini berarti bahwa mahasiswa mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan perekonomian Indonesia guna menyongsong MEA 2015. Mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan seperti bahasa asing untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya agar dapat bersaing dengan negara lain.

Berkenaan dengan visi dan komitmen Indonesia dalam integrasi di kawasan, Direktur KSEA menyampaikan bahwa MEA 2015 sejalan dengan kepentingan dan kebutuhan Indonesia sebagaimana telah ditunjukkan oleh para Pemimpin Indonesia sejak awal kemerdekaan. Dalam perkembangannya, tiga dasawarsa pasca pembentukan ASEAN, perekonomian negara-negara ASEAN dihantam krisis finansial Asia. Sehubungan dengan hal itu, integrasi ekonomi sepuluh negara anggota ASEAN dipandang penting guna meningkatkan daya tawar, daya saing, dan daya tarik ASEAN. Pada tahun 2007, para Pemimpin ASEAN menyepakati percepatan pembentukan MEA yang semula tahun 2020 menjadi tahun 2015.

Terkait visi Indonesia terhadap integrasi kawasan dijelaskan bahwa

globalisasi dunia yang sudah menjadi realitas dan tingkat keterkaitan antar negara/wilayah di dunia mendorong ASEAN untuk berintegrasi agar tetap relevan dalam geopolitik dan geoekonomi regional serta global.

Direktur KSEA juga menjelaskan bahwa sebagai *competitive economic region*, terdapat beberapa hal penting di dalam ASEAN yaitu *ASEAN Single Window*, *Master Plan on ASEAN Connectivity*, *ASEAN Single Aviation Market*, *ASEAN Single Shipping Market*, dan *ASEAN Single Tourism Destination*.

Digarisbawahi bahwa dengan potensi SDA dan bonus demografi yang Indonesia miliki, seharusnya Indonesia dapat memanfaatkan segala peluang menuju MEA 2015. Namun demikian, Indonesia juga diharapkan dapat mengatasi tantangan-tantangan MEA 2015. Terlepas dari tantangan infrastruktur, pola pikir (*mind-set*) merupakan salah satu tantangan terbesar bagi masyarakat Indonesia, yang cenderung *inward looking* dan pesimis melihat potensi nasional. Dalam kaitan itu, masyarakat Indonesia, khususnya para mahasiswa, harus memiliki pola pikir optimis dan *outward looking* untuk memanfaatkan peluang MEA 2015. ●

SUMBER: DIREKTORAT KSEA

SOSIALISASI MASYARAKAT ASEAN 2015 DI GARUT, 3-4 JULI 2014

Sosialisasi tentang Masyarakat ASEAN 2015 di Garut pada 3 Juli 2014 terlaksana atas kerja sama yang baik antara Kemlu dan *ASEAN Youth Center* Garut. Seminar yang diikuti Guru-Guru se-Kabupaten Garut. Seminar diawali dengan sambutan ASEAN Youth Center, yang pada kesempatan tersebut menyampaikan perlunya memberikan informasi seluas-luasnya tentang ASEAN kepada masyarakat Garut sehingga masyarakat dapat memahami dan memiliki Masyarakat ASEAN.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Direktur KFA, J.S. George Lantu didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Selanjut-

nya baik Direktur KFA dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut selaku narasumber menyampaikan materi terkait pembentukan Masyarakat ASEAN 2015.

Setelah melaksanakan sosialisasi Masyarakat ASEAN 2015 dengan guru-guru, pada 4 Juli 2014 telah dilaksanakan Seminar dengan tema “Penguatan Kewirausahaan Pemuda dalam Menyambut Masyarakat ASEAN 2015”, yang dihadiri oleh 224 orang pemuda dari berbagai unsur seperti mahasiswa, akademisi, pengusaha muda, dan aktivis organisasi pemuda.

Seminar dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Kabupaten Garut, mewakili Bupati Garut, yang menyam-

paikan apresiasi kepada Kemlu, Kemenpora, dan *ASEAN Youth Center*. Wakil Bupati juga menyampaikan harapan untuk meningkatkan jumlah wirausaha khususnya pengusaha muda (dari 0,6% menjadi 1% dari total penduduk) di Kabupaten Garut.

Sesi paparan menghadirkan tiga orang narasumber yaitu perwakilan dari Kemenpora, Direktur KFA, dan perwakilan dari *ASEAN Youth Center*. Beberapa hal yang menjadi pembahasan antara lain terkait kewirausahaan, persiapan pembentukan Masyarakat ASEAN 2015 terkait pilar sosial budaya (termasuk peran pemuda), dan tantangan pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN. ●

TRAVEL.DETIK.COM



Kabupaten Garut, salah satu sasaran sosialisasi Masyarakat ASEAN, yang digelar oleh Ditjen Kerjasama ASEAN.



Siswa SMA juga menjadi sasaran sosialisasi tentang Masyarakat ASEAN.

ASEAN GOES TO SCHOOL (AGTS), DI KEPULAUAN SANGIHE, SULAWESI UTARA

Informasi mengenai perkembangan kerja sama ASEAN ke berbagai pemangku kepentingan di daerah khususnya wilayah terluar/perbatasan tengah digencarkan. Kabupaten Kepulauan Sangihe tengah berupaya untuk mengembangkan diri melalui peningkatan mutu sumber daya manusia, eksplorasi potensi ekonomi dan pariwisata. Untuk itu, pemerintah daerah Kabupaten Sangihe menyambut baik dan mendukung inisiatif Kemlu dalam menyebarkan informasi dan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai peluang dan tantangan yang dari pembentukan Masyarakat ASEAN 2015.

Kegiatan AGTS dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2014 di Aula SMK Negeri 1 Kabupaten Kepulauan Sangihe dan dihadiri oleh 88 orang peserta SLTA/SMK/ sederajat. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Dikpora Kabupaten Kepulauan Sangihe yang menyampaikan tentang dampak dan tantangan elemental pembentukan Masyarakat

ASEAN 2015 bagi seluruh masyarakat Indonesia dan pentingnya para pelajar untuk menyerap informasi mengenai ASEAN yang cukup terbatas dan belum menjangkau masyarakat Sangihe.

Seminar Guru-guru SLTP dan SLTA/ sederajat dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2014 di Aula SMK Negeri 1 Kabupaten Kepulauan Sangihe dan dihadiri oleh 87 orang peserta guru-guru se-Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Dikpora Kabupaten Sangihe yang juga bertindak sebagai salah satu narasumber selain Direktur KFA. Dalam presentasinya, Sekretaris Dikpora Kabupaten Sangihe menjelaskan tentang berbagai dampak dari letak geografis yang berbatasan dengan wilayah negara tetangga, dalam hal ini Filipina Selatan, serta peluang aktualisasi dan pengembangan kompetensi guru-guru melalui pembentukan Masyarakat ASEAN 2015. Sementara itu, Direktur KFA menitikberatkan pada tujuan pembentukan Masyarakat

ASEAN 2015, khususnya pada sektor kerja sama pendidikan ASEAN (*ASEAN Curriculum Sourcebook*, *ASEAN Credit Transfer System*, dan *ASEAN University Network*) dan peningkatan kemampuan guru dan peserta didik melalui penguasaan bahasa asing.

Kuliah Umum dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2014 di Aula SMK Negeri 1 Kabupaten Kepulauan Sangihe dan dihadiri oleh 121 mahasiswa/i Politeknik Negeri Nusa Utara. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan yang menyampaikan tentang pentingnya mahasiswa/i memahami konsepsi ASEAN dan rencana pembentukan Masyarakat ASEAN 2015 serta peluang dan tantangan Kabupaten Kepulauan Sangihe yang terdiri dari 105 pulau. Kuliah Umum membahas tentang visi, pencapaian, dan tantangan Masyarakat ASEAN serta implementasi Cetak Biru Masyarakat ASEAN.●

SUMBER: DIREKTORAT KFA

SEMINAR MOBILITAS PENDIDIKAN DI ASEAN DI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Seminar yang digelar pada 12 Agustus 2014 ini merupakan inisiatif Kemlu RI yang mendapat tanggapan positif serta dukungan dari Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Seminar “Mobilitas Pendidikan di ASEAN: Menyongsong Masyarakat ASEAN 2015” dihadiri oleh 224 orang peserta yang terdiri dari mahasiswa dari UNY dan perwakilan mahasiswa dari UGM, ISI Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, AMIKOM, UAD, UST dan UPN Yogyakarta.

Seminar dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor III UNY. Ia mengharapkan informasi mengenai pembentukan Masyarakat ASEAN 2015 dapat membuka jendela informasi seluas-luasnya tentang manfaat dan tantangan pembentukan Masyarakat ASEAN 2015 khususnya di sektor pendidikan.



Suasana seminar Mobilitas Pendidikan di ASEAN yang digelar di UNY

Hadir sebagai narasumber antara lain perwakilan Direktorat Kerja Sama Fungsional ASEAN (KFA) dan Kepala Kantor Urusan Internasional dan Pemitraan UNY. Beberapa hal yang mengemuka antara lain kesiapan sumber daya manusia dan tenaga kerja Indonesia untuk bersaing di ASEAN, kesiapan dunia

pendidikan Indonesia menyongsong pembentukan Masyarakat ASEAN 2015, manfaat ASEAN Credit Transfer System dalam menjamin mobilitas pendidikan di ASEAN, dan manfaat Masyarakat ASEAN bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. ●

SUMBER: DIREKTORAT KFA

ASEAN GOES TO SCHOOL (AGTS) DI JAYAPURA



Siswa-siswi SMP di Jayapura

Seminar Masyarakat ASEAN untuk guru-guru se-Kota Jayapura ini diselenggarakan pada tanggal 23 Juli 2014 dan dihadiri oleh kurang lebih 100 orang guru SMP/SMA dan sederajat. Seminar diawali oleh sambutan Direktur KFA dan di-

lanjutkan dengan pembukaan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura yang menyampaikan tentang upaya peningkatan kualitas siswa-siswi dengan memasukkan materi tentang ASEAN ke dalam kurikulum pembelajaran.

Dalam sesi presentasi, Direk-

tur KFA menjelaskan tentang kesempatan melanjutkan pendidikan tinggi dan lapangan pekerjaan serta tantangan dari meningkatnya persaingan. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura menyampaikan paparan mengenai perkembangan pendidikan di Kota Jayapura dan harapan tindak lanjut kerja sama di ASEAN.

Kegiatan AGTS dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2014 di Aula SMA 5 Jayapura dan dihadiri oleh kurang lebih 100 orang siswa-siswi SMP/SMA dan sederajat. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kabid Pendidikan Menengah Kota Jayapura, mewakili Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura, yang menyampaikan apresiasi dan pentingnya mengenalkan Masyarakat ASEAN kepada para siswa. ● SUMBER: DIREKTORAT KFA

Antusiasme masyarakat Makassar dalam menyambut Masyarakat ASEAN 2015 ternyata cukup tinggi. Ini terlihat jelas saat Ditjen Kerja Sama ASEAN menggelar rangkaian kegiatan Sosialisasi Masyarakat ASEAN 2015 di Makassar pada tanggal 1 – 2 Oktober lalu. Acara bertema ‘Menuju Masyarakat ASEAN 2015’ itu dibanjiri oleh 350 peserta dari berbagai kalangan.

Turut hadir dalam acara, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Ir. H. Agus Arifin Nu'mang; Dekan FISIP, Universitas Hasanuddin, Prof. Andi Alimuddin Unde; Rektor Universitas Muslim Indonesia (UMI), jajaran wakil pemerintah daerah Sulawesi Selatan dan Kota Makassar, dosen dan mahasiswa dari perguruan tinggi di Makassar, serta media cetak dan elektronik.

Acara seminar membahas tiga pilar Masyarakat ASEAN, yaitu Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN (*ASEAN Political-Security Community*), Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*), dan Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN (*ASEAN Socio-Cultural Community*), yang dibagi dalam tiga sesi.

Sesi pertama mengenai Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN 2015 menghadirkan pembicara antara lain Eddy Mulya, Kasubdit Keamanan Direktorat Polkam ASEAN, Edy Prasetyono, Ketua Program Studi Pasca Sarjana Ilmu HI Universitas Indonesia, dan Dr. Adi Suryadi, Kajar HI Fisip Universitas Hasanuddin. Sesi ini menggarisbawahi pentingnya Masyarakat Politik Keamanan ASEAN untuk mewujudkan sebuah kawasan yang damai dan stabil yang menjadi modal utama bagi proses pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat ASEAN. Dalam sesi ini dibahas beberapa mekanisme dan kerja sama yang ada dibawah payung Masyarakat Politik Keamanan ASEAN. Tujuannya, antara lain adalah untuk membangun rasa saling percaya dan meningkatkan kapasitas masing-masing negara anggota ASEAN.

Sesi kedua membahas mengenai Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 dengan pembicara antara lain Lingga Setiawan, Kasubdit Perdagangan dan Perindustrian, Direktorat Kerja Sama



Seminar menyambut Masyarakat ASEAN di Makassar

JAWAPOSMAKASSAR.COM

MAKASSAR SIAP MENYAMBUT MASYARAKAT ASEAN 2015

Masyarakat ASEAN 2015 sudah di depan mata. Masyarakat Sulawesi Selatan menyambu antusias dan siap berkompetisi dengan negara ASEAN lain.

Ekonomi ASEAN, Endo Anugrah, Direktorat Kerja Sama ASEAN, Kemendag, dan M. Ilham Alim Bachrie, Wakil Ketua Kadin Sulawesi Selatan. Pada sesi ini dibahas antara lain bahwa dengan dibentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN, proses perpindahan barang yang lebih mudah dan pasar tunggal akan memberikan lebih banyak peluang bagi Indonesia. Salah satu contoh adalah bahwa kemajuan *ASEAN Free Trade Agreement* (AFTA) yang telah berjalan telah memberikan akses produksi ASEAN ke pasar-pasar di luar ASEAN. Oleh karenanya, Indonesia perlu melakukan upaya agresif melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN agar produksi Indonesia dapat masuk ke pasar negara-negara anggota ASEAN lainnya secara lebih signifikan.

Sesi ketiga membahas mengenai pilar Masyarakat Sosial Budaya ASEAN 2015 dengan pembicara Dicky Fabrian, Kasubdit Iptek, Lingkungan Hidup, Penanggulangan bencana, Direktorat Kerja sama Fung-

sional ASEAN, Prof. Andi Alimuddin Unde Dekan FISIP, Universitas Hasanuddin Makassar, dan Budayawan, Alwy Rahman, M.A.

Sesi itu menekankan pentingnya penguatan integrasi ASEAN yang berpusat pada masyarakat (*people-centred*) serta memperkokoh kesadaran, solidaritas, kemitraan, dan rasa kebersamaan masyarakat (*we feeling*) terhadap ASEAN yang merupakan arah dari Masyarakat Sosial Budaya ASEAN. Hal ini diperkuat dengan capaian-capaian pilar sosbud yang menjadi wujud dari meningkatnya peran *people-to-people contact*. Selain itu dibahas pula mengenai pentingnya keterlibatan seluruh unsur lapisan masyarakat Indonesia dalam mempromosikan budaya sehingga budaya Indonesia mampu berkompetisi. Budaya yang merupakan “jiwa” dari Masyarakat ASEAN, sebaiknya dapat diperkuat sehingga dapat menjadi perekat Masyarakat ASEAN nantinya. ●

SUMBER: DIREKTORAT POLKAM ASEAN



BAMBANG .S. PERDAGANGAN BEBAS BUKAN MASALAH BAGI SAYA

PENGUSAHA alat-alat listrik, teknik, dan panel ini mengaku pernah mendengar kata ASEAN yang sempat ia pelajari ketika di bangku sekolahnya. Walaupun begitu, Pemilik toko Cipta Jaya yang berlokasi di Gedung Pegadaian Kenari Baru di jalan Salemba ini belum pernah mendengar tentang Masyarakat ASEAN 2015.

Meskipun belum pernah mendengar tentang Masyarakat ASEAN 2015, Bambang S. berpendapat pasar tunggal ASEAN atau Masyarakat ASEAN 2015 akan sangat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya dalam persaingan bisnis, karena perlunya membuka banyak pabrik di berbagai negara. Dalam hal ini pasar tunggal dan Masyarakat ASEAN memberikan kesempatan membuka banyak pabrik ke negara-negara ASEAN lainnya.

Pengusaha muda yang memiliki cabang usahanya di beberapa lokasi di Jakarta ini tidak khawatir bersaing dengan pedagang dari negara ASEAN lainnya. Perdagangan bebas menurutnya bukan masalah yang mengkhawatirkan. Bambang yakin, tidak semudah itu para penjual dari negara ASEAN lainnya untuk masuk pasar Indonesia, apalagi mereka belum mahir berbahasa Indonesia. Selain itu, faktor harga juga berpengaruh. “Harga dari penjual Indonesia akan lebih murah dibandingkan dengan penjual dari luar Indonesia,” kata Bambang. •

RONA MEMBANTU DALAM PERTUKARAN PELAJAR ANTAR NEGARA ASEAN

RONA salah satu mahasiswa Ilmu Politik di Universitas Indonesia yang pernah mendengar kata ASEAN dan memahaminya. Istilah Masyarakat ASEAN 2015 saat ini sedang dipelajari di kampusnya. Menurut Rona, Masyarakat ASEAN 2015 akan sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Ia sangat berharap dengan adanya Masyarakat ASEAN 2015 akan membantu masyarakat dalam hal pendidikan, khususnya dalam pertukaran pelajar antar negara anggota ASEAN.

Gadis ini juga pernah membantu sosialisasi Masyarakat ASEAN 2015 melalui media sosial seperti facebook. Ada kekhawatiran yang muncul di pikiran Rona tentang pasar bebas di 2015 nanti. “Saya khawatir sekali dengan pasar bebas 2015 nanti, apalagi jika tenaga kerja di Indonesia tidak dapat bersaing dengan tenaga kerja dari negara anggota ASEAN lainnya. “Kasihlah tenaga kerja Indonesia pasti akan banyak pengangguran. Di sini saya berharap peran pemerintah lebih banyak. Misalnya dalam memberikan pelatihan-pelatihan sehingga soft dan hard skill mereka meningkat. Kalau tenaga kerja Indonesia sudah siap, pasti pasar bebas dapat dilalui”, ucap Rona. •





WIKY JANGAN SAMPAI BUDAYA KITA MENGHILANG

WIKY adalah mahasiswi jurusan Akuntansi di Politeknik Jakarta. Gadis manis ini pernah mendengar kata ASEAN dan memahaminya tetapi ia belum pernah mendengar Masyarakat ASEAN 2015. Walaupun Wiky belum pernah mendengar tentang Masyarakat ASEAN 2015, dia berpendapat bahwa Masyarakat ASEAN 2015 akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya dalam perdagangan.

“Menurut saya bermanfaat sekali Masyarakat ASEAN 2015 nanti, kita bisa dengan mudah bekerja di luar negeri. Apalagi di sektor perdagangan pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN akan sangat membantu produk-produk kita bisa terkenal di negara ASEAN lainnya, malah akan semakin meningkatkan pendapatan masyarakat kita”, ujar mahasiswi akuntansi tersebut.

Meskipun Wiky mendukung Masyarakat ASEAN 2015, ia juga memiliki sedikit kekhawatiran. Menurutnya, dampak dari pasar bebas tidak bisa dihindari misalnya dari segi budaya. Tentunya masyarakat dari negara ASEAN lainnya akan membawa budaya mereka ke Indonesia dan ada banyak kemungkinan budaya mereka akan mempengaruhi budaya asli Indonesia.

“Sebelum pasar bebas saja, budaya Indonesia sudah mulai menghilang karena dipengaruhi budaya lain yang datang dari luar, apalagi adanya pasar bebas,” ujar Wiky. •

IKE HARUS BENAR-BENAR PERSIAPKAN DIRI

MAHASISWI ini kuliah di Universitas Indonesia. Ia pernah belajar tentang ASEAN, selain itu ia juga belajar tentang Masyarakat ASEAN 2015, sehingga dua hal tersebut tidak asing lagi bagi Ike.

Menurut Ike, Masyarakat ASEAN 2015 akan sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar dalam segi perdagangan. Walaupun Ike setuju, ia masih mengkhawatirkan beberapa hal seperti persaingan bebas. “Saya sih khawatir sekali. Jelas persaingan akan semakin ketat, saya takut jika SDM Indonesia masih belum siap dan tidak mampu bersaing dengan SDM dari negara anggota ASEAN lainnya. Mulai sekarang masyarakat Indonesia harus benar-benar mempersiapkan diri dalam menyambut Masyarakat ASEAN 2015,” ujar Ike. Menyampingkan rasa khawatirnya, Ike mengaku telah siap menyambut Masyarakat ASEAN 2015. •



AJENG WIDYASTUTI KITA SEMUA PASTI SIAP

Gadis manis berumur 20 Tahun ini sering mendengar Masyarakat ASEAN 2015. Mahasiswi Hubungan Internasional Universitas Nasional Jakarta ini sangat mendukung Masyarakat ASEAN 2015 dan menurutnya akan sangat bermanfaat untuk Indonesia. “Menurut saya sih bermanfaat, karena pasar Indonesia akan lebih luas. Memasarkan produknya bisa lebih luas, nantinya kalau ekspor barang ke negara – negara anggota ASEAN bisa tanpa pajak” ujar Ajeng Widyastuti.

Ajeng juga pernah membantu sosialisasi Masyarakat ASEAN 2015, khususnya sosialisasi melalui media sosial. Rasa kekhawatiran sama sekali tidak muncul di kepala mahasiswi tingkat akhir ini. “Saya sih tidak khawatir, asal lebih menyiapkan diri lagi pasti kita semua siap” ucap mahasiswi Universitas Nasional ini. •





INDRA SETYA S INDONESIA UNGGUL DI SEKTOR HASIL BUMI

“**MASYARAKAT** ASEAN berarti sekumpulan negara anggota ASEAN yang berdiri sejak tahun 1967 menjadi satu” demikian jawaban Indra Setya S atas pertanyaan yang dilontarkan tim Majalah Masyarakat ASEAN kepadanya. “Menjadi pasar tunggal tidaklah mudah pastinya adanya persaingan” tambahnya.

Karyawan Ray White bidang properti yang berada di kawasan Radio Dalam ini meminta jika memang Masyarakat ASEAN ini berlaku tahun 2015, pemerintah hendaklah mempersiapkan segala sesuatunya, seperti mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya para pengusaha dan pedagang yang terkena dampak langsung dari pasar tunggal. “Adanya Masyarakat ASEAN 2015 tidak perlu ditakuti karena Indonesia unggul di sektor hasil bumi, cuma kita masih kurang memiliki kompetensi dalam hal manajemen,” tambah Indra.

Sebab itu, pemerintah harus memberikan keterampilan-keterampilan di bidang masing-masing karena bagaimana pun juga pasar tunggal akan mempengaruhi segala aspek. Semoga adanya Masyarakat ASEAN 2015 ini tidak membawa dampak yang merugikan masyarakat Indonesia” harap Indra. •

GISELA LUIGI S PELUANG BESAR DAN TANTANGAN

Mahasiswi Universitas Brawijaya semester akhir ini menilai ASEAN merupakan organisasi yang penting bagi kita semua. Gisela yang memahami betul mengenai Masyarakat ASEAN sepakat bahwa ASEAN akan mampu menciptakan sebuah masyarakat yang berpandangan maju, hidup dalam lingkungan yang damai, stabil, dan makmur, dipersatukan oleh hubungan kemitraan secara dinamis serta menciptakan masyarakat yang saling peduli.

Menurut Gisela berdirinya Masyarakat ASEAN ini akan memberikan peluang besar bagi Indonesia sekaligus tantangan. Pasar tunggal 2015 mengharuskan seluruh tenaga profesional di Indonesia bersaing dengan tenaga profesional dari negara anggota ASEAN lainnya. Tentu bukan hanya *hard skill* yang di tingkatkan tetapi juga *soft skill*. “Adanya Masyarakat ASEAN 2015 mampu membawa masyarakat Indonesia khususnya generasi muda dapat bersaing ke tingkat internasional. Bukan hanya dari segi tenaga profesional tetapi juga pendidikan.

Adanya Masyarakat ASEAN 2015 semakin memperluas kerja sama dalam bidang pendidikan seperti *student exchange* dan paling utama memberikan banyak beasiswa. Generasi muda harus mulai mempersiapkan diri sebelum 2015 dan membuktikan apakah kita mampu bersaing atau tidak, “ tutup Gisela. •



KOTA SORONG SIAP SAMBUT MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015

Sumber daya manusia Sorong harus memiliki kemampuan terukur dan keunggulan kompetitif. Kalau tidak terukur, tidak unggul, tidak akan laku.

Kota Sorong siap menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Hal itu mengemuka dalam acara Sosialisasi Masyarakat ASEAN 2015 yang diselenggarakan di Aula Samu Siret Pemerintah Kota Sorong, Papua Barat. Sosialisasi Masyarakat ASEAN 2015 yang berlangsung pada 20-21 November 2014 itu dihadiri oleh dua ratus pegawai di lingkungan kota Sorong, termasuk pimpinan SKPD, para Kepala Distrik, Lurah dan staf serta komponen masyarakat lainnya. Pada hari berikutnya, gedung Samu Siret dipenuhi oleh sekitar tiga ratus generasi muda dari kalangan pemuda, akademisi, mahasiswa dan pelajar serta para guru dan dosen perguruan tinggi se-kota Sorong.

Wakil Walikota Sorong, dr. Hj. Pahimah Iskandar dalam sambutan pembukaan sosialisasi Masyarakat ASEAN 2015 menyampaikan penghargaan kepada Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, Kemlu RI atas pelaksanaan sosialisasi masyarakat ASEAN 2015 di kota Sorong. Ia juga menegaskan kesiapan Pemkot Sorong dalam menyambut pemberlakuan MEA. Ditambahkan Wali Kota Sorong, seluruh pihak, baik pemerintah, pengusaha, dunia pendidikan, *stakeholder* terkait lainnya, harus bersiap dari sekarang.

Sumber daya manusia (SDM) harus memiliki kemampuan terukur dan keunggulan kompetitif. Kalau tidak terukur, tidak unggul, nanti tidak akan laku. "Karena itu, semua pihak harus berupaya meningkatkan kemampuan dan keterampilannya, agar dapat terus mengembangkan ide, kreasi, dan inovasi dalam memberdayakan potensi yang ada di sekitarnya," kata Pahimah Iskandar.

Menurut Pahimah, penunjukan kota Sorong sebagai tempat pelak-

sanaan sosialisasi MEA 2015 dipandang tepat. Selain karena letak geografis Sorong sebagai pintu gerbang ke tanah Papua dan kawasan sekitarnya, juga karena kegiatan sosialisasi ini dipandang selaras dengan visi Pemkot Sorong, yakni "Terwujudnya Kota Sorong sebagai Kota Termaju di Tanah Papua". Karenanya, Sorong pun siap berkompetensi di segala aspek pembangunan daerah menuju Masyarakat ASEAN 2015.

Kegiatan sosialisasi itu berlangsung selama dua hari berturut-turut di Distrik Remu Utara, Sorong dan menghadirkan tiga orang narasumber. Yaitu, Rossalis R. Adenan, Pejabat Fungsional Diplomasi Kemlu, Pusparida Syahdan, peneliti dari Pusat Studi ASEAN (PSA) Universitas Hasanuddin dan Kisman Rahayaan, Staf Ahli Walikota Sorong Bidang Pembangunan.

Sejalan dengan sambutan Wakil Wali Kota Sorong dan visi pemerintah daerah, Rossalis mengurai penjelasan tentang pembentukan MEA, termasuk pembebasan arus barang, jasa, investasi, modal, tenaga kerja terampil dan pengaruhnya terhadap masyarakat Indonesia. Rossalis juga menegaskan pentingnya kesamaan persepsi mengenai MEA yang selayaknya dipandang sebagai sebuah peluang untuk kemajuan bersama, dan bukan sebuah ancaman.

Perlu tercipta sinergi antara Pemerintah pusat dan daerah, kalangan bisnis, lembaga pendidikan dan masyarakat umum agar berbagai potensi dan kearifan lokal daerah Sorong dapat dioptimalkan demi memanfaatkan peluang yang terkandung dalam pasar integrasi MEA.

Rossalis juga menjelaskan kepada kalangan akademisi, mahasiswa dan pelajar mengenai kerja sama di bidang pendidikan yang dapat bermanfaat bagi para mahasiswa dan



Sosialisasi MEA di Kota Sorong

pelajar, seperti *ASEAN Curriculum Sourcebook*, rencana pembentukan *ASEAN University Network*, *ASEAN Credit Transfer System*, dan *ASEAN Quality Reference Network*. Hal senada ditekankan pula oleh Pusparida Syahdan, peneliti PSA Universitas Hasanuddin. Menurutnya, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci bagi kota Sorong untuk dapat ikut bersaing dalam menghadapi era pemberlakuan MEA demi mewujudkan visi dan kemajuan di kota Sorong.

Sementara Staf Ahli Walikota Sorong Bidang Pembangunan, Kisman Rahayaan mengelaborasi potensi, kemajuan dan daya saing kota Sorong, termasuk di dalamnya infrastruktur bandara dan pelabuhan, pariwisata dan perhotelan, pengelolaan hasil laut serta lembaga-lembaga pendidikan dan pembangunan SDM yang berkualitas. Posisi strategis dan potensi kota Sorong tersebut memberikan keyakinan bahwa kota Sorong siap dan akan mampu bersaing dalam MEA.

Sosialisasi Masyarakat ASEAN di kota Sorong ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pemerintah daerah dan masyarakat umum kota Sorong mengenai Masyarakat ASEAN yang akan diberlakukan pada tahun 2015, khususnya MEA. Acara yang diselenggarakan dalam bentuk pemaparan dan diskusi interaktif tersebut juga diliput oleh media massa setempat serta mendapat tanggapan yang positif dari berbagai kalangan di kota Sorong.

Atmosfir tersebut tercermin melalui ragam dan banyaknya pertanyaan yang disampaikan kepada narasumber baik pada pertemuan sosialisasi, maupun dalam dialog interaktif yang disiarkan oleh stasiun RRI Sorong secara *live on Air* dua hari berturut-turut pada sore hari dan siaran tunda pada pagi hari dan melalui stasiun TV CWM Sorong. •

SUMBER: SETDITJEN KERJA SAMA ASEAN



KIENTHUCDUHOC.VN

2ND ASEAN FUTURE LEADERS SUMMIT 2014 MENYIAPKAN PEMIMPIN ASEAN MASA DEPAN

Pemuda ASEAN adalah pemimpin ASEAN di masa depan. Pemuda ASEAN sangat berperan dalam membawa ASEAN ke masa depan yang lebih baik. Itu sebabnya, kepemimpinan harus dipelajari dan dimiliki sejak awal oleh para pemuda di ASEAN untuk mempersiapkan diri mereka menjadi pemimpin yang sebenarnya di masa depan.

Menyadari pentingnya mempersiapkan pemuda sebagai pemimpin masa depan ini, Kementerian Pengajaran dan Pendidikan Tinggi Malaysia bekerja sama dengan Universiti Sains Malaysia, Universiti Sains Islam Malaysia dan *Prince of Songkla University* di Thailand, menyelenggarakan *2nd ASEAN Future Leaders Summit 2014 (AFLES 2014)* pada tanggal 8 hingga 17

Agustus 2014 lalu.

Kegiatan yang berlangsung selama sembilan hari tersebut merupakan kegiatan yang ke dua kalinya diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan pelatihan kepemimpinan dan kesempatan kepada para pemuda dari negara-negara ASEAN untuk mempelajari berbagai aspek sosial budaya dan membangun jejaring sesama pemuda ASEAN.

AFLES 2014 diikuti oleh 160 pemuda dari sembilan negara anggota ASEAN, minus Singapura. Jumlah ini lebih banyak dari peserta *AFLES* tahun sebelumnya yang hanya diikuti oleh 100 orang peserta. Indonesia mengirimkan sebanyak 12 orang peserta *AFLES* kali ini. Para peserta *AFLES* merupakan kaum muda, yang terdiri dari para maha-

siswa maupun profesional muda yang dipilih berdasarkan prestasi yang mereka miliki serta berdasarkan sumbangan yang telah mereka berikan pada berbagai kegiatan *community development* yang telah mereka lakukan di negaranya masing-masing.

Peresmian program kepemimpinan pemuda ASEAN tersebut dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pengajaran dan Pendidikan Tinggi Malaysia, Prof. Dr. Asma Ismail. Acara tersebut dihadiri pula oleh pejabat Kementerian Pengajaran dan Pendidikan Tinggi Malaysia, pimpinan dan akademisi dari beberapa perguruan tinggi Malaysia, juga dihadiri oleh Duta Besar RI untuk Malaysia, Duta Besar Singapura dan Wakil Duta Besar Thailand di Kuala Lumpur.

Kegiatan peresmian *2nd AFLES*

2014 tersebut juga diisi dengan *talk show* berupa pemaparan dari Prof. Dato' Dr. Ahmad Shukri (*Deputy Vice Chancellor Universiti Sains Malaysia*, Assoc. Prof. Prof Dr. Chusdak Limsakul (*President Prince Songkla University*) dan Prof. Dato' Dr. Musa Ahmad (*Deputy Vice Chancellor Universiti Sains Islam Malaysia*) serta pemaparan dari Duta Besar RI, Duta Besar Singapura dan Wakil Duta Besar Thailand di Malaysia.

Dalam sambutannya, Duta Besar RI untuk Malaysia menegaskan, kepemimpinan merupakan salah satu elemen yang paling penting bagi organisasi regional seperti ASEAN. Untuk menyiapkan para pemuda menjadi pemimpin ASEAN masa depan, perlu dilakukan upaya yang berkesinambungan dalam meningkatkan pemahaman pemuda mengenai ASEAN dan isu-isu politik luar negeri. Langkahnya, antara lain dengan memberi kesempatan kepada para pemuda untuk berpartisipasi dalam berbagai forum ASEAN, melibatkan para pemuda dalam diskusi umum mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ASEAN dan pengambilan kebijakan luar negeri, dan mendorong para pemuda untuk dapat mengetahui berbagai aspek mengenai ASEAN dan politik luar negeri negaranya masing-masing.

Sementara itu, Prof. Dr. Asma Ismail menekankan pentingnya peran pemuda dalam membawa ASEAN ke masa depan yang lebih baik. Prof. Asma juga menyampaikan komitmen Pemerintah Malaysia melalui Kementerian Pengajaran dan Pendidikan Tinggi untuk tetap mendukung pelaksanaan kegiatan *ASEAN Future Leaders Summit* tersebut di masa yang akan datang.

Penyelenggaraan ASFL yang kedua ini menunjukkan keseriusan Malaysia dan Thailand dalam mendorong keterlibatan para pemuda untuk mewujudkan ASEAN sebagai sebuah asosiasi yang *people-centered*. Pemerintah Malaysia meyakini bahwa terwujudnya '*people-centered ASEAN*' merupakan langkah maju dari pemberlakuan *ASEAN Charter*, ASEAN akan menjadi sebuah kendaraan ampuh untuk mewujudkan aspirasi masyarakat di ASEAN di bidang *good governance*, transparansi, standar kehidupan yang lebih tinggi, pembangunan berkelanjutan, pemberdayaan perempuan dan ke-

sempatan yang lebih luas bagi seluruh warganya.

Pemerintah Malaysia telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar melalui Kementerian Pengajaran dan Pendidikan Tinggi serta dua Universitas Malaysia yang terlibat sebagai penyelenggara, *Universiti Sains Malaysia* dan *Universiti Sains Islam Malaysia*, untuk dapat melaksanakan kegiatan yang dipandang cukup strategis dalam mempromosikan pendidikan tinggi Malaysia, serta menempatkan perguruan tinggi

Malaysia sebagai perguruan tinggi yang patut diperhitungkan di kawasan ASEAN.

AFLES sendiri berlangsung di tiga tempat berbeda di Malaysia dan Thailand. Ajang ini diisi dengan kegiatan yang berorientasi pada pembentukan jiwa kepemimpinan bagi para pemuda ASEAN. Antara lain melalui pelatihan yang berfokus pada metoda *experiential learning*, *cultural presentation* dan *eco-tourism presentation*.

● SUMBER : KBRI MALAYSIA, KUALA LUMPUR.

University Student Government
Office of the Vice President for External Affairs

2nd ASEAN
FUTURE LEADERS
SUMMIT
AFLES 2014

8-17th AUGUST 2014
Open to All Students

Registration Deadline:
30th JUNE 2014

Registration Link:
<http://tinyurl.com/AFLES-2014>

Facebook:
<http://www.facebook.com/AFLES2014>

Registration Fee:
ASEAN University: US\$ 100
NON-ASEAN University: US\$ 150
(Including: Accommodation, Food & Local Transportation)

AKEPT KUALA LUMPUR PENANG ROYAL THAILAND

USG AFLES AKEPT HIGHER EDUCATION LEADERSHIP ACADEMY UEM UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Untuk mengurangi hambatan akses pasar sektor jasa di negara ASEAN, maka negara anggota ASEAN melakukan kerja sama sektor jasa secara bertahap. Upaya peningkatan perdagangan jasa di ASEAN meliputi empat *mode of supply*. Empat *mode of supply* dalam perdagangan jasa itu meliputi *cross-border supply*, *consumption abroad*, *commercial presence*, dan *movement of natural persons*.

Pertama, *cross-border supply* merupakan pasokan jasa lintas batas. Contohnya, layanan *telemedicine* atau pengobatan jarak jauh oleh dokter Singapura bagi pasien Indonesia yang berdomisili di Indonesia, dan sebaliknya. Sementara pada mode kedua, *consumption abroad* berarti konsumen domestik pergi ke luar negeri untuk membeli jasa kesehatan. Contohnya, pasien Indonesia pergi berobat ke RS di Singapura, atau sebaliknya.

Sedangkan mode ketiga adalah *commercial presence*, yaitu penyedia jasa kesehatan luar negeri memberikan jasa kesehatannya kepada konsumen di dalam negeri. Contohnya adalah rumah sakit di Singapura yang mendirikan cabang rumah sakitnya di Indonesia, atau sebaliknya.

Kemudian yang keempat yaitu *movement of natural persons* berarti tenaga kerja asing yang menyediakan jasa keahlian tertentu datang ke negara konsumen. Umpamanya, dokter spesialis Singapura yang berpraktik kedokteran di Indonesia, atau sebaliknya.

Perdagangan jasa di ASEAN diatur dalam perjanjian ASEAN *Framework Agreement on Service* (AFAS) yang disepakati oleh para Menteri Ekonomi ASEAN di Bangkok, Thailand, pada 15 Desember 1995. Secara garis besar, AFAS mengatur antara lain:

Pertama, menghapus secara nyata hambatan perdagangan jasa untuk 5 sektor prioritas integrasi (*Priority Integration Sectors/PIS*) yaitu pariwisata, perhubungan udara, e-ASEAN, kesehatan, dan jasa logistik lebih awal dari seluruh sektor jasa lainnya.

Kedua, mendorong adanya kemajuan liberalisasi sektor jasa dalam setiap putaran perundingan melalui bertambahnya jumlah sub sektor



KERJA SAMA SEKTOR JASA KESEHATAN ASEAN

baru yang diliberalisasi. Putaran perundingan dilakukan setiap 2 tahun sekali sejak 2008.

Ketiga, memfasilitasi arus bebas jasa melalui pengaturan saling pengakuan kompetensi (*Mutual Recognition Arrangements / MRAs*) delapan jenis profesi untuk memudahkan pergerakan tenaga kerja profesional di ASEAN.

Mutual Recognition Arrangement (MRA)

MRA adalah kesepakatan yang mengatur tentang *natural person* pada Mode 4. MRA ditujukan untuk memfasilitasi mobilitasi *natural person* di ASEAN sehingga bisa bekerja di salah satu negara ASEAN. Hal ini memerlukan keseragaman dan kesepakatan terkait syarat dan prosedur perizinan (*licencing requirements and procedures*), kualifikasi pra-syarat dan prosedur (*qualification requirements and procedures*), dan standar teknis (*technical standard*) yang berlaku dimasing-masing ne-

gara ASEAN.

Namun, upaya penyeragaman (harmonisasi) perdagangan jasa tidaklah mudah. Ini, karena menyangkut pengaturan kualitas/kompetensi manusia dan perbedaan antar negara terkait sistem pendidikan, pelatihan, pengalaman. Salah satu jalan keluar yang dapat diambil adalah saling pengakuan (*mutual recognition*) kompetensi *natural person* antar negara, sehingga dapat melakukan praktek di negara lain seperti di negaranya sendiri.

Di ASEAN terdapat 3 MRA untuk jasa kesehatan, yang telah ditandatangani oleh para Menteri Perdagangan ASEAN, yaitu: *ASEAN MRA on Nursing Services*, tanggal 8 Desember 2006 di Cebu, Filipina; *ASEAN MRA on Medical Practitioners*, tanggal 26 Februari 2009 di Cha-am, Thailand; dan *ASEAN MRA on Dental Practitioners*, tanggal 26 Februari 2009 di Cha-am, Thailand. ●

SUMBER: DIREKTORAT KSEA

Untuk dapat bersaing dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA,) Indonesia perlu meningkatkan standar kompetensi tenaga kerja dokter di Indonesia, sambil berupaya mengejar keseragaman kompetensi bersama di antara negara-negara ASEAN. Hal itu menjadi salah satu kesimpulan yang mengemuka di dalam Seminar bertajuk "Tantangan dan Peluang Praktisi Medis dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015".

Kegiatan yang diselenggarakan di Surabaya pada bulan April 2014 yang lalu tersebut diadakan oleh Kementerian Luar Negeri bersama Pemerintah Kota Surabaya, dan dihadiri oleh 170 peserta dari kalangan praktisi medis yang berdomisili di Kota Surabaya dan sekitarnya.

Kesimpulan lainnya, antara lain adalah perlunya melakukan evaluasi rutin standar kompetensi yang sudah dibuat untuk bisa mengikuti perkembangan standar kompetensi di negara lain. Peningkatan jumlah dokter melalui penambahan institusi pendidikan kedokteran, juga dibutuhkan. Begitu pula pemetaan distribusi dokter dan intitusi kedokteran yang selama ini bertumpuk di Pulau Jawa. Selain itu, infrastruktur pendukung dalam hal ini teknologi kedokteran dan institusi pendidikan kedokteran yang memadai juga harus diperkuat.

Lalu, terkait dengan praktik dokter asing, pemerintah perlu memikirkan untuk menggunakan celah dalam MRA untuk memposisikan dokter Indonesia menjadi lebih kompetitif dibandingkan dokter negara ASEAN lainnya.

Dalam kegiatan tersebut, Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Duta Besar I Gusti Agung Wesaka Puja menyampaikan bahwa persiapan Pemerintah Kota Surabaya dalam menyambut MEA telah berjalan dengan baik melalui langkah-langkah antisipatif. Hal ini tercermin dari berbagai upaya Pemkot Surabaya untuk meningkatkan daya saingnya di berbagai elemen termasuk dalam hal meningkatkan daya saing SDM-nya.

"Sebagaimana diketahui, kondisi perekonomian Indonesia dan ASEAN terus meningkat di saat negara lain mengalami perlambatan. Saat ini, kawasan ASEAN telah menjadi fokus



MEEDOCTOR.COM

AGAR PRAKTIKI MEDIS SIAP BERSAING DALAM MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

utama dari aliran investasi dunia. Bonus demografi yang telah dinikmati Indonesia sejak tahun 2012 harus dimanfaatkan sehingga Indonesia dapat menjadi aktor utama dalam pertumbuhan ekonomi di kawasan dan dunia" kata Dirjen Kerja sama ASEAN.

Sementara itu, Prof Agus Purwadianto, Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi, menyampaikan bahwa kesehatan tidak saja termasuk hak dasar manusia, tetapi juga merupakan pre-kondisi untuk pertumbuhan ekonomi. "Masyarakat yang memiliki derajat kesehatan yang baik akan memiliki harapan hidup yang lebih tinggi dan pendapatan yang relatif lebih baik," jelas Agus.

Agus menambahkan, beberapa tantangan bidang kesehatan yang dihadapi Indonesia antara lain peraturan domestik yang belum rinci dan harmonis, pengaturan fasilitas

layanan kesehatan yang belum mendetail, dan masih adanya jenis pelayanan kesehatan yang belum dikembangkan, seperti insinyur kesehatan dan dokter terbang.

Terkait liberalisasi bidang jasa kesehatan di ASEAN, Prof. Agus mengatakan bahwa hingga kini harmonisasi kebijakan ASEAN bidang kesehatan masih dalam proses penajakan, khususnya dari sisi bisnis kesehatan seperti prasyarat mendirikan rumah sakit, pembukaan klinik, penggunaan alat kesehatan, dan pembahasan soal penyamaan kurikulum pendidikan kedokteran.

"Hingga saat ini, kemungkinan dokter asing yang dapat berpraktek lintas negara ASEAN masih dalam pembahasan dan diperkirakan ASEAN belum akan mencapai persetujuan terkait hal itu dalam waktu dekat" lanjut Agus. •

SUMBER: DIREKTORAT KSEA

PROSEDUR, TAMENG MEMBANJIRNYA DOKTER GIGI ASING KE INDONESIA

Meskipun Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah di depan mata, tidak mudah bagi dokter gigi asing untuk berpraktik di Indonesia. Jadi, para dokter gigi di Indonesia tidak perlu khawatir. Dalam kerangka *Mutual Recognition Arrangement* (MRA), seorang dokter gigi dari salah satu negara ASEAN hanya dapat mengajukan registrasi untuk berpraktik di Indonesia, jika memiliki kualifikasi yang diakui oleh PDRA (*Professional Dental Regulatory Authority*) dari negara asalnya, dan PDRA dari Indonesia (*host country*).

Tak hanya itu, untuk dapat berpraktik di *host country*, dokter gigi tersebut setidaknya harus sudah berpraktik minimal 5 tahun berturut-turut di negara asalnya serta mematuhi proses pendidikan berkelanjutan (*Continuing Professional Development*) yang berlaku di negara tersebut. Selain itu, dokter gigi tersebut juga harus dinyatakan bebas dari segala bentuk pelanggaran profesional atau pelanggaran etika oleh PDRA dari negara asalnya, baik di tingkat lokal maupun internasional, yang berkaitan dengan praktik dokter di negara asalnya dan di negara lain (dalam batas pengetahuan PDRA di negara tersebut). Selain itu, yang bersangkutan juga tidak boleh sedang tersangkut masalah hukum di negara asalnya maupun di negara lain.



Hanya dokter gigi berpengalaman dan memenuhi kualifikasi tertentu, yang bisa berpraktik di Indonesia.

Di Indonesia, Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) merupakan lembaga resmi yang berperan menjadi PDRA. KKI memiliki fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis di Indonesia.

Pada tahun 2009, KKI menerbitkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 157/KKI/PER/XII/2009 tentang Tata Cara Registrasi Dokter dan Dok-

ter Gigi Warga Negara ASEAN yang Akan Melakukan Praktik Kedokteran di Indonesia. Melalui peraturan ini, KKI memperjelas tata cara memperoleh Surat Tanda Registrasi Dokter Gigi yang menandakan bahwa ia telah memiliki kualifikasi untuk melakukan praktik dokter gigi di Indonesia.

Peraturan ini juga mengharuskan adanya surat rekomendasi dari PDGI cabang setempat di lokasi yang akan dijadikan tempatnya berpraktik.

Selain itu, peraturan ini juga mensyaratkan adanya program adaptasi, yang dijelaskan sebagai “kegiatan pembelajaran dan pengajaran bagi dokter dan dokter gigi Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing lulusan luar negeri untuk penyesuaian kompetensi yang diperoleh selama mengikuti pendidikan dan sikap serta perilaku yang sesuai sosio-budaya masyarakat, terkait dengan kondisi dan masalah kesehatan, agar dapat melakukan praktik kedokteran di Indonesia.

Dengan berbagai persyaratan yang diwajibkan, ternyata tidak mudah bagi dokter/dokter gigi warga negara ASEAN untuk bisa berpraktek di Indonesia. Namun, para dokter/dokter gigi Indonesia tidak boleh lengah dan harus selalu meningkatkan kemampuan dan profesionalitas untuk dapat bersaing dengan para praktisi medis dari negara ASEAN lainnya. •

SUMBER: DIREKTORAT KSEA

Alur Regulasi Dokter Asing

Depkes mengatur syarat untuk dokter asing yang berpraktik. Syarat-syarat tersebut adalah:

- sertifikat kompetensi dari negara asal
- STR dari instansi yang berwenang di negara asal
- fotocopy ijazah yang diakui oleh negara asal
- surat pernyataan telah mengucapkan sumpah atau janji profesi
- surat keterangan sehat fisik dan mental dari negara asal
- surat keterangan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun sesuai dengan jabatan yang akan diduduki
- *letter of performance* dari instansi yang berwenang di negara asal
- surat keterangan berkelakuan baik dari instansi yang berwenang di negara asal
- surat keterangan tidak pernah melakukan pelanggaran etik dari organisasi profesi negara asal
- surat izin praktik dari negara asal yang masih berlaku
- surat pernyataan bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan, sumpah profesi kesehatan, dan kode etik profesi kesehatan yang berlaku di Indonesia
- surat pernyataan bersedia melakukan alih teknologi dan ilmu pengetahuan kepada tenaga kesehatan warga negara Indonesia khususnya tenaga pendamping
- surat pernyataan dari fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia dengan menunjukkan bukti bersedia dan mampu menanggung biaya hidup minimal untuk jangka waktu dua tahun di Indonesia
- mampu berbahasa Indonesia dengan baik yang dibuktikan dengan sertifikat bahasa Indonesia dari lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah

MENGENAL KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) merupakan suatu badan otonom, mandiri, non struktural dan bersifat independen, yang bertanggung jawab kepada Presiden RI. KKI didirikan pada tanggal 29 April 2005 di Jakarta, beranggotakan 17 orang perwakilan dari kalangan kedokteran, yaitu: Dua orang dari Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia, satu orang dari Kolegium Kedokteran Indonesia, dua orang dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia.

Lalu, dua orang lagi dari Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Gigi Indonesia, dua orang dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia, dan satu orang dari Kolegium Kedokteran Gigi Indo-

nesia. Ada lagi tiga orang dari Tokoh Masyarakat, dua orang, dari Kementerian Kesehatan, dan dua orang, dan Kementerian Pendidikan Nasional.

KKI mempunyai fungsi dan tugas yang diamanatkan dalam pasal 7 Undang-undang Praktik Kedokteran (UUPK) nomor 29 tahun 2004 yaitu melakukan registrasi dokter dan dokter gigi, mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi dan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran yang dilaksanakan bersama lembaga terkait dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis.

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya KKI mempunyai wewenang sesuai pasal 8 UUPK yaitu menyetujui

dan menolak permohonan registrasi dokter dan dokter gigi, menerbitkan dan mencabut surat tanda registrasi, mengesahkan standar kompetensi, melakukan pengujian terhadap persyaratan registrasi dokter dan dokter gigi, mengesahkan penerapan cabang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, melakukan pembinaan bersama terhadap dokter dan dokter gigi mengenai pelaksanaan etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi, melakukan pencatatan terhadap dokter dan dokter gigi yang dikenakan sanksi oleh organisasi profesional atau perangkatnya karena melanggar ketentuan etika profesi.●

SUMBER : DISADUR DARI BERBAGAI SUMBER

PATROON.CO.ID



masyarakat asean

Phili **P** pines
Singapo **R** e
Camb **O** dia
Indone **S** ia
Lao **P** DR
Vi **E** tnam
B **R** unei
Tha **I** land
Vie **T** nam
Mala **Y** sia

Diterbitkan oleh:
Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN,
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
Jl. Taman Pejambon No 6, Jakarta